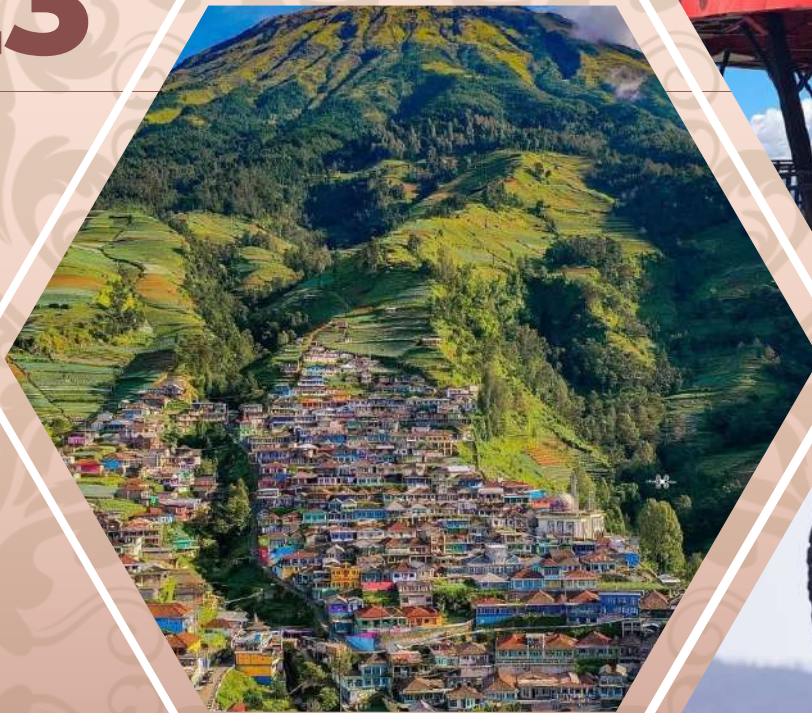




LPPD KABUPATEN MAGELANG 2023



Disusun oleh:
Pemerintah Kabupaten Magelang
2024



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid ☎ (0293) 788215 Fax (0293) 788122
Kode Pos 56511 website:www.inspektorat.magelang.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Kota Mungkid, 18 Maret 2024

INSPEKTUR KABUPATEN MAGELANG

IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si.

Rembina Utama Muda

NIP. 19701201 199003 1 003



BUPATI MAGELANG
KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

Shalom, Om Swastyastu,

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023. LPPD merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan merupakan sumber informasi utama dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang hasil evaluasinya digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut terhadap Pemerintah Daerah.

LPPD merupakan instrumen pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga hak dan wewenang daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional. Dengan berpijak pada kepentingan nasional dimaksud, LPPD merupakan norma perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga kedudukan dan peranan LPPD menjadi sangat penting dan menjadi salah satu kewajiban Kepala Daerah untuk dilaksanakan setiap tahun anggaran.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

Melalui partisipasi aktif dari semua komponen Pemerintahan Daerah mulai dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA, dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), insan pers, alim ulama, tokoh masyarakat serta seluruh *stakeholders* yang menjadi partner dan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Magelang, segala kemajuan dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang telah tercapai selama tahun 2023. Namun kami juga menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunan LPPD ini, sehingga kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Magelang di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023 ini disampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan petunjuk dalam memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara serta daerah dan masyarakat Kabupaten Magelang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Shalom, Om Santi Santi Santi Om,

Namo Buddhaya,

Rahayu.

Kota Mungkid, 22 Maret 2024

BUPATI
P. BUPATI MAGELANG
SEPYO ACHARTO, S.H., M.H.
MAGELANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.1.1. Penjelasan Umum	I-3
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I-11
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-38
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-2
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	II-18
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	II-17
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-24
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-25
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-1
3.1.1. Target Kinerja	III-2
3.1.2. Realisasi Kinerja	III-5
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-5
3.2.1. Target Kinerja	III-5
3.2.2. Realisasi Kinerja	III-7
3.3. Permasalahan dan Kendala	III-8
3.4. Saran dan Tindak Lanjut	III-8
	IV-1



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1. Bidang Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah ..	IV-3
4.1.3. Anggaran	IV-6
4.1.4. Dukungan Personil	IV-7
4.1.5. Hasil Capaian	IV-7
4.1.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi	IV-13
4.2. Bidang Urusan Kesehatan	IV-14
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-14
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah ..	IV-14
4.2.3. Anggaran	IV-24
4.2.4. Dukungan Personil	IV-25
4.2.5. Hasil Capaian	IV-25
4.2.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi	IV-39
4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	IV-40
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-40
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah ..	IV-41
4.3.3. Anggaran	IV-44
4.3.4. Dukungan Personil	IV-45
4.3.5. Hasil Capaian	IV-45
4.3.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi	IV-49
4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	IV-50
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-50
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah ..	IV-50
4.4.3. Anggaran	IV-51
4.4.4. Dukungan Personil	IV-52
4.4.5. Hasil Capaian	IV-52
4.4.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi	IV-55
4.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-57
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-57
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah ..	IV-57
4.5.3. Anggaran	IV-62
4.5.4. Dukungan Personil	IV-62
4.5.5. Hasil Capaian	IV-63
4.5.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi	IV-70



4.6.	Bidang Urusan Sosial	IV-72
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-72
4.6.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah ..	IV-72
4.6.3.	Anggaran	IV-76
4.6.4.	Dukungan Personil	IV-77
4.6.5.	Hasil Capaian	IV-78
4.6.6.	Kendala, Permasalahan dan Solusi	IV-84
4.7.	Program dan Kegiatan	IV-85
4.7.1.	Bidang Urusan Pendidikan	IV-86
4.7.2.	Bidang Urusan Kesehatan.....	IV-88
4.7.3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-89
4.7.4.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	IV-91
4.7.5.	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-92
4.7.6.	Bidang Urusan Sosial.....	IV-95
BAB V PENUTUP		V-1
LAMPIRAN		
Lampiran 2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	1
Lampiran 2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	33
Lampiran 2.2.3.	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	43
Lampiran	Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Magelang Tahun 2023	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2023	I-5
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2023	I-6
Tabel 1.3.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang ...	I-7
Tabel 1.4.	Kondisi ASN Kabupaten Magelang Tahun 2019–2023	I-8
Tabel 1.5.	Komposisi Pendidikan ASN Kabupaten Magelang Tahun 2019–2023 ...	I-9
Tabel 1.6.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023	I-9
Tabel 1.7.	Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I-11
Tabel 1.8.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023....	I-21
Tabel 1.9.	Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023.....	I-41
Tabel 1.10.	Program Pembangunan Daerah Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023	I-41
Tabel 1.11.	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023	I-42
Tabel 1.12.	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023 ...	I-42
Tabel 1.13.	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023	I-43
Tabel 1.14.	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023	I-43
Tabel 1.15.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2023	I-44
Tabel 1.16.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023	I-45
Tabel 1.17.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dalam Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2023	I-45
Tabel 1.18	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dalam Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2023	I-46
Tabel 1.19	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Dalam Arah Kebijakan Satpol PP dan PK serta BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2023	I-47
Tabel 1.20	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2023	I-47



Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Magelang Tahun 2023	II-1
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	II-2
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	II-18
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .	II-24
Tabel 2.5.	Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode Warna	II-26
Tabel 2.6.	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Pada Indikator Tujuan	II-27
Tabel 2.7.	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Pada Indikator Sasaran	II-30
Tabel 2.8.	Capaian Kriteria Penilaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 pada Indikator Sasaran	II-32
Tabel 2.9.	Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023	II-33
Tabel 2.10.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023	II-39
Tabel 2.11.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2023	II-41
Tabel 2.12.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat Tahun 2023	II-45
Tabel 2.13.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023	II-48
Tabel 2.14.	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023.....	II-48
Tabel 2.15.	Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2022	II-51
Tabel 2.16.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2023	II-52
Tabel 2.17.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022	II-53
Tabel 2.18.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Daya Saing Daerah Tahun 2023	II-55
Tabel 2.19.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2019–2022	II-60
Tabel 2.20.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2023.....	II-64
Tabel 2.21.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan Tahun 2023.....	II-66
Tabel 2.22.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2023	II-69
Tabel 2.23.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Jumlah PMKS Tahun 2023.....	II-71
Tabel 2.24.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kethanan Pangan	II-73



	Daerah Tahun 2023.....	
Tabel 2.25.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Ketersediaan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	II-74
Tabel 2.26.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Hunian Yang Layak dan Berkualitas Tahun 2023.....	II-79
Tabel 2.27.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Keberdayaan Gender Tahun 2023.....	II-82
Tabel 2.28.	Indeks Pembangunan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022.....	II-83
Tabel 2.29.	Desa, Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	II-85
Tabel 2.30.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Tahun 2022	II-86
Tabel 2.31.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Tahun 2023	II-88
Tabel 2.32.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022.....	II-90
Tabel 2.33.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Tahun 2023	II-91
Tabel 2.34.	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022.....	II-92
Tabel 2.35.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023	II-93
Tabel 2.36.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Tahun 2023.....	II-96
Tabel 2.37.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023.....	II-98
Tabel 2.38.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023	II-100
Tabel 2.39.	Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023.....	II-101
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023	II-102
Tabel 2.41.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Sistem Manajemen Kepegawaian Tahun 2023	II-103
Tabel 2.42.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-107
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kabupaten Magelang Tahun 2023	III-3
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa se-Kabupaten Magelang Tahun 2023	III-6
Tabel 4.1.	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)	IV-2
Tabel 4.2.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan	IV-3



	Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023	
Tabel 4.3.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-6
Tabel 4.4.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-7
Tabel 4.5.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-8
Tabel 4.6.	Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023 ..	IV-8
Tabel 4.7.	Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Dasar.....	IV-9
Tabel 4.8.	Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Kesetaraan.....	IV-11
Tabel 4.9.	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP _{SPM}) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-12
Tabel 4.10.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-13
Tabel 4.11.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-15
Tabel 4.12.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-24
Tabel 4.13.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-25
Tabel 4.14.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-26
Tabel 4.15.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.....	IV-27
Tabel 4.16.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.....	IV-28
Tabel 4.17.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.....	IV-28
Tabel 4.18.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Balita	IV-29
Tabel 4.19.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar.....	IV-30
Tabel 4.20.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	IV-31
Tabel 4.21.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut ...	IV-32
Tabel 4.22.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.....	IV-33
Tabel 4.23.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	IV-34
Tabel 4.24.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.....	IV-35
Tabel 4.25.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	IV-36
Tabel 4.26.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	IV-37



	(<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	
Tabel 4.27.	Indeks Pencapaian SPM (IP _{SPM}) Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-38
Tabel 4.28.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-39
Tabel 4.29.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-41
Tabel 4.30.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-44
Tabel 4.31.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-45
Tabel 4.32.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-45
Tabel 4.33.	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.....	IV-46
Tabel 4.34.	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.....	IV-47
Tabel 4.35.	Indeks Pencapaian SPM (IP _{SPM}) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-48
Tabel 4.36.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-49
Tabel 4.37.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023.....	IV-50
Tabel 4.38.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-51
Tabel 4.39.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-52
Tabel 4.40.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-52
Tabel 4.41.	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.....	IV-53
Tabel 4.42.	Indeks Pencapaian Target SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	IV-54
Tabel 4.43.	Indeks Pencapaian SPM (IP _{SPM}) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-55
Tabel 4.44.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-55
Tabel 4.45.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-57
Tabel 4.46.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-62



Tabel 4.47.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-62
Tabel 4.48.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-63
Tabel 4.49.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	IV-64
Tabel 4.50.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN).....	IV-65
Tabel 4.51.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN).....	IV-66
Tabel 4.52.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	IV-67
Tabel 4.53.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	IV-68
Tabel 4.54.	Indeks Pencapaian SPM (IP _{SPM}) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-69
Tabel 4.55.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Damkar Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-70
Tabel 4.56.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-70
Tabel 4.57.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-72
Tabel 4.58.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-77
Tabel 4.59.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-77
Tabel 4.60.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-78
Tabel 4.61.	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.....	IV-79
Tabel 4.62.	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	IV-80
Tabel 4.63.	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.....	IV-81
Tabel 4.64.	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.....	IV-82
Tabel 4.65.	Indeks Pencapaian Target SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	IV-83
Tabel 4.66.	Indeks Pencapaian SPM (IP _{SPM}) Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-84
Tabel 4.67.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Sosial Kabupaten	IV-85



	Magelang Tahun 2023	
Tabel 4.68.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-86
Tabel 4.69.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-87
Tabel 4.70.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-88
Tabel 4.71.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-89
Tabel 4.72.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2023.....	IV-90
Tabel 4.73.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-90
Tabel 4.74.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2023 ...	IV-91
Tabel 4.75.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-92
Tabel 4.76.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Satpol PP dan PK Serta BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-92
Tabel 4.77.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-93
Tabel 4.78.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2023	IV-95
Tabel 4.79.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-96
Tabel 4.80.	Capaian Penerapan SPM Kabupaten Magelang Tahun 2023.....	IV-97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2023	II-42
Gambar 2.2.	Grafik Perbandingan Inflasi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2022	II-46
Gambar 2.3.	Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional 2019-2023	II-50
Gambar 2.4.	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota	II-50
Gambar 2.5.	Nilai PDSD Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023	II-56
Gambar 2.6.	Nilai Aspek PDSD Kabupaten Magelang, Tahun 2022-2023	II-56
Gambar 2.7.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2022	II-57
Gambar 2.8.	Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	II-58
Gambar 2.9.	Grafik Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	II-60
Gambar 2.10.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-68
Gambar 2.11.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-68
Gambar 2.12.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022	II-70
Gambar 2.13.	Grafik Persentase Penurunan PMKS Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022.....	II-72
Gambar 2.14.	Grafik Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022	II-76
Gambar 2.15.	Grafik Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022	II-77
Gambar 2.16.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022 .	II-80
Gambar 2.17.	Posisi Relatif Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	II-81
Gambar 2.18.	Grafik Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	II-87

BAB I PENDAHULUAN



LPPD KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat daerah yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK *Output* (Keluaran) dan IKK *Outcome* (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Evaluasi LPPD dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan.

LPPD dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam rangka pengembangan kapasitas pemerintah daerah. LPPD merupakan gambaran kinerja Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun, dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan tolak ukur kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Dalam penyusunan dan penyampaian LPPD ini, sejumlah aturan perundangan digunakan sebagai landasan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



1.1.1. Penjelasan Umum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Magelang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-undang tersebut Kota Magelang diberi hak untuk mengatur Rumah Tangga sendiri. Dengan demikian di Kota Magelang berpusat empat (4) Badan Pemerintahan yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu:

1. Pemerintah Kota Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Kantor Karesidenan kedu; dan
4. Akademi Militer.

Karena fakta-fakta tersebut maka masalah kepadatan Kota Magelang tidak terhindarkan. Di sisi lain sesuai dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap pelayanan pemerintah dan pembangunan semakin meningkat maka muncul gagasan untuk memindahkan ibu kota kabupaten. Gagasan tersebut menguat dengan pengarahan Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Februari 1979, Nomor: OP.140/1979 perihal Pemindahan ibukota Kabupaten Dati II Magelang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sejak bulan Juli 1979, saat itu Bupati Magelang dijabat oleh Drh. Soepardi diadakan kerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang, untuk mengadakan survei lokasi ibukota Kabupaten yang menghasilkan alternatif ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Mungkid, Muntilan, Mertoyudan dan Secang. Hasil survei tersebut dikuatkan oleh survei ulang yang dilaksanakan oleh Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor: 135/3492/PUOD, tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.



Selanjutnya pemindahan ibu kota kabupaten ke Kota Mungkid ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Magelang dari Wilayah Kotamadya Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang tanggal 4 Agustus 1982, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang berkedudukan di Kota Mungkid. Kota baru yang dibentuk di wilayah Kecamatan Mungkid, dan Mertoyudan yang terdiri atas Desa Mendut, Sawitan dan Deyangan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, maka diadakan persiapan fisik maupun administrasi.

Persiapan fisik dilaksanakan dengan membangun di atas tanah seluas 8,08 ha, yang meliputi pembangunan Pendopo, Kantor Sekretariat, Gedung DPRD, Gudang, Garasi, Kantor Dinas Otonom dan Dinas Non Otonom. Komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten Magelang diresmikan penggunaannya oleh Pj. Bupati Magelang Drs. AL Soelistiya dan Ketua DPRD Faishal Soenarto pada tanggal 23 Februari 1984. Pada waktu itu juga dibangun sarana air minum, Gedung SMP dan SMA, Lapangan Drh. Soepardi, Pelebaran jalan Karet-Sawitan dan pembangunan Masjid An Noor.

Kota Mungkid diresmikan sebagai ibukota Kabupaten Magelang pada tanggal 22 Maret 1984 oleh Gubernur Jawa Tengah M Ismail, atas nama Menteri Dalam Negeri pada Prasasti peresmian Kota Mungkid, berada di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang, dan setiap tahun pada tanggal 22 Maret diperingati sebagai hari jadi Kota Mungkid.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah menurut BPS seluas 108.573 hektar atau sekitar 3,34 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan yang digunakan dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten Magelang, luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih adalah 112.926,4 hektar. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110°01' 51" – 110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13" – 7°42'16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut:



- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo

sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang. Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 1.1.
Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	2	3	4	5	6	7
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,63	17
8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34
15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,73	100	

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2024



c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 sejumlah 1.331.921 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (112.126 jiwa), kemudian Kecamatan Grabag (96.935 jiwa) dan Secang (84.154 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (33.090 jiwa).

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Salaman	38.551	38.003	76.554
2	Borobudur	32.806	32.529	65.335
3	Ngluwar	16.469	16.621	33.090
4	Salam	24.219	24.282	48.501
5	Srumbung	24.711	24.616	49.327
6	Dukun	23.977	23.894	47.871
7	Sawangan	29.638	29.352	58.990
8	Muntilan	40.335	40.534	80.869
9	Mungkid	37.556	37.669	75.225
10	Mertoyudan	55.607	56.519	112.126
11	Tempuran	27.139	26.498	53.637
12	Kajoran	31.673	30.849	62.522
13	Kaliangkrik	32.016	30.872	62.888
14	Bandongan	32.172	31.101	63.273
15	Candimulyo	25.965	25.496	51.461
16	Pakis	28.896	27.894	56.790
17	Ngablak	21.866	21.250	43.116
18	Grabag	49.135	47.800	96.935
19	Tegalrejo	27.864	27.128	54.992
20	Secang	42.145	42.009	84.154
21	Windusari	27.864	26.401	54.265
	Jumlah	670.604	661.317	1.331.921

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2024

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Magelang memiliki 21 kecamatan, 5 kelurahan, dan 367 desa. Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Magelang,



Tabel 1.3.
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	Salaman	20	20	20
2	Borobudur	20	20	20
3	Ngluwar	8	8	8
4	Salam	12	12	12
5	Srumbung	17	17	17
6	Dukun	15	15	15
7	Muntilan	14	14	14
8	Mungkid	16	16	16
9	Sawangan	15	15	15
10	Candimulyo	19	19	19
11	Mertoyudan	13	13	13
12	Tempuran	15	15	15
13	Kajoran	29	29	29
14	Kaliangkrik	20	20	20
15	Bandongan	14	14	14
16	Windusari	20	20	20
17	Secang	20	20	20
18	Tegalrejo	21	21	21
19	Pakis	20	20	20
20	Grabag	28	28	28
21	Ngablak	16	16	16
		372	372	372

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2024

- e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dibentuk perangkat daerah yang meliputi:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah berjumlah 18
5. Badan Daerah berjumlah 3
6. Kecamatan berjumlah 21
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran



Jumlah ASN Kabupaten Magelang sampai akhir tahun 2023 sejumlah 9.682 orang. Dengan demikian, terdapat kenaikan 151 orang apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 9.531 orang.

Tabel 1.4.
Kondisi ASN Kabupaten Magelang Tahun 2019–2023

No	Golongan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	I	140	123	100	62	54
2	II	1.166	1.060	1.212	1.497	1.473
3	III	4.381	4.195	4.212	6.381	6.929
4	IV	2.573	2.240	1.916	1.591	1.246
Jumlah		8.260	7.618	7.440	9.531	9.682

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah ASN pada Tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan rata-rata penurunan sejumlah 410. Pada Tahun 2020 penurunan terjadi signifikan yaitu sejumlah 642 orang. Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas, PNS pensiun Atas Permintaan Sendiri, adanya mutasi keluar daerah dan tingginya angka kematian PNS karena covid pada masa pandemi covid-19. Mulai tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah ASN. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan ASN dari jalur penerimaan PPPK sejumlah 1.984 formasi dan tahun 2023 sejumlah 885 formasi.

Pada tahun 2023 komposisi pendidikan ASN Kabupaten Magelang didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 66,42%; kemudian lulusan D-III sebesar 16,59%; lulusan SMA sebesar 7,87%; lulusan S2 sebesar 5,60%; lulusan D-II sebesar 1,60%; lulusan SMP sebesar 1,12%; lulusan SD sebesar 0,45% serta lulusan D-I sebesar 0,35%.



Tabel 1.5.
Komposisi Pendidikan ASN Kabupaten Magelang
Tahun 2019-2023

No	Pendidikan	Tahun										
		2019		2020		2021		2022		2023		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	S2	273	199	293	293	280	269	293	303	264	278	
3	S1 /D-IV	1.642	2.964	1.811	1.811	1.393	2.769	1.811	4.224	1.843	4.588	
4	D – III	198	806	286	286	234	979	286	1253	296	1310	
5	D – II	159	337	77	77	94	197	77	168	63	92	
6	D – I	17	67	6	6	7	39	6	25	4	30	
7	SMA	775	541	584	584	616	356	584	314	537	225	
8	SMP	191	14	127	127	144	10	127	7	98	10	
9	SD	73	4	48	48	51	2	48	5	42	2	
Jumlah		3.328	4.932	3.013	3.232	3.232	4.621	3.232	6.299	3.147	6.535	
		8.260		7.618		7.440		9.531		9.682		

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2024

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berikut adalah ringkasan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2023;

Tabel 1.6.
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Persentase
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.576.527.842.333	2.573.447.894.890,00	99,88
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	443.649.294.413	465.452.257.784,00	104,91
4.1.01	Pajak Daerah	179.322.908.877	189.568.476.778,00	105,71
4.1.02	Retribusi Daerah	19.874.479.802	18.992.881.583,00	95,56
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.664.089.642	30.598.215.796,00	103,15
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	214.787.816.092	226.292.683.627,00	105,36
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	443.649.294.413	465.452.257.784,00	104,91
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.111.381.547.920	2.089.541.001.808,00	98,97
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.882.430.960.920	1.878.067.824.890,00	99,77
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	228.950.587.000	211.473.176.918,00	92,37



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Persentase
1	2	3	4	5
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.497.000.000	18.454.635.298,00	85,85
4.3.01	Pendapatan Hibah	21.497.000.000	18.454.635.298,00	85,85
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.497.000.000	18.454.635.298,00	85,85
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.111.381.547.920	2.089.541.001.808,00	98,97
	JUMLAH PENDAPATAN	2.576.527.842.333	2.573.447.894.890	99,88
5	BELANJA DAERAH	2.848.060.704.055	2.687.649.575.325	94,37
5.1	BELANJA OPERASI	1.834.968.100.071	1.711.671.493.792	93,28
5.1.01	Belanja Pegawai	1.059.258.801.519	979.808.617.479	92,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.039.828.847	553.483.917.105	93,49
5.1.05	Belanja Hibah	177.208.785.205	173.234.449.708	97,76
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.460.684.500	5.144.509.500	79,63
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.834.968.100.071	1.711.671.493.792	93,28
5.2	BELANJA MODAL	333.918.122.609	317.948.951.692	95,22
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.865.059.500	837.573.180	29,23
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.830.327.374	111.013.205.537	95,84
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.747.726.531	121.599.150.695	93,72
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.131.003.708	67.330.738.100	98,83
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.086.005.496	13.986.544.180	99,29
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.258.000.000	3.181.740.000	97,66
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.828.281.026	5.106.915.740	21,43
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.828.281.026	5.106.915.740	21,43
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	23.828.281.026	5.106.915.740	21,43
5.4	BELANJA TRANSFER	655.346.200.349	652.922.214.101	99,63
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.149.867.136	19.923.238.867	98,88
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	635.196.333.213	632.998.975.234	99,65
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	655.346.200.349	652.922.214.101	99,63
	JUMLAH BELANJA	2.848.060.704.055	2.687.649.575.325	94,37
	SURPLUS/(DEFISIT)	(271.532.861.722)	(114.201.680.435)	42,06
6	PEMBIAYAAN DAERAH	271.532.861.722	271.751.861.722	100,08
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	315.907.861.722	315.907.861.722	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	286.776.557.722	286.776.557.722	100,00



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Persentase
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.131.304.000	29.131.304.000	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.375.000.000	44.156.000.000	99,51
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.375.000.000	14.156.000.000	98,48
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	44.375.000.000	44.156.000.000	99,51
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.375.000.000	44.156.000.000	99,51
	PEMBIAYAAN NETTO	271.532.861.722	271.751.861.722	100,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	157.550.181.287	0,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024, Data per 29 Januari 2024, *Unaudited*

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2019-2024), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Magelang dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang permasalahan:

Tabel 1.7.
Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
1	2	3	4
1.	Masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, terutama kemiskinan di perdesaan, yang mata pencaharian penduduk-nya dominan di sektor pertanian	Penanggulangan kemiskinan	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2.	1) Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita; 2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk hidup bugar dan sehat; 3) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai;	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing



No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
1	2	3	4
	4) pembinaan olahraga sejak dini dan berkelanjutan; 5) belum seluruh Kabupaten/Kota mengintegrasikan kebijakan kependudukan dalam kebijakan pembangunan.		
3.	Kondisi kapasitas dan daya saing perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan, yang didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur	1) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 2) Kedaulatan pangan dan energi	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdaya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4.	Kerusakan DAS, lahan kritis, penurunan kualitas sumber daya air, penambangan yang belum menerapkan <i>Good Mining Practice</i> , pengelolaan persampahan, kerusakan sumber daya pesisir dan laut, serta belum optimalnya integrasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.	Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdaya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
5.	1) Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi 2) Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah



No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
1	2	3	4
6.	Belum optimalnya upaya perbaikan kapasitas fiskal daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah
7.	Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sumber ; Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD 2023

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera,

Berdaya Saing dan Amanah”

(SEDAYA AMANAH)

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedayaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.



- 1) **SEJAHTERA** adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg*, *wutuh*, *waras* dan *wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.
- 2) **BERDAYA SAING** adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
- 3) **AMANAHAH** adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka visi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.



Komponen pendidikan dalam mewujudkan peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan. Komponen kesehatan dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan kesehatan. Sementara komponen daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan ketahanan pangan daerah dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi kemasyarakatan maupun pribadi masyarakat.

- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi adalah dengan meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi antara lain pengembangan pertanian, pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan sarana dan prasarana publik, serta pengembangan kepemudaan dan olah raga.

Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup.

- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Misi ini menunjukkan adanya keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik, dan bersih. Pada periode yang lalu tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.



Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan *smart regency* dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media. Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024 dengan uraian program sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
- 3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 5) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 7) Program Peningkatan Sumber Daya Air
- 8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 9) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 10) Program Pengembangan Permukiman
- 11) Program Penataan Bangunan Gedung
- 12) Program Penyelenggaraan Jalan
- 13) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 14) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 15) Program Pengembangan Perumahan
- 16) Program Kawasan Permukiman
- 17) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh



- 18) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
- 19) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 20) Program Penanggulangan Bencana
- 21) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 22) Program Pemberdayaan Sosial
- 23) Program Rehabilitasi Sosial
- 24) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 25) Program Penanganan Bencana
- 26) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 27) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 28) Program Hubungan Industrial
- 29) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 30) Program Perlindungan Perempuan
- 31) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 32) Program Perlindungan Khusus Anak
- 33) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 34) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 35) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 36) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 37) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 38) Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati (Kehati)
- 39) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- 40) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 41) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal MHA yang Berkaitan dengan PPLH
- 42) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 43) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 44) Program Pengelolaan Persampahan
- 45) Program Pendaftaran Penduduk
- 46) Program Pencatatan Sipil



- 47) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)
- 48) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 49) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 50) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 51) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 52) Program Pengendalian penduduk
- 53) Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 54) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAAJ)
Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 55) Program Aplikasi Informatika
- 56) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 57) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
- 58) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 59) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- 60) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 61) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 62) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 63) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 64) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 65) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 66) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 67) Program Pengembangan Kebudayaan Perpustakaan
- 68) Program Pembinaan Perpustakaan
- 69) Program Pengelolaan Arsip
- 70) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 71) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 72) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 73) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 74) Program Pemasaran Pariwisata
- 75) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 76) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 77) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



- 78) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 79) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 80) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 81) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 82) Program Penyuluhan Pertanian
- 83) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 84) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 85) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 86) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 87) Program Perencanaan dan Pengembangan Industri
- 88) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 89) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 90) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 91) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 92) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 93) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 94) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 95) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 96) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 97) Program Kepegawaian Daerah
- 98) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 99) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 100) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Asistensi
- 101) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 102) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 103) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 104) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 105) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 106) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
- 107) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
- 108) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 109) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD Kabupaten Magelang dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. Mendasarkan kerangka pendanaan tahun 2023, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.8.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1.	Pendidikan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengelolaan Pendidikan	1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.	Kesehatan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Peningkatan Pelayanan BLUD
		2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 5) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 5) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Peningkatan Sumber Daya Air (SDA)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		6) Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		7) Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		8) Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		9) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
		10) Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		11) Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		12) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		13) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		2) Program Pengembangan Perumahan	1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 4) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 5) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
		3) Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		6) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		2) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
		3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		4) Program Penanggulangan Bencana	1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.	Sosial	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Rehabilitasi Sosial	1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Penanganan Bencana	1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1.	Tenaga Kerja	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 4) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 5) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		3) Program Penempatan Tenaga Kerja	1) Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Hubungan Industrial	1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		2) Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		4) Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	Pangan	1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		2) Program Penanganan Kerawanan Pangan	1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		3) Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4.	Pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.	Lingkungan Hidup	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
		3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1) Penyimpanan Sementara Limbah B3 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		7) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang Terkait dengan PPLH	1) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 2) Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
		8) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		9) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		11) Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		3) Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
		3) Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
		4) Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
9.	Perhubungan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 3) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 4) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 7) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10.	Komunikasi dan Informatika	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		3) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
12.	Penanaman Modal	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		3) Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13.	Kepemudaan dan Olahraga	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
		4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
14.	Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
15.	Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16.	Kebudayaan	1) Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
17.	Perpustakaan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pembinaan Perpustakaan	1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
18.	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan Pilihan			
1.	Kelautan dan Perikanan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
		4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
2.	Pariwisata	1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
		2) Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Hal Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.	Pertanian	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Peraangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1) Pengembangan Prasarana Pertanian 2) Pembangunan Prasarana Pertanian 3) Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		5) Program Perizinan Usaha Pertanian	1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2) Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
		6) Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		7) Program Pengandaian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 4) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
4.	Perdagangan	1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 2) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
5.	Perindustrian	1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		2) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
6.	Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Unsur Pendukung			
1.	Sekretariat Daerah	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Penataan Organisasi 9) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 10) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Perangkat Daerah 11) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1) Administrasi Tata Pemerintahan 2) Fasilitasi Kerjasama Daerah 3) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		3) Program Perekonomian dan Pembangunan	1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 3) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 4) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Sekretariat DPRD	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9) Layanan Administrasi DPRD
		2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4) Peningkatan Kapasitas DPRD 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7) Fasilitasi Tugas DPRD
Unsur Penunjang			
1.	Perencanaan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
2.	Keuangan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.	Kepegawaian	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Kepegawaian Daerah	1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2) Mutasi dan Promosi ASN 3) Pengembangan Kompetensi ASN 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
4.	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Unsur Pengawasan			
1.	Inspektorat	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		2) Program Penyelenggaraan Pengawasan	1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2) Pendampingan dan Asistensi
Unsur Kewilayahan			
1.	Kecamatan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		4) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Unsur Pemerintahan Umum			
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
		5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023, diolah



1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kebutuhan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyat, maka penerapan Standar Pelayanan Minimal harus tercapai target 100% setiap tahunnya. Standar Pelayanan Minimal merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar dan menjadi urusan pemerintahan yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM urusan Pemerintah wajib mencakup jenis dan mutu Pelayanan Dasar dari bidang urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta bidang urusan Sosial dengan berbagai indikatornya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 merupakan objek kebijakan (regulasi) yang mengatur penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, pencapaian target-target Standar Pelayanan Minimal lebih merupakan kinerja program sektoral, tetapi setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan Pemerintah Daerah melalui Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota dan Tim Penerapan SPM Provinsi. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang menyatakan kewenangan Pemerintah Daerah di mana penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator serta batas waktu pencapaian tetapi berdasarkan: (1) pengumpulan data; (2) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait. Namun dalam penerapannya, seringkali pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Daerah belum optimal. Diperlukan komitmen bersama baik dari Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat untuk pencapaian SPM 100%.



b. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Magelang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.



c. Kebijakan Umum

Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM, mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah (lima tahunan) RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta jangka pendek (tahunan) RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selain itu, SPM juga diintegrasikan ke dalam dokumen penganggaran (APBD). Pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dan melaporkan capaian SPM dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), serta menerapkan SPM sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Magelang menerapkan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum, sehingga terwujud pelayanan prima menuju *Good Governance*. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel serta sesuai dengan asas dan prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. SPM yang ditetapkan Pemerintah menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang guna menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Target Indikator SPM diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Target tahunan indikator SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), KUA PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Berikut ini tabel Program Pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan yang telah terintegrasi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk pelaksanaan tahun 2023:

Tabel 1.9.
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023

Misi Ke-1	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs	86,58
				Presentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter	90
				Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	58,88
				Persentase PNF Terakreditasi (PKBM)	86,36
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikat	94

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Berikut ini tabel program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk pelaksanaan tahun 2023:

Tabel 1.10.
Program Pembangunan Daerah Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023

Misi Ke-1	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	89
				Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	80,50
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	98
			Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	95

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024



Berikut ini tabel program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang telah terintegrasi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk pelaksanaan tahun 2023:

Tabel 1.11.
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023

Misi Ke-2	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik	90,79
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum	92,15

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Berikut ini tabel program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang telah terintegrasi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk pelaksanaan tahun 2023:

Tabel 1.12.
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023

Misi Ke-2	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Pengembangan Perumahan	Persentase layanan pengembangan perumahan	100

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024



Berikut ini tabel program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas yang telah terintegrasi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk pelaksanaan tahun 2023:

Tabel 1.13.
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023

Misi Ke-2	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100
			Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Keispasiagaan Terhadap Bencana	100

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Berikut ini tabel program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial yang telah terintegrasi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk pelaksanaan tahun 2023:

Tabel 1.14.
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023

Misi Ke-1	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS dapat melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	10,1
			Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang divalidasi	NA

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Arah kebijakan tahun 2023 yang menjadi prioritas pembangunan untuk Urusan wajib Pelayanan dasar, khususnya yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi:

1. Bidang Urusan Pendidikan

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.15.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2023

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengaskes pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD, dan Pendidikan Formal/kesetaraan
	2. Harapan lama sekolah	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
	3. Persentase SD/SMP yang terakreditasi minimal B		

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2023 SPM Bidang Urusan Pendidikan sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal Ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Magelang.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 1.16.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan
Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2023

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
			Meningkatkan ketersediaan farmasi, dan alat kesehatan serta penjamahin kesehatan makanan minuman di masyarakat
		Meningkatkan Mutu Pendidikan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2023 SPM Bidang Urusan Kesehatan sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Kesehatan. Hal ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Magelang.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Berikut tabel arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.17.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Dalam Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang Tahun 2023

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Sarana dan Prasarana Publik	Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
			Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2023 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Magelang.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Berikut tabel arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 1.18.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dalam Arah Kebijakan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Magelang Tahun 2023

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan hunian layak dan berkualitas	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2023 SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Hal ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Magelang.

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:

Berikut ini tabel arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.19.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Trantibumlinmas Dalam
Arah Kebijakan Satpol PP dan PK serta BPBD
Kabupaten Magelang Tahun 2023

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Ketenteraman dan ketertiban umum dan penanggulangan bencana	Cakupan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)	Meningkatkan penertiban dan penegakan perda dalam mendukung peningkatan Trantibumlinmas
			Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
		Meningkatkan ketangguhan daerah menghadapi bencana	Penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2023 SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Satpol PP dan PK serta BPBD. Hal Ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Magelang.

6. Bidang Urusan Sosial

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.20.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial
Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial PPKB PPPA
Kabupaten Magelang Tahun 2023

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penurunan PMKS	Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan rehabilitasi sosial
			Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
			Meningkatkan penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
			Meningkatkan pemberdayaan sosial

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan tabel di atas, tahun 2023 SPM Bidang Urusan Sosial sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Sosial PPKB PPPA. Hal ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Magelang.

Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan keempat untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Magelang lima tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, fokus pembangunan tahun 2023 adalah “Penguatan Kesejahteraan Melalui Penguatan Kualitas SDM, Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan Ekonomi yang Berdaya Saing”, dengan arah kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan;
- b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- c. meningkatkan pemberdayaan sosial;
- d. mengembangkan sistem dan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
- e. meningkatkan pengembangan produk yang berdaya saing;
- f. meningkatkan akses informasi pasar kerja dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif;
- g. meningkatkan atraksi, amenities dan aksesibilitas destinasi pariwisata;
- h. meningkatkan penataan bangunan gedung dan lingkungan;
- i. meningkatkan kualitas infrastruktur jalan;
- j. meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Permasalahan penerapan dan pencapaian SPM yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 meliputi:



1. Bidang Urusan Pendidikan
 - a. Belum optimalnya partisipasi pendidikan, yang ditandai dengan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang SD dan SMP lebih rendah dari APM Provinsi Jawa Tengah dan nasional serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang belum mencapai 100%.
 - b. Belum optimalnya mutu pendidikan, salah satunya dapat dilihat dari guru berkualifikasi S1/DIV.
2. Bidang Urusan Kesehatan
 - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, kualitas lembaga pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat serta kualitas pelayanan rumah sakit. Hal ini bisa dilihat dari masih ditemukannya kasus kematian ibu, neonatal, bayi dan balita; mutu FKT/FKTL/Laboratorium yang perlu ditingkatkan;
 - b. masih ditemukannya kasus penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular;
 - c. belum terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat;
 - d. belum terpenuhinya sumber daya kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
 - a. Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur. Di samping kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dibangun, konsep pengembangan wilayah yang belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum maupun infrastruktur perhubungan; menjadi penyebab belum optimalnya cakupan dan layanan infrastruktur;
 - b. Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang disebabkan oleh permasalahan salah satunya karena belum optimalnya layanan air minum dan sanitasi air limbah domestik yang disebabkan target Universal Access 100 0 100 belum dapat diwujudkan.



4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat adalah belum optimalnya layanan hunian yang layak dan berkualitas. Layak dan berkualitasnya sebuah hunian diukur mulai dari kondisi lingkungan yang paling kecil, yaitu dari rumah/bangunan tempat tinggal, perumahan, permukiman, lingkungan hunian sampai dengan kawasan permukiman.

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pokok yang harus ditangani dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah belum optimalnya:

- a. Penegakan hukum;
- b. Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana; dan
- c. Wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Belum optimalnya pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan komprehensif dan multi dimensi, memerlukan peran berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat,
- c. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.

6. Bidang Urusan Sosial

Permasalahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini bisa dilihat dari cakupan penanganan PMKS yang masih rendah.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



LPPD KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*). Capaian kinerja makro di Kabupaten Magelang tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Magelang Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan/Unit	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pembangunan Manusia		70,85	71,56	1,002
2.	Angka Kemiskinan	%	11,09	10,96	-1,172
3.	Angka Pengangguran	%	4,97	4,42	-11,066
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,46	5,04	-7,692
5.	Pendapatan per Kapita	Juta rupiah	28,53	30,57	7,15
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)		0,362	0,358	-1,105

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2024

Berbagai upaya dan program telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Upaya-upaya itu telah memperlihatkan hasil menggembirakan di tengah masyarakat. Hasilnya dilihat dari sejumlah indikator-indikator makro. Di antaranya kenaikan IPM Kabupaten Magelang naik dari angka 71,56 di tahun 2023 dari angka 70,85 di tahun 2022. Selain itu angka kemiskinan turun dari 10,96 persen di tahun 2023 dari angka 11,09 persen di tahun 2022. Indikator lain yaitu angka pengangguran turun dari 4,97 persen pada tahun 2022 menjadi 4,42 persen tahun 2023.



2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*) merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 (delapan) Urusan Pilihan.

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	677	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	12.005	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	26.765	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	2.151	
		Jumlah pendidik pada PAUD	2.378	
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	151	
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	1.261	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	733	
		Jumlah peserta didik jenjang Sekolah Dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	76.415	
		Jumlah peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	38.440	
		Jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	76.415	
		Jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	38.440	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Dasar	5.505	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama	4.690	
		Jumlah pendidik pada jenjang Sekolah Dasar	5.765	
		Jumlah pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama	2.467	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang	1.788	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Sekolah Dasar		
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama	1.206	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar	736	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama	515	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.531	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.347	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	596	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	121	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	664	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	443	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	19	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3.480	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3.480	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	193	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	193	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	193	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	596	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	21	
2.	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	6	Dinas Kesehatan
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	129.813	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.401	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	44.323	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1.401	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	92.311	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1.400	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	641.775	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	15.722	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	83.379	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	23.969	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	574.207	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.602	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	30.316	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.841	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	363	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	145	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	59.265	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	145	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.521	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	92	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	92.235	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.318	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36.880	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	188	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	62	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	67,63	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	60,32	
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Tidak	
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Tidak	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	401.987	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	7.392	
Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	409.379			
Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	409.379	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	89,87	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	89,87	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	1,65	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	91,52	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	91,52	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	100	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	169	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Tidak	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Tidak	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	127	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	6	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	10.193	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	10.193	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1020.66	
		Panjang jalan yang dibangun	0,4	
		Panjang jembatan yang dibangun	0	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	30,95	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	35,5	
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	2,75	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	
		Panjang jalan yang dipelihara	179,17	
		Panjang jembatan yang dipelihara	235	
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	125	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	30	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	40	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	40	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri	125	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	125	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	125	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	37	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	37	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Jumlah rumah yang terkena bencana alam	442			
Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	463			
Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0			
Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	35	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	43	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0,0613	
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	111,34	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1.364	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	7,82	
		Jumlah rumah di kab/kota	363.326	
		Jumlah unit PK RTLH	1.364	
		Jumlah rumah tidak layak huni	17.631	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	
		Rasio rumah dan KK	121,54	
		Jumlah rumah pembangunan baru	228	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	153	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	14.385	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	14.385	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	14.385	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	14.385	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	14.385	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	23	
Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0			
5.	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	310	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	20	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	12	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	3	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	964	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	34,82	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,22	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	34,72	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0,01	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	2.097	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	8	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	56	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	763	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	246	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	3.480	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	3	
6.	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1.324	Dinas Sosial PPKB PPPA
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1.058	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1.058	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1.344	
		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	87	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	196	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	6	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	28	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	419	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	67	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	5	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	17	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	129	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	105	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	85	
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	456	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	72	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	20	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	75	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	142	
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	173	
6.	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	92,31	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	4,06	
		Persentase LPK yang terakreditasi	9,52	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	
		Jumlah penganggur yang dilatih	200	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	99,06	
		Persentase penyerapan lulusan	40,31	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	100	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	100	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	561	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	
		Data tingkat produktivitas total	0	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	41,22	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	45,83	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	48	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	47,54	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,49	
		Jumlah mogok kerja	1	
		Jumlah penutupan perusahaan	0	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	
		Jumlah perselisihan PHK	6	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	223	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	6	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	45	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	2,69	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1.471	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	2.121	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	39	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	0	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	40	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	561	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi keputungan	0	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	35,65	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	25,81	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	7	Dinas Sosial PPKB PPPA
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	10	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	4	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	29	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	30	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	29	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	4	
Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100			
9.	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Dinas Pertanian dan Pangan
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	10.000	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	31	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	
		Tertanganinya kerawanan pangan	4	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	4	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	103	
10.	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	DPUPR
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	0	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	
		Dokumen Izin membuka tanah	0	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	
11.	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	54,07	Dinas Lingkungan Hidup
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,55	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	42,01	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	123.798,87	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	78	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	15	
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penerbitan akta perceraian	100	
		Penerbitan akta kematian	100	
		Penyajian data kependudukan	3	
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	6	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	24	
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	Dinas Sosial PPKB PPPA
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	29,16	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	24,4	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	80,69	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	175.899	
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	95,08	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	36,7	
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	372	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	25,08	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	23,81	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	1,2	
15.	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	52,12	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	51,54	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	123,91	
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	91,49	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	16	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	34,04	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	11,36	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	18,75	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	91,49	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	91,49	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	70,21	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i>	2	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	98,11	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	
17.	Koperasi dan UKM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan DPMPSTP
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	18,908	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	50,829	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19,118	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,158	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,063	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	33,613	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,261	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,992	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	46,008	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,622	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	67,816	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,025	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,091	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,508	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0,77	
18.	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DPMPSTP
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	15	
		Kegiatan pameran penanaman modal	0	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	796	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	44.496	
		Laporan realisasi penanaman modal	4.891.094.889.693	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	1.294	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	90	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	100	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	35	DISPARPORA
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	60	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	86	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	17	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	5	
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	DISKOMINFO
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	5	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	12	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	5	
		Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	12	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100	
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	DISKOMINFO
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	6,25	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	56,25	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	1.030	DISDIKBUD
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	0	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	235	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	90	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	55	
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	1	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	
		Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	1	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	90	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,6	DISPUSPA
		Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	4,87	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,03	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6,84	
		Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	282	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	2	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	2	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	957	
24	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	58,47	DISPUSPA
		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	101,66	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	170,75	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,5	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	30.165	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	867	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	1.109	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	3.505	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	1	
25	Kelautan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	170	DISPETERIKAN
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	133	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	575	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	1.842.367.000	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	11	DISPARPORA
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	11	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	252.961	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	10	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	7	
27	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	122	DISTAN PANGAN
		Prasarana pertanian yang digunakan	100	
		Penerbitan izin usaha pertanian	3	
		Persentase prasarana yang digunakan	100	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	
28	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	DISTAN PANGAN
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	
29	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	DPUPR
30	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0	DPMPTSP DISDAGKOP UKM DISTAN PANGAN
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100	
		Persentase penerbitan TDG	100	
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk:		
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0,0155	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	68.92	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	44,407	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	42,363	
31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	DISPERINNAKER
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	64,71	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	0	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	DISPERINNAKER
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	

Sumber: elppd.kemendagri.go.id, Data per 20 Maret 2023

Informasi lebih lanjut terkait capaian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Lampiran 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*output*) dalam LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 ini.

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 (delapan) Urusan Pilihan.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	91.97 %	DISDIKBUD	
				DISDUKCAPIL	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91.02 %	DISDIKBUD	
				DISDUKCAPIL	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	85.59%	DISDIKBUD	
				DISDUKCAPIL	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100.00 %	DISDIKBUD	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0.58	DINKES	
				DISDUKCAPIL	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	100 %	DINKES	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	DINKES	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,99%	DINKES	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,94%	DINKES	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	97.42%	DINKES	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95.17%	DINKES			
		DISDUKCAPIL			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68.01%	DINKES DISDUKCAPIL	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91.93%	DINKES DISDUKCAPIL	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34.27%	DINKES	
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	74.07%	DINKES	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	DINKES	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	100%	DPUPR	Tidak terdapat kawasan tsb di Kabupaten Magelang
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan kabupaten	100%	DPUPR	Tidak terdapat kawasan tsb di kabupaten Magelang
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	6.71%	DPUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	92.49%	DPUPR	
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91.52%	DPUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten	100%	DPUPR	
		Tingkat kemantapan jalan	89.33%	DPUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	DPUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100%	DPRKP	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	148.28%	DPRKP	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	2.89%	DPRKP	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4.85%	DPRKP	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1.59%	DPRKP	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP dan PK	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	SATPOL PP dan PK	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	469.39 %	SATPOL PP dan PK	
		Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	12.02 menit	SATPOL PP dan PK	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	DINSOS PPKB PPPA	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100%	DINSOS PPKB PPPA	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	DISPERINNAKER	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,03%	DISPERINNAKER	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3.15%	DISPERINNAKER	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	11.19%	DISPERINNAKER	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	69.35%	DISPERINNAKER	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	59.26%	DINSOS PPKB PPPA BPPKAD	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100%	DINSOS PPKB PPPA	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9.38	DINSOS PPKB PPPA DISDUKCAPIL	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	245	DISTAN PANGAN	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	DPMPTSP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	DPUPR	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	DPUPR	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	DPUPR	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0%	DPUPR	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%	BAGIAN PEMERINTAHAN	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	65.8	DLH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	51.21%	DLH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	66.67%	DLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	97,80%	DISDUKCAPIL	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	76.14%	DISDUKCAPIL	
		Kepemilikan Akte Kelahiran	98%	DISDUKCAPIL	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	27.66%	DISDUKCAPIL BAGIAN ORGANISASI	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	DISPERMADES	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	90.82%	DISPERMADES	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,11	DNSOS PPKB PPPA	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	71.85%	DINSOS PPKB PPPA	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	11.71%	DINSOS PPKB PPPA	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten	0.63%	DISHUB	
		Kinerja lalu lintas kabupaten	0.24	DISHUB	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DISKOMINFO	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	DISKOMINFO	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	69.62%	DISKOMINFO DISDUKCAPIL	
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	46.64%	DISDAGKOP UKM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	67.82%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	31.95%	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,01%	DISPARPORA DISDUKCAPIL	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,02%	DISPARPORA DISDUKCAPIL	
		Peningkatan prestasi olahraga	52	DISPARPORA	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	DISKOMINFO BAGIAN ORGANISASI	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	DISKOMINFO BAGIAN ORGANISASI	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	78.14%	DISKOMINFO	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	DISDIKBUD	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55.86%	DISPUSPA	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	88.01%	DISPUSPA	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	82.99%	DISPUSPA	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	83.33%	DISPUSPA	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: <i>one data</i> KKP)	101.54%	DISPETERIKAN	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	238.16%	DISPARPORA	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	17.30%	DISPARPORA	
		Tingkat hunian akomodasi	35.85%	DISPARPORA	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,47%	BAPPEDA dan LITBANGDA	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1.25%	BPPKAD	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	771.95	DISTAN PANGAN	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	114.98%	DISPETERIKAN	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
28	Kehutanan		0	DPUPR	Kewenangan provinsi
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	0	DPUPR	Kewenangan provinsi
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	DPMPTSP	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	68.92%	DISTAN PANGAN	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	44.40%	DISDAGKOP UKM	
31.	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	0%	DISPERINNAKER	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	100%	DISPERINNAKER	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0.126%	DISPERINNAKER	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	DISPERINNAKER	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	100%	DISPERINNAKER	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	70%	DISPERINNAKER	
32	Transmigrasi		100%	DISPERINNAKER	

Sumber: elppd.kemendagri.go.id, Data per 20 Maret 2024

Informasi lebih lanjut terkait capaian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Lampiran 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) dalam LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 ini.



2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten meliputi 5 (lima) Urusan Pemerintahan.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	8.34%	BPPKAD	
		Rasio PAD	18.09%	BPPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	INSPEKTORAT	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	INSPEKTORAT	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	57.05%	BPPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	WTP	INSPEKTORAT	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	78.82%	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	46.67%	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	95,43%	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	57.96%	BKPPD	
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	29.78%	BKPPD	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	57.47%	BKPPD	
4	Manajemen Keuangan	<i>Budget execution:</i> Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1.23%	BKPPD	
		<i>Revenue mobilization:</i> Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	7.54%	BKPPD	
		<i>Assets management</i>	4%	BKPPD	
		<i>Cash Management:</i> Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	11.16%	BKPPD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	96.31%	BKPPD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	100%	BKPPD	

Sumber: elppd.kemendagri.go.id, Data per 20 Maret 2024

Informasi lebih lanjut terkait capaian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Lampiran 2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 ini.



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Pada pembahasan ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan dibandingkan dengan realisasi kinerja. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator, dan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis yaitu: indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

- **Indikator Positif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- **Indikator Negatif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang (*) pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 2.5. berikut ini:



Tabel 2.5.

Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode Warna

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	2	3	4
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2023 dilakukan analisis dengan dilakukan perbandingan antara capaian kinerja dan target kinerja tahun 2023 dan target kinerja hingga akhir periode RPJMD pada tahun 2024, hasil analisis sebagai berikut:



Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Pada Indikator Tujuan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket	
				2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia													
1	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka (0-100)	69,34	69,98	70,12	70,96	71,03	71,56	100,75	71,42	100,20	
2	2	Inflasi **)	persen	2,5-4,0	1,90	2,18	6,49	2,0-4,0	6,49	37,75	2,0-4,0	37,75	*)
	3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.262,68	9.301	9.440	10.011	9.734,22	10.493	107,79	9.883,06	106,17	
	4	Angka Kemiskinan **)	persen	10,08-11,08	11,27	11,91	11,09	10,67-9,92	10,96	97,38	10,07-9,32	91,16	
3	5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka (0-100)	92,91	91,81	91,89	92,91	92,70	92,21	99,36	92,99	99,16	*)
B MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup													
1	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5-5,5	-1,67	3,48	5,46	3,5-4,5	5,04	144,00	3,6-4,6	140,00	
	7	PDRB Per Kapita	juta rupiah	25,20	25,01	26,18	28,53	28,68	25,53	89,02	29,52	86,48	*)
	8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	66,86	66,6	67,57	71,93	76,58	71,93	93,93	82,22	87,48	*)
C MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah													
1	9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	62,76	61,07	61,48 (B)	62,65 (B)	70,68 (Baik)	67,42	95,39	72,39 (BB)	93,13	
Rata-rata Capaian Kinerja :									96,15		93,50		

Sumber : BPS dan Perangkat Daerah terkait data diolah, 2024

Keterangan : *) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2022) karena data belum keluar/tidak ada.

***) Indikator Negatif



Berdasarkan tabel di atas dalam capaian rata-rata kinerja tujuan pada indikator makro Kepala Daerah tahun 2023 telah tercapai **96,15%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja tujuan telah tercapai **93,50%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator tujuan strategis telah tercapai, baik pada target tahun 2023 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2024. Pada capaian kinerja tujuan tahun 2023 masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang dengan kriteria sangat rendah bahkan minus yaitu: Laju inflasi yang memiliki capaian kinerja rendah dengan capaian terhadap target kinerja 37,75%. Sedangkan dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) indikator tujuan yang tidak mencapai target dengan kriteria sangat rendah yaitu: Laju inflasi (37,75%). Capaian kinerja di atas masih terdapat 5 (lima) capaian kinerja yang masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022, hal ini dikarenakan data capaian kinerja sampai dengan periode pelaporan belum ada. Pada Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan capaiannya di atas 100% baik terhadap target tahun 2023 maupun terhadap target akhir RPJMD.

Secara umum capaian kinerja tujuan Kepala Daerah Kabupaten Magelang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023. Dari 5 Tujuan dengan 9 indikator, 8 indikator telah mencapai target. Demikian juga dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja masih jauh dari target yang ditetapkan dengan capaian 91,35% dengan kriteria **Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2022 capaian kinerja pada indikator makro Kepala Daerah pada tahun 2023 cenderung mengalami kenaikan dengan rincian: dari 2020 (85,02%) mengalami kenaikan sebesar 6,19%, dari tahun 2021 (83,20%) mengalami kenaikan sebesar 8,01% dan dari tahun 2022 (83,20%) mengalami kenaikan sebesar 11,1%. Walaupun kinerja pada tahun 2021 mengalami penurunan capaian kinerja tetapi pada tahun 2022 terkoreksi dan mengalami kenaikan yang signifikan.



Faktor pendorong tercapainya kinerja makro secara umum dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 telah berangsur-angsur membaik dan perekonomian masyarakat sudah mulai pulih, dimana kondisi ini memulihkan seluruh aspek pembangunan, meningkatnya ekonomi dan daya beli masyarakat lebih khususnya penurunan angka kemiskinan masyarakat. Faktor penghambat yang terjadi adalah masih tingginya laju inflasi, dimana inflasi yang tinggi dan tidak terkendali bisa menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus tergerus, karena harga barang yang semakin mahal, sehingga standar hidup mereka juga akan semakin turun, situasi ini akan membuat masyarakat yang sudah tergolong miskin, menjadi makin miskin.

Capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2023 pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut;



Tabel 2.7
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 pada Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket	
				2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia												
1	1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,72	7,78	7,79	7,81	8,11	7,82	96,42	8,22	95,13	
	2	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,67	12,54	12,55	12,58	12,63	12,61	99,84	12,66	99,61	
	3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	93,89	93,1	92,67	92,35	95,12	92,03	96,75	95,56	96,31	
2	4	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,72	73,88	74,03	74,10	74,44	100,46	74,22	100,30	
3	5	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,63	0,62	0,57	0,58	0,57	98,28	0,58	98,28	*)
4	6	Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	79,51	81,27	79,92	79,44	81,57	79,44	97,39	82,62	96,15	*)
5	7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) **)	persen	2,4-3,0	4,27	5,03	4,97	2,4-3,0	4,42	52,67	2,25-2,65	3,56	
6	8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka (0-100)	69,03	69,65	69,64	69,66	70,23	92,21	131,30	70,53	130,74	*)
	9	Kategori Kabupaten Layak Anak	-	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	100,00	Nindya	100,00	*)
B	MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup												
8	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka (1-100)	72,10	71,30	71,41	70,48	71,36	65,80	92,21	71,38	92,18	
9	11	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	61,63	61,9	63,72	73,38	78,16	73,38	93,88	93,05	78,86	*)
10	12	Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	4.529,30	4.306,14	4.667,15	4.967,87	5.887,55	5.381,88	91,41	6.227,11	86,43	
	13	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	6.997,70	6.914,81	7.086,93	7.486,55	8.449,56	7.913,20	93,65	8.875,03	89,16	
	14	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	7.157,40	7.266,33	7.794,55	8.628,27	9.122,20	9.632,91	105,60	9.613,39	100,20	*)
	15	Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.416,24	1.274,04	1.366,00	1.675,34	1.844,05	1.675,34	90,85	1.951,00	85,87	
	16	Pertumbuhan Investasi	persen	5,00	13,49	12,56	32,21	10	32,21	322,10	10,00	322,10	*)
	17	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	81,38	104,93	84,46	82,78	86,33	82,78	95,89	87,76	94,33	*)
	18	Indeks Desa Membangun	Angka (0-1)	0,67	0,68	0,635	0,71	0,71	0,70	98,59	0,72	97,22	*)



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket
					2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Amanah												
11	19	Nilai AKIP	-	60,10(B)	60,33 (B)	61,13 (B)	62,25 (B)	69,00 (Baik)	63,04	91,36	71,00 (BB)	88,79	
12	20	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Angka (0-5)	2,19-2,30	2,94	2,67	3,13	3,21-3,40	3,13	97,51	3,41-3,6	91,79	*)
13	21	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00	
14	22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	82,74	83,69 (Baik)	84,22 (Baik)	84,36 (Baik)	85,25 (Baik)	84,78	99,45	86,00	98,58	
15	23	Indeks Sistem Merit	-	0,49	0,60	0,64	0,64	0,70	0,71	101,43	0,76	93,42	
Rata-rata Capaian Kinerja :										106,39		101,70	

Sumber : BPS dan Perangkat Daerah terkait data diolah, 2024

Keterangan : *) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2023) karena data belum keluar/tidak ada.

***) Indikator Negatif



Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran pada indikator mikro Kepala Daerah tahun 2022 telah mencapai target, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **106,39%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2020 sebesar 105,48% mengalami penurunan sebesar 0,75%, sedangkan dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 sebesar 102,65% mengalami kenaikan sebesar 3,56%, sedangkan dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 sebesar 97,24% mengalami kenaikan sebesar 9%. Capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan target akhir RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran telah tercapai **101,70%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 87,74%, maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 13,95%. Hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui pada target tahun 2023 dan pada target akhir periode RPJMD pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut belum bisa menunjukkan kinerja yang bagus karena masih terdapat capaian indikator yang jauh melebihi 100% pada indikator kinerja pertumbuhan investasi, hal ini dikarenakan penentuan target kinerja yang terlalu rendah pada awal penyusunan RPJMD.

Rekapitulasi distribusi kriteria penilaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8.
Capaian Kriteria Penilaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 pada Indikator Sasaran

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Indikator dan Persentase capaian terhadap target	
			2023	2024
1	2	3	4	5
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	18 (78,26)	16 (69,57)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	4 (17,39)	6 (26,09)
3	66% ≤ 75%	Sedang	0 (0,00)	0 (0,00)
4	51% ≤ 65%	Rendah	1 (4,35)	0 (0,00)
5	≤ 50%	Sangat Rendah	0 (0,00)	1 (4,35)
Jumlah Indikator:			23	23

Sumber: Perangkat Daerah terkait data diolah, tahun 2024.



Berdasarkan kriteria penilaian pada tabel di atas realisasi kinerja pada tahun 2023 kriteria Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$) sebanyak 18 (78,26%) indikator sasaran jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebanyak 18 (78,26%), maka pada tahun 2023 mengalami tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sedangkan terhadap target indikator pada tahun 2024 realisasi kinerja pada tahun 2022 kriteria Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$) sebanyak 16 (69,57) indikator sasaran jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebanyak 15 (65,22%) maka pada tahun 2023 mengalami peningkatan.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis diperlukan anggaran untuk menunjang pencapaian target kinerja, jumlah anggaran dan realisasi per program dalam menunjang tercapainya target kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2023 secara detail pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9.
Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023

NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.296.174.178.423	1.198.582.622.998	92,47
b	Program Pengelolaan Pendidikan	219.594.224.102	213.789.500.632	97,36
c	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.312.775.840	24.031.853.196	91,33
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	129.201.997.634	116.685.100.432	90,31
b	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.074.482.710	2.818.001.838	91,66
c	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	344.016.000	312.944.967	90,97
d	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.925.873.503	1.752.476.040	91,00



NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
a	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.613.033.233	6.510.382.625	98,45
b	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.396.892.250	12.348.567.151	99,61
c	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.305.760.500	3.299.351.884	99,81
d	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.195.758.000	7.190.659.394	99,93
e	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	995.437.908	953.795.226	95,82
f	Program Pengembangan Permukiman	83.675.000	67.480.415	80,65
g	Program Penataan Bangunan Gedung	17.537.941.618	17.464.904.140	99,58
h	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3.120.817.091	2.442.669.212	78,27
i	Program Penyelenggaraan Jalan	73.757.342.900	72.716.925.842	98,59
j	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	186.589.595	186.114.250	99,75
k	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	537.389.680	394.261.038	73,37
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
a	Program Pengembangan Perumahan	406.391.434	316.987.914	78,00
b	Program Kawasan Permukiman	506.567.500	496.846.425	98,08
c	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	327.900.000	319.425.063	97,42
d	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100.000.000	63.254.382	63,25
e	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.600.000	8.625.500	63,42
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
a	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.175.356.000	4.794.822.138	92,65
b	Program Penanggulangan Bencana	2.410.224.250	2.367.960.333	98,25
c	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	11.422.470.500	11.168.758.095	97,78
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
a	Program Pemberdayaan Sosial	313.901.500	309.780.820	98,69
b	Program Rehabilitasi Sosial	3.581.212.280	2.777.515.580	77,56
c	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.295.141.157	9.150.035.862	98,44
d	Program Penanganan Bencana	380.000.000	361.856.909	95,23



NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
a	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.543.790.190	2.254.152.198	88,61
b	Program Penempatan Tenaga Kerja	844.815.000	816.303.051	96,63
c	Program Hubungan Industrial	548.000.000	373.978.129	68,24
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
a	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	280.000.000	273.188.500	97,57
b	Program Perlindungan Perempuan	250.000.000	216.827.398	86,73
c	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	252.508.960	248.584.802	98,45
d	Program Perlindungan Khusus Anak	253.750.000	210.812.305	83,08
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
a	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	907.849.910	863.658.802	95,13
b	Program Penanganan Kerawanan Pangan	72.600.000	51.261.464	70,61
c	Program Pengawasan Keamanan Pangan	119.975.460	112.424.150	93,71
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
a	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	148.215.835	61.238.803	41,32
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
a	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	504.000.000	497.579.220	98,73
b	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.047.724.000	1.033.006.400	98,60
c	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.545.000.000	2.468.052.876	96,98
d	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	380.000.000	371.467.523	97,75
e	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	80.000.000	79.640.610	99,55
f	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	557.891.075	554.433.421	99,38
g	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	519.322.500	517.086.664	99,57
h	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	88.677.500	88.459.130	99,75
i	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	40.000.000	39.801.370	99,50
j	Program Pengelolaan Persampahan	12.206.094.000	11.566.115.332	94,76



NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
a	Program Pendaftaran Penduduk	729.993.320	724.390.116	99,23
b	Program Pencatatan Sipil	596.000.000	589.918.492	98,98
c	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	764.514.543	763.813.230	99,91
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
a	Program Penataan Desa	190.222.850	184.261.885	96,87
b	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	99.994.830	80.747.915	80,75
c	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.658.303.764	6.368.293.192	95,64
d	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5.708.351.150	5.552.439.392	97,27
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
a	Program Pengendalian Penduduk	640.050.000	639.894.728	99,98
b	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.015.959.000	9.989.721.126	90,68
c	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.844.700.000	6.833.758.790	99,84
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
a	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	30.823.992.571	30.662.298.136	99,48
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
a	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.896.648.140	1.826.769.451	96,32
b	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.765.175.660	6.750.739.110	99,79
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
a	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	520.000.000	516.377.260	99,30
b	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	199.200.000	195.547.100	98,17
c	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	130.700.000	127.892.000	97,85
d	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.258.570.000	1.238.715.965	98,42



NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
a	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	60.000.000	57.351.230	95,59
b	Program Promosi Penanaman Modal	110.000.000	109.537.520	99,58
c	Program Pelayanan Penanaman Modal	263.702.000	260.958.247	98,96
d	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	611.914.000	589.848.045	96,39
e	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	35.000.000	34.967.014	99,91
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
a	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.940.906.050	2.711.842.974	92,21
b	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	37.483.090.266	36.995.327.320	98,70
c	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	220.000.000	219.965.060	99,98
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
a	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.043.000	170.849.279	97,60
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
a	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	966.592.770	951.723.153	98,46
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
a	Program Pengembangan Kebudayaan	395.000.000	360.215.000	91,19
b	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	3.066.962.500	2.913.523.729	95,00
c	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	250.000.000	249.521.206	99,81
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
a	Program Pembinaan Perpustakaan	642.487.045	632.785.606	98,49
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
a	Program Pengelolaan Arsip	191.555.415	191.162.665	99,79
C	Urusan Pemerintahan Pilihan			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
a	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.082.915.617	998.811.405	92,23
b	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	34.650.000	31.899.319	92,06
c	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	277.981.500	275.747.369	99,20
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			



NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
a	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	17.681.672.629	16.048.957.875	90,77
b	Program Pemasaran Pariwisata	1.613.000.000	1.612.022.051	99,94
c	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	87.565.000	87.517.950	99,95
d	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.212.625.287	1.211.968.243	99,95
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
a	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.471.498.224	5.216.470.694	95,34
b	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	18.815.452.000	17.838.775.134	94,81
c	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	727.942.125	681.112.662	93,57
d	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	133.000.000	121.937.880	91,68
e	Program Perizinan Usaha Pertanian	41.000.000	40.718.252	99,31
f	Program Penyuluhan Pertanian	856.806.345	850.246.088	99,23
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
a	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	5.000.000	4.833.720	96,67
b	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7.541.641.925	7.049.402.363	93,47
c	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.158.000.000	1.155.604.902	99,79
d	Program Pengembangan Ekspor	1.329.430.000	1.318.733.677	99,20
e	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	636.300.000	631.966.315	99,32
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
a	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.134.089.950	3.212.282.949	77,70
b	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	35.000.000	26.246.109	74,99
6	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
a	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	160.000.000	108.832.313	68,02
b	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	24.738.335.204	24.520.432.525	99,12
c	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.162.566.945	1.123.004.259	96,60
d	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	20.360.166.750	15.449.446.172	75,88
e	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.744.643.415	1.512.443.534	86,69



NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.690.254.266	1.619.392.958	95,81
a	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	681.794.194.118	660.282.627.629	96,84
b	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.592.388.320	3.446.236.842	95,93
c	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.691.798.957	9.962.974.831	93,18
d	Program Kepegawaian Daerah	5.404.805.283	5.255.895.230	97,24
e	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	913.437.286	888.432.275	97,26
f	Program Penyelenggaraan Pengawasan	680.985.000	454.976.222	66,81
g	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.636.262.100	2.310.828.156	87,66
h	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	651.945.573	625.807.100	95,99
i	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.373.676.904	6.316.473.904	99,10
j	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.642.310.250	1.621.173.129	98,71
k	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	827.361.040	810.282.223	97,94
l	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.426.731.000	1.299.533.575	91,08
m	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	33.884.677.130	33.620.807.195	99,22
n	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	400.000.000	376.736.935	94,18
o	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	85.900.000	80.588.786	93,82
p	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.586.900.000	1.195.279.345	75,32
Jumlah:		2.848.060.704.055	2.687.174.168.480	94,35

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, data realisasi keuangan diolah kondisi 15 Februari 2024, *unaudited*, 2024

Keterangan ; *) Tidak termasuk kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2023 mencapai rata-rata **94,35%** dengan kategori **Sangat Tinggi**, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,78% jika dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi 91,57%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,35% jika dibandingkan tahun 2021 dengan realisasi 83,00%. jika dibandingkan dengan serapan tahun 2020 dengan realisasi sebesar 73,66% maka mengalami kenaikan sebesar 20,69%. Berdasarkan data tersebut realisasi anggaran Kabupaten Magelang cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan semakin membaik. Secara detail rekapitulasi realisasi anggaran per program Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Program
1	2	3	4
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	99 (79,84%)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	17 (13,71%)
3	66% ≤ 75%	Sedang	5 (4,03%)
4	51% ≤ 65%	Rendah	2 (1,61%)
5	≤ 50%	Sangat Rendah	1 (0,81%)
Jumlah Program:			120

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024, data diolah

Berdasarkan tabel di atas Realisasi Anggaran Per Program pada tahun 2023 terbanyak pada kriteria sangat tinggi (91% ≤ 100%) yaitu 99 (79,84%) program, dan yang terendah pada kriteria Sangat Rendah (≤ 50%) sebanyak 1 (0,81%) program. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tingkat capaian terbanyak adalah kriteria Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) sebanyak 84 (70,00%) program, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 9,84%, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2021 tingkat capaian terbanyak adalah kriteria Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) sebanyak 78 (71,56%) program, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,28%, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi program tertinggi pada kriteria Sangat Tinggi sebesar 71 (73,96%) juga mengalami kenaikan sebesar 5,88%.



Capaian program pada kategori Sangat Rendah ($\leq 50\%$) mengalami penurunan sebesar 0,81% jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 1 (0,81%) program, dibandingkan capaian program pada kategori Sangat Rendah ($\leq 50\%$) mengalami peningkatan sebesar 4,69% jika dibandingkan tahun 2021 sebanyak 6 (5,50%) program, jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2020 juga mengalami peningkatan dengan capaian kategori Sangat Rendah sebesar 2 (2,08%) program mengalami kenaikan sebanyak 1,27%, hal ini menunjukkan kinerja serapan anggaran pada tahun 2023 secara umum mengalami kenaikan dan perbaikan, tetapi secara kriteria mengalami peningkatan. Jumlah program yang dikelola pada tahun 2023 sebanyak 124 program, pada tahun 2022 sebanyak 120 program sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 109 program dan pada tahun 2020 sebanyak 71 program, sehingga dibandingkan tahun 2022 bertambah sebesar 3,33%, dibandingkan tahun 2021 bertambah sebesar 11% sedangkan dibanding tahun 2020 bertambah 13,76%, hal ini akibat penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dimana program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada peraturan tersebut.

b. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Magelang Tahun 2023, dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2023 terhadap indikator makro berjumlah 5 tujuan strategis dengan 9 indikator kinerja. Selain indikator makro terdapat indikator mikro yang diukur sebagai kinerja Kepala Daerah, jumlah sasaran strategis sebanyak 15 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja. Perjanjian Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bupati Magelang Tahun 2023 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Magelang. LPPD pada pembahasan ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun IV (empat) dari RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024.



Pada evaluasi pencapaian kinerja tahun 2023 masih terdapat penggunaan data sementara atau tahun lalu, hal ini dilakukan karena data tersebut sampai batas periode pelaporan belum lengkap dikeluarkan oleh Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik atau lembaga yang berwenang mengeluarkan data tersebut.

1) Evaluasi Tujuan Strategis

i) Tujuan Strategis: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pada tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia diukur dengan indikator kinerja tujuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil pencapaian indikator sebagai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2023

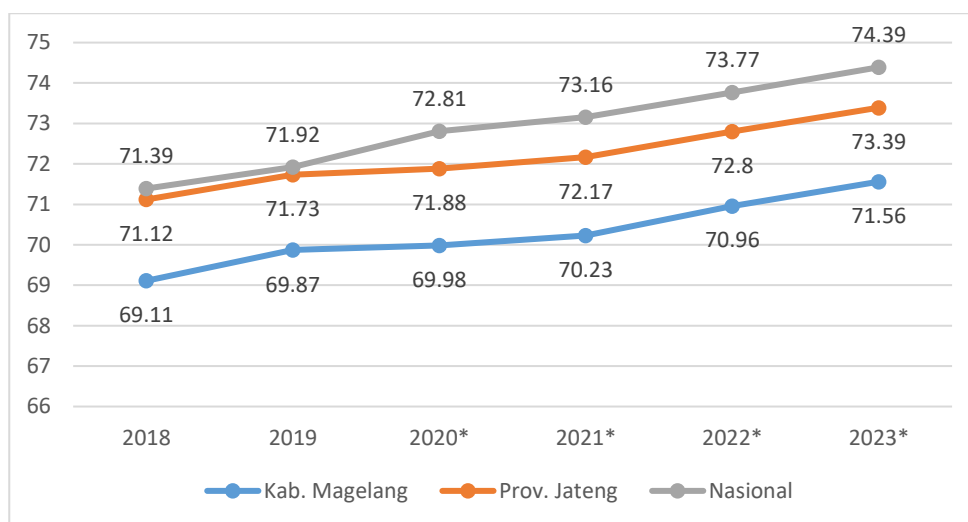
Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka (0-100)	69,34	69,98	70,12	70,96	71,03	71,56	100,75	71,42	100,20	
Rata-rata Capaian Kinerja :								100,75		100,20	

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia tahun 2023 sebesar 71,58 dengan pencapaian terhadap target sebesar 100,75% (sangat baik), dimana target yang ditetapkan dapat terlampaui, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD target kinerja telah mencapai 100,20% (sangat baik). Capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan cukup signifikan. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, capaian IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Pada tahun 2018, capaian IPM Kabupaten ini tercatat sebesar 69,11 dengan predikat Sedang, dan menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2023 menjadi 71,56 dengan predikat Tinggi, atau meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,56 persen per tahun. Pada tahun 2023, capaian IPM Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 73,39, yang apabila ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata, indikator ini bertumbuh sebesar 0,42 persen per tahun. Sementara itu, dalam waktu yang sama, capaian IPM Nasional tercatat sebesar 74,39 dimana indikator ini bertumbuh sebesar 0,62 persen per tahun.



*) data sementara

Sumber : Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2023

Keterangan : Realisasi indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005-2009 menggunakan perhitungan metode lama, sementara realisasi tahun 2010-2023 menggunakan perhitungan metode baru

Gambar 2.1.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2023



Selanjutnya, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2023 menempati posisi ke-24. Kota Salatiga dan Kota Semarang merupakan 2 (dua) wilayah yang tercatat memiliki capaian IPM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, yakni dengan capaian sebesar 84,99 dan 84,43. Sementara itu, 2 (dua) wilayah dengan capaian terendah di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pemasang, yakni dengan capaian sebesar 69,16 dan 68,08. Apabila dibandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten/Kota eks Karesidenan Kedu, pada tahun 2023 Kabupaten Magelang menempati posisi ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo yang masing-masing memiliki nilai IPM sebesar 81,17 dengan predikat sangat tinggi dan 74,35 dengan predikat tinggi.

Dimensi pengetahuan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2019, indikator harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 12,67 tahun, dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,03 persen per tahun, menjadi 12,61 tahun 2023. Dari dimensi pengetahuan tersebut, pada tahun 2023 anak-anak berusia tujuh tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,61 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, capaian indikator harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang ini tercatat berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, pada tahun 2019, indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 7,72 tahun dan meningkat menjadi 7,82 pada tahun 2023, atau meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,05 persen per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Magelang telah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas tujuh atau setara dengan kelas satu pada jenjang sekolah menengah pertama. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang tidak terpaut jauh dari besaran capaian Provinsi.



Pada rentang waktu tahun 2019 hingga 2023, komponen dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dalam rentang waktu tersebut, dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup menunjukkan besaran yang semakin meningkat, yang ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,19 persen per tahun. Pada tahun 2019, capaian indikator ini tercatat sebesar 73,52 tahun, dan meningkat menjadi 74,44 tahun di tahun 2023. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Magelang pada tahun 2023, memiliki harapan hidup selama 74,44 tahun. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, capaian indikator angka harapan hidup di Kabupaten Magelang ini tercatat berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebesar Rp421.739.853.150,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp400.425.204.910,00 (94,95%).

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5. Program Pembinaan Perpustakaan
6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

ii) Tujuan Strategis: Meningkatkan Paritas Daya Beli Masyarakat

Pada tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat diukur dalam 3 (tiga) indikator kinerja tujuan, yaitu: Inflasi, Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dan Angka Kemiskinan. Berikut capaian tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat:

Tabel 2.12.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis
Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Inflasi ^{**})	persen	2,5-4,0	1,9	2,18	6,49	2,0-4,0	6,49	37,75	2,0-4,0	37,75	*)
2 Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.262,68	9301	9440	10011	9734,22	10493	107,79	9.883,06	106,17	
3 Angka Kemiskinan ^{**})	persen	10,08-11,08	11,27	11,91	11,09	10,67-9,92	10,96	96,06	10,07-9,32	89,87	
Rata-rata Capaian Kinerja :								80,54		77,93	

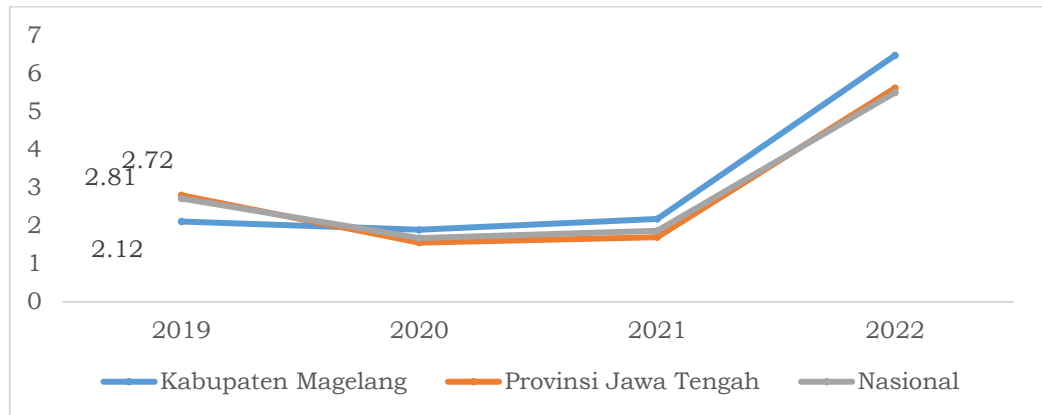
Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2024

Keterangan : *)Mengacu data tahun sebelumnya

***)Indikator negatif

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat pada tahun 2023 sebesar 80,54% (tinggi) dan dapat melalui target kinerja pada tahun tersebut, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 77,93% (tinggi). Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi dapat mengindikasikan ketidakseimbangan perekonomian di suatu wilayah. Inflasi dapat memberikan dampak buruk dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pendapatan. Semakin tingginya nilai inflasi, maka nilai mata uang akan semakin rendah dan semakin rendah pula daya beli masyarakat.

Berdasarkan Indikator Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Magelang menyatakan bahwa Kabupaten Magelang masuk ke dalam wilayah yang tidak terpilih menjadi sampel Survei Biaya Hidup (SBH), sehingga dalam penghitungan IHK di Kabupaten ini menggunakan pendekatan metode *sister city*. Pendekatan yang dimaksud tersebut adalah menggunakan diagram timbang Kota SBH yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama, memiliki letak geografis yang berdekatan, serta besaran PDRB dan jumlah penduduk yang bersesuaian. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan bahwa Kabupaten Magelang memiliki kemiripan pola konsumsi dengan Kabupaten Banyumas/Purwokerto.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang, Tahun 2023; BPS Provinsi Jawa Tengah; Inflasi Umum BPS Indonesia

Keterangan ; Pada tahun 2020-2022 BPS Kabupaten Magelang sudah tidak bisa menghitung indikator Inflasi, karena bukan kota/kab SBH, sehingga tingkat Inflasi Kabupaten Magelang menggunakan besaran tingkat Inflasi Kabupaten Banyumas/Purwokerto

Gambar 2.2.

Grafik Perbandingan Inflasi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2022

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2022, capaian tingkat inflasi baik di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama dan termasuk dalam kategori inflasi ringan (kurang dari 10 persen). Pada tahun 2019, tingkat inflasi di Kabupaten Magelang menunjukkan capaian yang lebih rendah yaitu sebesar 2,12 persen sedangkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang keduanya menunjukkan capaian sebesar 2,81 persen dan 2,72 persen.



Selanjutnya, tingkat inflasi di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 tingkat inflasi di Kabupaten Magelang diangka 1,9 persen. Pada tahun 2021, terdapat peningkatan inflasi sebesar 0,3 persen. Pada tahun 2022, tingkat inflasi pada ketiganya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan kisaran empat hingga lima persen. Tingkat inflasi di Kabupaten Magelang yang direpresentasikan oleh Kabupaten Banyumas/Purwokerto dengan besaran 6,49 persen, tercatat memiliki besaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang memiliki tingkat inflasi pada kisaran lima persen.

Pada tahun 2023, inflasi di Kabupaten Magelang menunjukkan angka 6,49 persen, dimana komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah beras, rokok, cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan. Apabila dilihat dengan angka inflasi gabungan 6 (enam) kota besar di Jawa Tengah, inflasi gabungan Jawa Tengah mencapai 2,89 persen dan disumbang oleh komoditas beras, cabai merah, rokok, cabai rawit, dan bawang putih. Sedangkan inflasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 2,61 persen dengan komoditas dengan andil terbesar adalah beras, cabai merah, rokok, emas perhiasan, dan cabai rawit.

Capaian tingkat inflasi pada tahun 2019 hingga 2021 dapat dikategorikan stabil dan terjaga, meskipun kembali meningkat di tahun 2022. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang para pemangku kepentingan di daerah juga dapat terus menjaga stabilitas harga, agar nilai inflasi di Kabupaten ini dapat tetap rendah dan stabil. Capaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil tersebut dapat memberikan dampak positif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, yakni memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan indikator pengeluaran per kapita di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, besaran pengeluaran per kapita di kabupaten ini tercatat sebesar 9.262,68 juta rupiah/orang/tahun dan meningkat menjadi 10,493 juta rupiah/orang/tahun di tahun 2023. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, capaian indikator pengeluaran per kapita di Kabupaten Magelang ini tercatat berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.



Tabel 2.13.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

No	Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,56	73,97	74,13	74,28	74,44
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,53	12,54	12,55	12,58	12,61
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,77	7,78	7,79	7,81	7,82
4	Pengeluaran Per Kapita	ribu rupiah/org/th	9.387	9.301	9.440	10.011	10.493
	IPM Kabupaten Magelang		69,87	69,98	70,23	70,96	71,56

Sumber: ,Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2024

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk melihat capaian indikator kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2019-2023 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14.
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang
Tahun 2019-2023

Indikator Kemiskinan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita Bulan	325.921	342.430	353.608	377.497	411.129
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	137,450	146,340	154,910	145,33	144,490
Persentase Penduduk Miskin	(%)	10,67	11,27	11,91	11,09	10,96
Indek keparahan kemiskinan (P2)	%	0,17	0,2	0,35	0,41	0,41
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	0,98	1,23	1,63	1,66	1,73

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

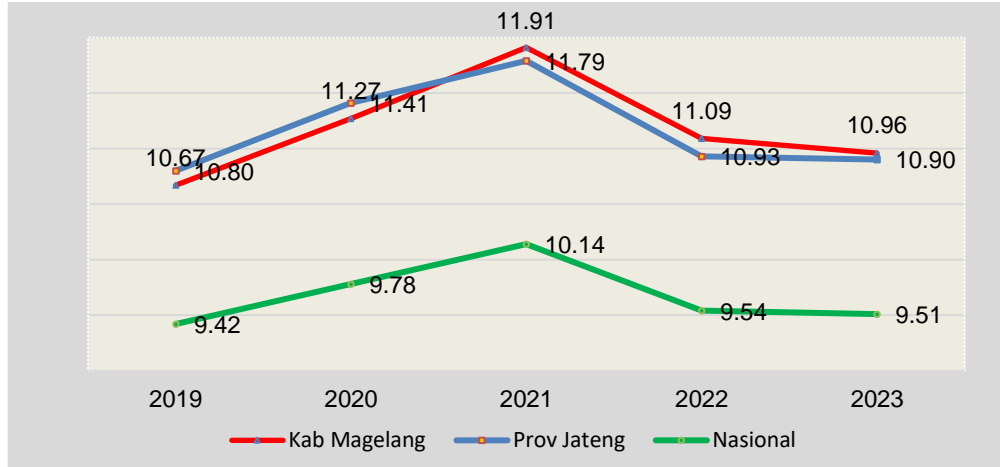


Dari tabel di atas menunjukkan garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir Rp411.129.497,00 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan tingkat pengeluaran penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang sebesar 10,67% atau sebesar 137,45 jiwa, setelah mengalami fluktuasi akibat pandemi covid 19 pada sejak tahun 2020, angka kemiskinan di tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 10,96% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 144.490 jiwa.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang negatif, dari 0,98 pada tahun 2019, mengalami kenaikan menjadi 1,66 pada tahun 2022. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan, dari 0,34 pada tahun 2019 menjadi 0,41 pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan sebesar 0,82 persen; jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 9.580 jiwa, dari 154.910 jiwa pada tahun 2021, menjadi 145.330 jiwa pada tahun 2022; angka garis kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar Rp23.889,00, dari Rp353.608,00 pada tahun 2021, menjadi Rp377.497,00 pada tahun 2022.

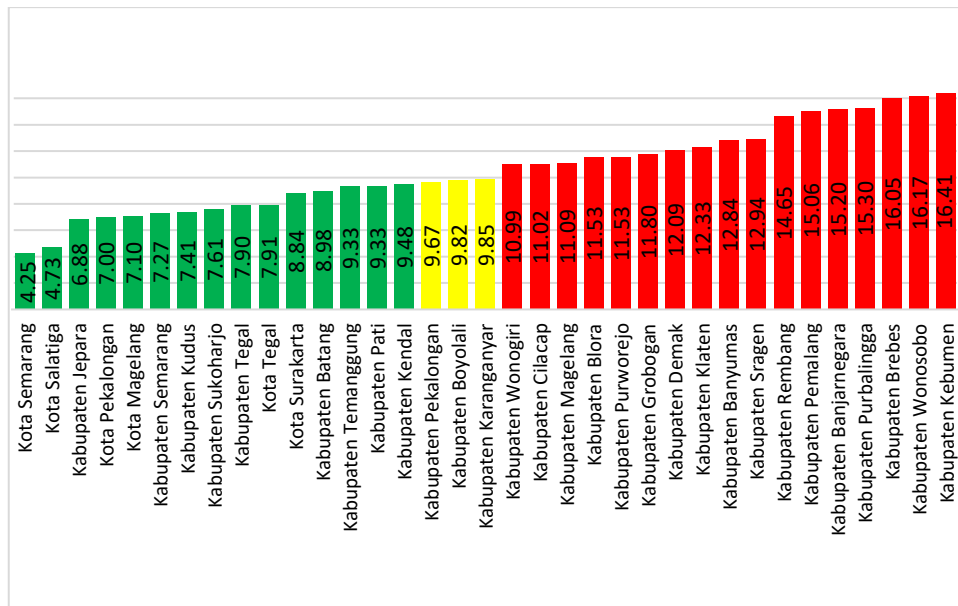
Penurunan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada Periode Maret 2022 ini linier dengan penurunan di level nasional, provinsi dan 34 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dibandingkan dengan capaian dengan capaian Provinsi dan Nasional, capaian angka kemiskinan Kabupaten Magelang Periode Maret 2022 masih berada di atas Provinsi (10,93%) dan Nasional (9,54%), sehingga Kabupaten Magelang masuk zona prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Gambar 2.3.
Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional 2019-2023

Dibandingkan dengan capaian 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, posisi Kabupaten Magelang pada tahun 2023 berada pada peringkat 21 (dua puluh satu) atau sama dengan capaian tahun 2022. Selengkapnya bisa dilihat pada grafik di bawah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.4.
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022



Dibandingkan dengan capaian angka kemiskinan di Kabupaten/Kota di eks Karesidenan Kedu, pada tahun 2022 posisi capaian Kabupaten Magelang berada pada posisi ke tiga diatas capaian Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15.
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Eks
Karesidenan Kedu Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	P0	P1	P2	GK
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Magelang	8,65	7,10	0,47	0,06	575.130
2	Kab Magelang	145,33	11,09	1,66	0,41	377.497
3	Kab Temanggung	73,04	9,33	1,06	0,19	354.012
4	Kab Kebumen	196,16	16,41	3,41	1,02	416.004
5	Kab Purworejo	82,64	11,53	1,31	0,24	393.731
6	Kab Wonosobo	128,11	16,17	3,18	0,86	399.180

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari data di atas bisa dilihat bahwa tren penurunan angka kemiskinan, baik di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Kedu hampir semua mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan, hal ini salah satu faktornya adalah mulai pulihnya kegiatan perekonomian masyarakat setelah mengalami penurunan sejak tahun 2020 akibat pandemi covid 19.

Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat sebesar Rp18.607.285.497,00 dengan realisasi Rp15.880.685.785,00 (85,35%). Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat, terdiri dari:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan
6. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
7. Program Penempatan Tenaga Kerja
8. Program Hubungan Industrial



iii) Tujuan Strategis: Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender

Pada tujuan strategis meningkatnya pembangunan berbasis gender diukur dengan indikator kinerja tujuan indeks pembangunan gender. Capaian tujuan strategis meningkatnya pembangunan berbasis gender sebagai berikut:

Tabel 2.16.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya
Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPKMD (2024)		Ket
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka (0-100)	92,91	91,81	91,89	92,91	92,70	92,21	99,36	92,99	99,16	*)
Rata-rata Capaian Kinerja :								99,36		99,16	

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

Keterangan : *) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2022) karena data belum keluar

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender pada tahun 2023 sebesar 99,36% (Sangat Tinggi) dimana dapat melampaui target pada tahun yang bersangkutan, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 99,16% (Sangat Tinggi). Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDG's). Hal ini dapat digambarkan apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 secara eksplisit telah mengamatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan ketiga pada misi pertama RPJMD Kabupaten Magelang adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan Sasaran meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan kategori Kabupaten layak anak. Adapun Arah Kebijakannya adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga.



IPG Kabupaten Magelang pada tahun 2019-2022 mengalami *trend* yang fluktuatif, kondisi awal pada tahun 2019 sebesar 92,91 persen kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 91,8 persen, pada tahun 2021 sebesar 91,9 persen dan mengalami kenaikan menjadi 92,22 persen pada tahun 2022. Capaian IPG di Kabupaten Magelang tahun 2019-2022 masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi masih lebih baik dibandingkan capaian nasional.

Tabel 2.17.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
Kabupaten Magelang	92,91	91,81	91,89	92,21
Provinsi Jawa Tengah	91,89	92,18	92,48	92,83
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023

Kabupaten Magelang di depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain; masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Sejalan dengan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan kebijakan di bawahnya dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Magelang Serta Surat Edaran Bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah se Kabupaten Magelang, maka diharapkan semua OPD untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender.



Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender mutlak diperlukan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

Di Kabupaten Magelang, beberapa data, khususnya data kependudukan sudah disajikan pilah gender. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain-lain.

Melalui Penganggaran Responsif Gender, diharapkan akan bisa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Adapun implementasi dari Anggaran Responsif Gender diharapkan setiap OPD melampirkan dokumen pendukung yang mengakomodir pengarusutamaan gender dalam perencanaan program dan kegiatan, dengan alat analisis GAP (Gender Analysis Pathway)/ PROBA dan GBS (Gender Budget Statement) dalam Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra RKA).

Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya pembangunan berbasis gender sebesar Rp19.536.967.960,00 dengan realisasi Rp18.412.787.649,00 (94,25%). Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya pembangunan berbasis gender, terdiri dari:



1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Pengendalian Penduduk
4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
5. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Perlindungan Khusus Anak

iv) Tujuan Strategis: Meningkatkan Daya Saing Daerah

Pada tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja tujuan, yaitu: laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan cakupan infrastruktur wilayah berkelanjutan. Capaian tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis
Meningkatnya Daya Saing Daerah Tahun 2023

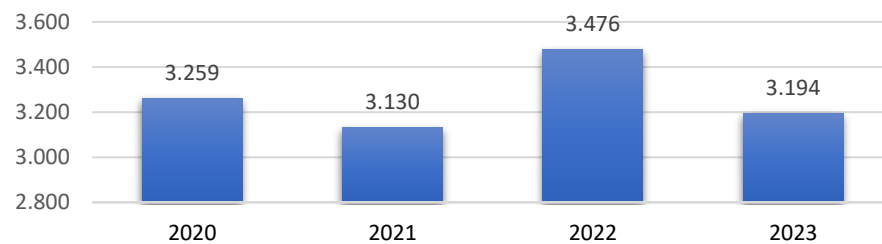
Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5-5,5	-1,67	3,48	5,46	3,5-2,5	5,04	144,00	3,6-4,5	140,00	
2 PDRB Per Kapita	juta rupiah	25,20	24,97	26,18	25,53	28,68	25,53	89,02	29,52	86,48	*)
3 Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	66,86	66,6	67,57	71,93	74,76	71,93	96,21	82,21	87,50	*)
Rata-rata Capaian Kinerja :								109,74		104,66	

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2024

Keterangan ; *) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2022) karena data belum keluar

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah pada tahun 2023 sebesar 109,74% (Sangat Tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 104,66% (sangat tinggi). Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) merupakan hasil adopsi konsep pengukuran IDSD oleh Kemenristekdikti dan BRIN dan disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2020. Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah konsisten melakukan penghitungan IDSD/PDSD sejak tahun 2019. Pemanfaatan IDSD/PDSD sebagai masukan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

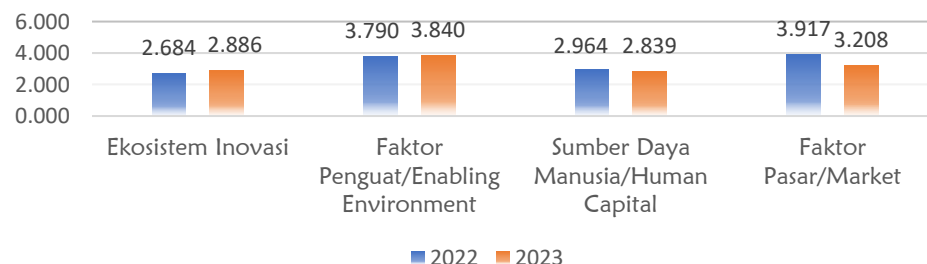
PDSD Tahun 2023 diukur melalui 97 Indikator Pemetaan Daya Saing Daerah dan 1 Indikator Analisis Interaksi dan Kebijakan Wilayah. Indikator Pemetaan Daya Saing Daerah tersebut terbagi dalam 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 dimensi, sedangkan Indikator Analisis Interaksi dan Kebijakan Wilayah meliputi 8 indikator yang terbagi menjadi 2 pilar dan 4 dimensi. Pada Gambar 2.5 terlihat bahwa nilai PDSD Kabupaten Magelang dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, nilai PDSD sebesar 3,194. Meskipun turun sebesar 2,02% dibandingkan tahun 2020, namun nilai ini masuk pada kategori tinggi.



Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024

Gambar 2.5.
Nilai PDSD Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023

Nilai PDSD ini merupakan urutan ke-30 se-Jawa Tengah atau ke-4 se-Purwomanggung. Dari tahun 2020 dan 2023, terjadi penurunan pada Aspek Sumber Daya Manusia dan Aspek Market, yang masing-masing nilai aspek dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



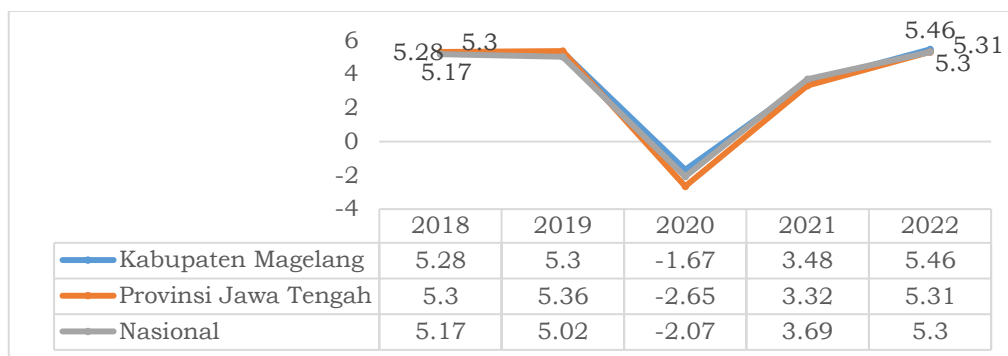
Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024

Gambar 2.6.
Nilai Aspek PDSD Kabupaten Magelang, Tahun 2022-2023



Berdasarkan pengukuran pemetaan daya saing daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023, nilai Aspek PDSB tertinggi adalah pada Faktor Penguat/*Enabling Environment* dengan nilai sebesar 3,840 dan aspek ini menjadi faktor yang kuat di dalam internal Kabupaten Magelang. Faktor Penguat terdiri dari Kelembagaan, Infrastruktur, dan Perekonomian Daerah. Salah satu faktor yang mendukung adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Magelang menjadi yang terbesar kedua setelah Kota Magelang yaitu sebesar 5,46 persen.

Perkembangan perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, dimana besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu.



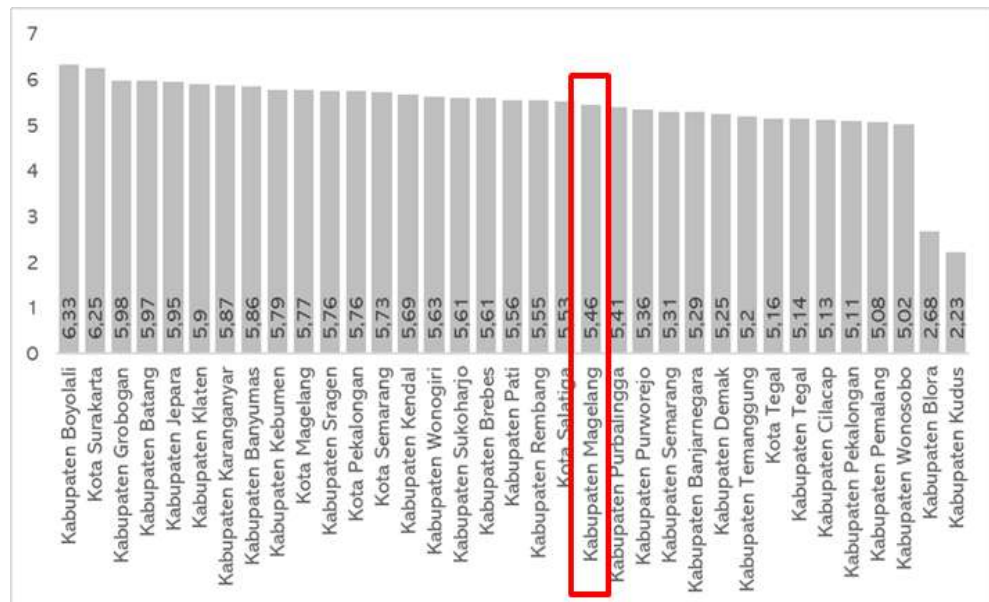
Sumber : Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2022

Keterangan : Realisasi indikator laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun 2005-2010 menggunakan perhitungan metode lama (tahun dasar 2000), sementara realisasi tahun 2010-2022 menggunakan perhitungan metode baru (tahun dasar 2010)

Gambar 2.7.

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2022

Secara umum, capaian laju pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama. Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2019, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun tidak signifikan, yang ditandai dengan peningkatan sebesar 0.3 persen pada tahun 2019, dimana pada tahun 2019 capaian laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini tercatat sebesar 5,28 persen menjadi 5,30 persen di tahun 2019. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,1 persen, dan nasional menunjukkan kecenderungan menurun yang ditandai dengan penurunan sebesar 2,9 persen.



Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2023

Gambar 2.8.
Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



Selanjutnya, pada tahun 2020, terjadinya pandemi covid-19, memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional hingga dunia, tak terkecuali di Kabupaten Magelang. Capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan kontraksi yang cukup dalam. Kondisi perekonomian Kabupaten Magelang sendiri mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -1,67 persen, dimana capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Capaian laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terkontraksi sebesar -2,65 persen, dan nasional tercatat sebesar -2,07 persen.

Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, pada tahun 2021 capaian laju pertumbuhan ekonomi baik di kabupaten, provinsi, maupun nasional menunjukkan peningkatan, dimana peningkatan tersebut berlangsung hingga saat ini. Pada tahun 2022, capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang meningkat menjadi 5,46 persen, Provinsi Jawa Tengah menjadi 5,31 persen, dan nasional menjadi 5,30 persen. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 menempati posisi ke-21, meningkat dari tahun sebelumnya yang menempati posisi ke-22.

Selanjutnya, Kabupaten Boyolali merupakan wilayah dengan capaian laju perekonomian tertinggi di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2022, yakni mencapai 6,33 persen, sementara itu Kabupaten Kudus masih menjadi Kabupaten dengan capaian laju pertumbuhan terendah, yakni sebesar 2,23 persen, dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten ini masih terkontraksi sebesar -1,98 persen.

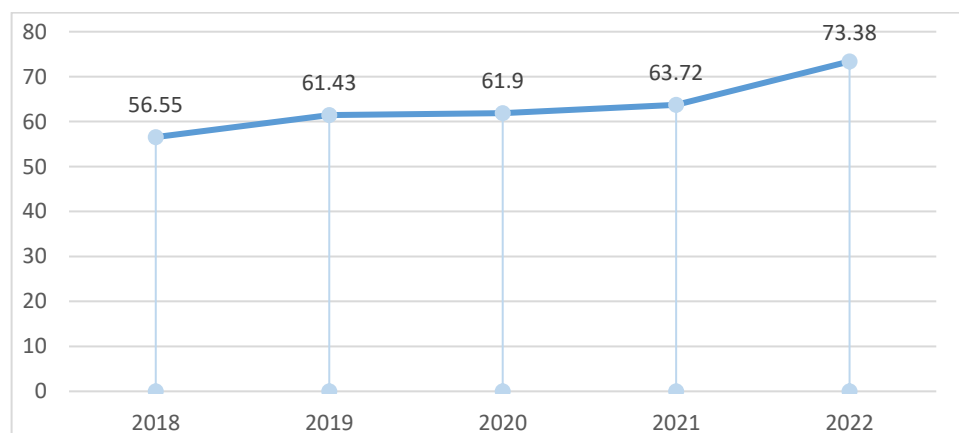
Indikator cakupan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur upaya pembangunan infrastruktur wilayah yang meliputi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, infrastruktur perhubungan, dan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perkotaan dan mendukung perkembangan wilayah.

Tabel 2.19.
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2022

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	62,8	69,9	73,42	63,94
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	60,05	53,89	54,02	-
	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	%	-	-	-	61,38
3.	Cakupan hunian layak dan berkelanjutan	%	-	-	-	94,82
	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	61,63	61,9	63,72	73,38

Sumber: Hasil Olahan, 2023

Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2019 hingga 2022, cakupan Pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, nilai cakupan Pembangunan 61,63 persen dan terus meningkat sehingga pada tahun 2022 nilainya mencapai 73,38 persen.



Sumber; DPUPR Kabupaten Magelang, 2023

Gambar 2.9.
Grafik Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022



Peningkatan yang cukup tinggi sebesar 9,66 persen ini dipengaruhi karena ada perubahan formula, yang semula cakupan pembangunan infrastruktur hanya memperhitungkan ketercapaian pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dan infrastruktur perhubungan, namun sejak tahun 2022 ketercapaian infrastruktur pendukung perumahan dan kawasan permukiman (indikator cakupan hunian layak dan berkualitas) juga menjadi komponen yang diperhitungkan dalam indikator ini.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Daerah sebesar Rp369.716.181.859,00 dengan realisasi Rp354.452.275.595,00 (95,87%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Daerah adalah:

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan
11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
12. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



13. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
14. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
15. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
16. Program Pengembangan Permukiman
17. Program Penataan Bangunan Gedung
18. Program Penyelenggaraan Jalan
19. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
20. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
21. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
22. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
23. Program Pengembangan Perumahan
24. Program Kawasan Permukiman
25. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
26. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
27. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
28. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
30. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
31. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
32. Program Pengembangan Ekspor
33. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
34. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
35. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
36. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
37. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
38. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
39. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian



40. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
41. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
42. Program Perizinan Usaha Pertanian
43. Program Penyuluhan Pertanian
44. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
45. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
46. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
47. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
48. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
49. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
50. Program Pemasaran Pariwisata
51. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
52. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
53. Program Pengembangan Kebudayaan
54. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
55. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
62. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
63. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
64. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya



65. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 66. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 67. Program Penanggulangan Bencana
 68. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 69. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 70. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 71. Program Penataan Desa
 72. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
 73. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
 74. Program Perekonomian Dan Pembangunan
 75. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 76. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 77. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 78. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- v) Tujuan Strategis: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Pada tujuan strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel diukur dengan indikator kinerja tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.20.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket	
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	62,76	61,07	61,48 (B)	62,65 (B)	70,68 (Baik)	67,42	95,39	72,39 (BB)	93,13	
Rata-rata Capaian Kinerja :								95,39		93,13		

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024



Pada tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada Tujuan Strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel pada tahun 2023 sebesar 95,39% (Sangat Tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 93,13% (Sangat Tinggi). Indeks reformasi birokrasi sejak tahun 2020 terus mengalami peningkatan, tetapi masih masuk kategori yang sama yaitu kategori B.

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebesar Rp2.714.538.796.984,00 dengan Realisasi Rp2.570.980.179.508,00 (94,71%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informasi
4. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
10. Program Penyelenggaraan Pengawasan
11. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi



12. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
13. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
14. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
15. Program Pendaftaran Penduduk
16. Program Pencatatan Sipil
17. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
18. Program Pengelolaan Arsip
19. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
21. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
22. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
23. Program Kepegawaian Daerah

2) Evaluasi Sasaran Strategis

i) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket	
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,72	7,78	7,79	7,81	8,11	7,82	96,42	8,22	95,13	
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,67	12,54	12,55	12,58	12,63	12,61	99,84	12,66	99,61	
3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	93,89	93,1	92,67	92,35	95,12	92,03	96,75	95,56	96,31	
Rata-rata Capaian Kinerja :									96,75		96,31	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Keterangan : *) Mengacu pada capaian tahun sebelumnya (2022)

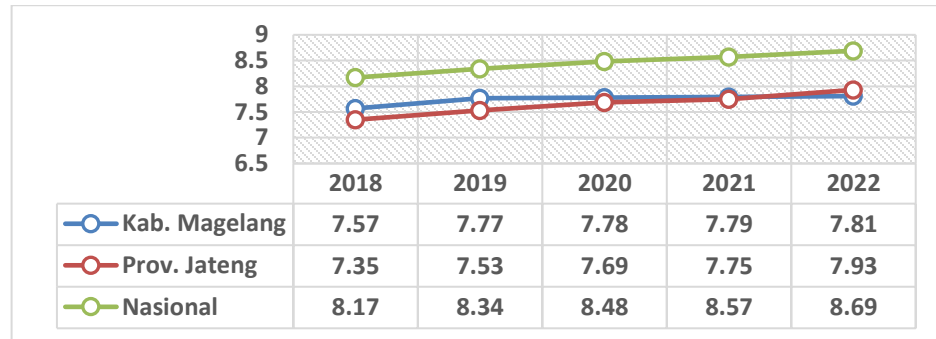


Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada Sasaran strategis Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan pada tahun 2023 sebesar 97,75% (Sangat Tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 96,31% (Sangat Tinggi).

Dimensi pengetahuan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2019, indikator harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 12,67 tahun, dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,03 persen per tahun, menjadi 12,61 tahun 2023. Dari dimensi pengetahuan tersebut, pada tahun 2023 anak-anak berusia tujuh tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,61 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, capaian indikator harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang ini tercatat berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, pada tahun 2018, indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten ini tercatat sebesar 7,57 tahun dan meningkat menjadi 7,82 tahun pada tahun 2023, atau meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,05 persen per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Magelang telah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas tujuh atau setara dengan kelas satu pada jenjang sekolah menengah pertama. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang tidak terpaut jauh dari besaran capaian provinsi.

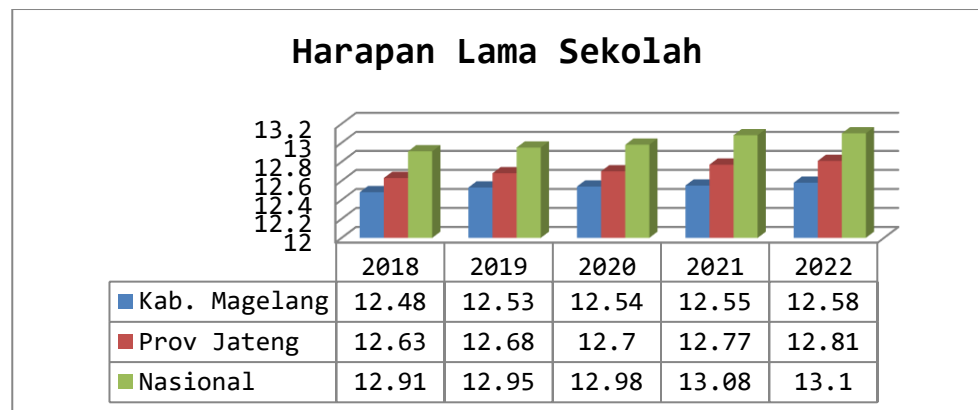
Pada tahun 2022 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Magelang mencapai 7,81 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,81 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada Jawa Tengah namun lebih rendah dari nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023

Gambar 2.10.
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Magelang pada tahun 2022 sebesar 12,58. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 di Kabupaten Magelang memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,58 tahun atau setara dengan Diploma I. Sejak tahun 2018 HLS Kabupaten Magelang cenderung meningkat, dari sebesar 12,48 (2018) menjadi 12,58 (2022). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2018-2022 lebih rendah dari provinsi dan nasional. Berarti bahwa peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu di Kabupaten Magelang lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023

Gambar 2.11.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022



Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja pembangunan Pendidikan sebesar Rp287.193.483.303,00 dengan realisasi sebesar Rp278.856.681.633,00 (97,10%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3. Program Pembinaan Perpustakaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
6. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ii) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kesehatan

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kesehatan, dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya
Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket	
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,72	73,88	74,03	74,10	74,44	100,46	74,22	100,30	
Rata-rata Capaian Kinerja :									100,46		100,30	

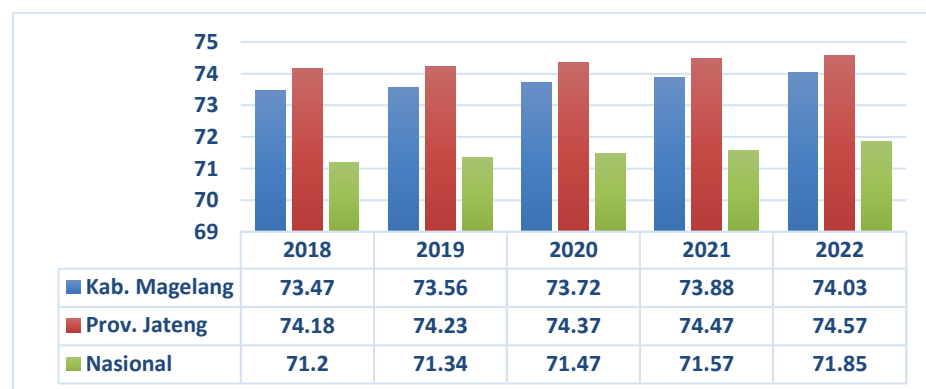
Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada Sasaran strategis meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan pada tahun 2023 sebesar 100,46% (Sangat Tinggi) dan dapat melampaui target yang ditetapkan di tahun bersangkutan, dibandingkan dengan tahun 2021 (100,44%) terdapat peningkatan sebesar 0,02%, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100,37% (Sangat Tinggi).



Pada rentang waktu tahun 2018 hingga 2023, komponen dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dalam rentang waktu tersebut, dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup menunjukkan besaran yang semakin meningkat, yang ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,19 persen per tahun. Pada tahun 2018, capaian indikator ini tercatat sebesar 73,47 tahun, dan meningkat menjadi 74,44 tahun di tahun 2023. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Magelang pada tahun 2023, memiliki harapan hidup selama 74,44 tahun. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, capaian indikator angka harapan hidup di Kabupaten Magelang ini tercatat berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Magelang mencapai 74,03 mengalami kenaikan sebesar 0,49 dari tahun 2018 yang sebesar 73,47. Kenaikan UHH ini mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Pertumbuhan UHH Kabupaten Magelang diatas pertumbuhan UHH Provinsi Jawa Tengah namun masih di bawah pertumbuhan UHH Nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2023

Gambar 2.12.
Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional
Tahun 2018-2022



Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan Rp134.546.369.847,00 dengan realisasi sebesar Rp121.568.523.277,00 (90,35%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan terdiri dari:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

iii) Sasaran Strategis: Menurunnya Jumlah PMKS

Capaian kinerja sasaran strategis Menurunnya Jumlah PMKS, dapat dilihat pada tabel berikut:

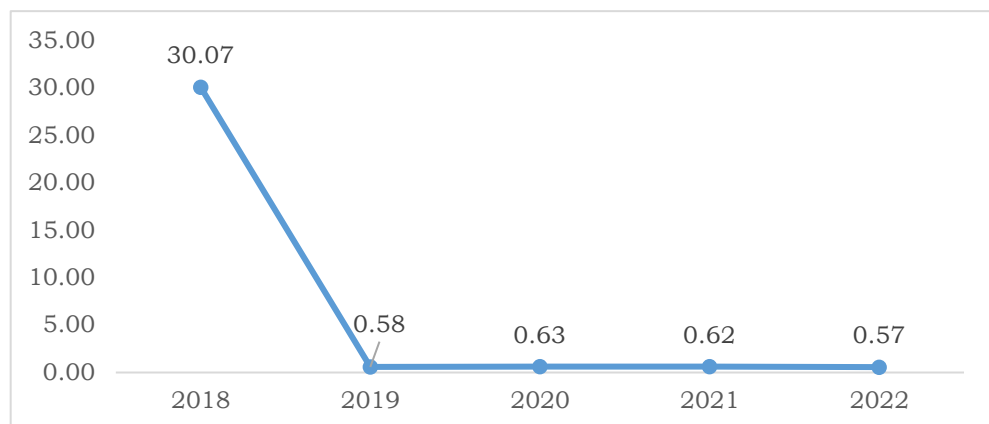
Tabel 2.23.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Jumlah PMKS Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPJMD (2024)		Ket	
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,63	0,62	0,57	0,58	0,57	98,28	0,58	98,28	*)
Rata-rata Capaian Kinerja :									98,28		98,28	

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2023

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis menurunnya jumlah PMKS pada tahun 2023 sebesar 106,90% (Sangat Tinggi) dibandingkan tahun 2022, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 106,90% (Sangat Tinggi), capaian pada sasaran strategis tersebut dapat terlampaui pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD.

Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan angka yang menggambarkan penurunan jumlah orang yang tergolong PMKS dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah PMKS pada periode sebelumnya. PMKS merupakan individu atau keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial, dan memerlukan bantuan dari pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Penurunan persentase PMKS membutuhkan upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan penanganan pada PMKS agar dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator persentase penurunan PMKS dapat diketahui melalui pengurangan antara jumlah PMKS pada periode awal dengan jumlah PMKS pada periode akhir, kemudian dibagi dengan jumlah PMKS pada periode awal dan dinyatakan dalam persen.



Sumber : Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dan Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang 2023

Gambar 2.13.
Grafik Persentase Penurunan PMKS Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, penurunan PMKS di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Peningkatan persentase penurunan PMKS cukup tajam pernah terjadi pada tahun 2019, dari yang awalnya memiliki persentase 30,07% turun menjadi 0,58%.



Tahun 2018 menjadi tahun dengan capaian terbaik karena terjadi penurunan persentase PMKS sebesar 30,07%. Meski demikian, pada tahun-tahun berikutnya, penurunan PMKS cenderung berjalan stagnan pada angka 0,6% yang artinya upaya penanganan PMKS tidak berjalan sesuai harapan karena hampir tidak ada penurunan PMKS sama sekali. Menurut keterangan Dinas Sosial Kabupaten Magelang, tajamnya lonjakan fluktuasi pada capaian persentase penurunan PMKS juga disebabkan oleh adanya perbedaan rumus yang digunakan dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dengan RPJMD dan Renstra sebelumnya.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis menurunkan jumlah PMKS sebesar Rp13.570.254.937,00 dengan realisasi sebesar Rp12.599.189.171,00 (92,84%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan terdiri dari:

1. Program Pemberdayaan Sosial
 2. Program Rehabilitasi Sosial
 3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 4. Program Penanganan Bencana
- iv) Sasaran Strategis: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket	
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	79,51	81,27	79,92	79,44	81,57	79,44	97,39	82,62	96,15	*)
Rata-rata Capaian Kinerja :									97,39		96,15	

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2023

Keterangan : **) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2022) karena data belum keluar



Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan daerah pada tahun 2023 sebesar 97,98% (Sangat Tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 96,73% (Sangat Tinggi). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah konsep yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas konsumsi pangan penduduk suatu daerah. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Saat ini skor PPH telah digunakan sebagai indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja dalam bidang ketahanan pangan di suatu wilayah dan diisyaratkan oleh Undang-Undang untuk dapat direalisasikan pencapaiannya.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, yang pencapaiannya diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang dengan indikator yang ada saat ini yaitu PPH. Terdapat dua jenis PPH, yaitu PPH Konsumsi dan PPH Ketersediaan.

Tabel 2.25.
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Ketersediaan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Persen	87,90	87,70	87,90	87,90	86,40
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Persen	70,50	70,54	73,85	78,45	81,26

Sumber : Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2023

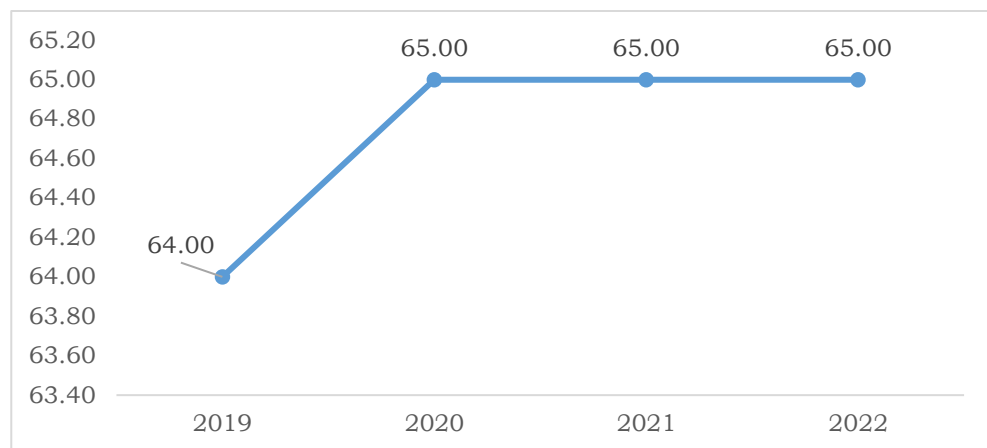


Secara umum, skor PPH di Kabupaten Magelang, baik PPH konsumsi maupun ketersediaan masih berada di bawah skor pangan ideal, yaitu 100 persen. Hasil skor PPH ini menginterpretasikan bahwa pola konsumsi pangan pada rumah tangga di Kabupaten Magelang ini belum beragam, serta mutu gizi dan nutrisi masih belum optimal. Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, pencapaian skor PPH konsumsi di Kabupaten Magelang tercatat fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan besaran penurunan rata-rata sebesar 0,34 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran pencapaian skor PPH konsumsi di Kabupaten ini tercatat sebesar 87,90 persen dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi sebesar 86,40 persen. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, penurunan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, perubahan gaya hidup, peningkatan kesadaran gizi, serta ketersediaan pangan.

Sementara itu, berkebalikan dengan pencapaian skor PPH konsumsi, besaran pencapaian skor PPH ketersediaan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan besaran peningkatan rata-rata sebesar 2,88 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran pencapaian skor PPH ketersediaan di Kabupaten ini tercatat sebesar 70,5 persen dan berfluktuasi hingga menjadi 81,26 persen di tahun 2022.

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya ditulis UU 18/2012) mengamanatkan agar ketahanan pangan nasional dibangun berdasarkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

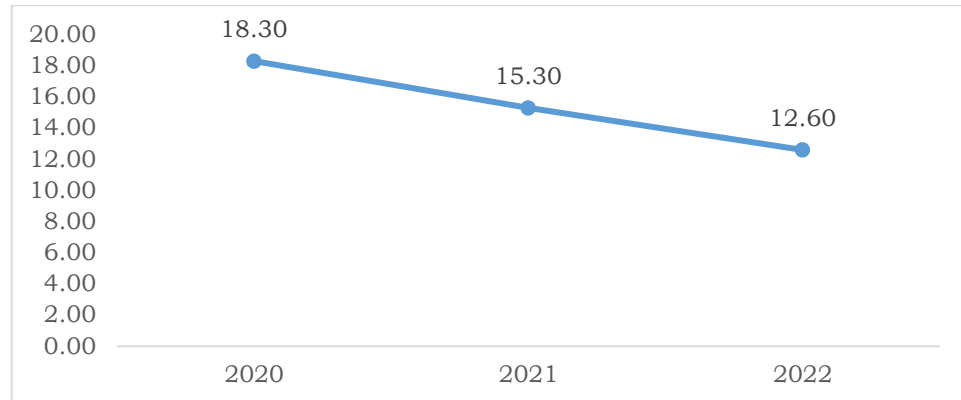
Penguatan cadangan pangan bertujuan untuk memastikan apakah pada suatu wilayah tertentu tiap tahunnya memiliki inventarisasi cadangan pangan sebesar perkiraan jumlah kebutuhan bahan pangan utama untuk keadaan darurat, sehingga pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat terselenggara dengan baik. Indikator penguatan cadangan pangan mendorong setiap wilayah untuk dapat mencapai besaran cadangan pangan minimal. Penguatan cadangan pangan Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang tetap dalam tiga tahun terakhir, yakni sebesar 65 persen, dimana menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 64 persen.



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Magelang Tahun 2023

Gambar 2.14.
Grafik Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Magelang
Tahun 2019-2022

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Untuk melakukan penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Magelang Tahun 2023

Gambar 2.15.

Grafik Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022

Hingga tahun 2022, Kabupaten Magelang masih memiliki daerah rentan rawan pangan prioritas dua (sedang) dan tiga (rendah). Prioritas dua secara umum disebabkan oleh tiga indikator, yakni (1) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk; (2) rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (3) rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga. Sementara itu, prioritas tiga secara umum disebabkan pula oleh tiga indikator, yang meliputi (1) rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; (2) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk; dan (3) rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa. Pada tahun 2020, penanganan daerah rentan rawan pangan di Kabupaten ini tercatat sebesar 18,30 persen, dan menunjukkan kecenderungan menurun hingga menjadi 12,60 persen di tahun 2022.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut tergambar dalam beberapa hal berikut:



- 1) **Regulasi Ketahanan Pangan**

Untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun regulasi terkait ketahanan pangan. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Magelang diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati yang untuk pertama kalinya diundangkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. Sehubungan dengan adanya perubahan SOTK baru, peraturan bupati tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.
- 2) **Ketersediaan Pangan Utama Beras**

Ketersediaan pangan utama beras selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. Maka secara ketersediaan, Kabupaten Magelang sudah mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya, jika dibandingkan dengan kebutuhan beras perkapita per tahun.
- 3) **Pola Pangan Harapan (PPH)**

Keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Terdapat dua pola pangan harapan, yaitu PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi.
- 4) **Stabilitas Harga Pangan**

Stabilitas harga pangan adalah kepentingan bersama antara produsen pangan dan konsumen. Kepentingan produsen pangan adalah menginginkan adanya kepastian usaha karena harga yang stabil dapat meningkatkan perencanaan produksi dan tentu saja adalah output yang lebih baik. Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang dari tahun 2016 sampai dengan 2022 cenderung fluktuaktif.
- 5) **Daya Dukung Pangan**

Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kabupaten Magelang.



Konsumsi beras tahun 2022 berdasarkan hasil prognosis terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 111,58 kg/perkapita/tahun. Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL).

6) Ketersediaan komoditas selain beras

Pada tahun 2022 ketersediaan komoditas selain beras mengalami surplus kecuali untuk kedelai, kacang hijau, gula, daging sapi, susu dan Bawang merah defisit.

7) Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (JEP 1)

Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) merupakan hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan serta hasil peternakan, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan daerah sebesar Rp1.100.425.370,00 dengan realisasi sebesar Rp1.027.344.416,00 (93,36%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis terdiri dari:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

v) Sasaran strategis: Terkendalinya Tingkat Pengangguran Terbuka

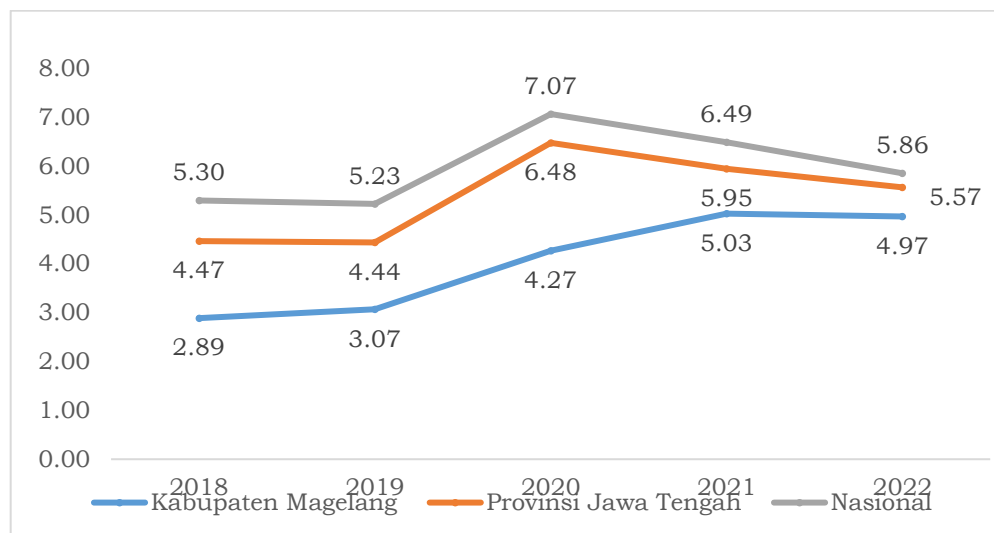
Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Layanan Hunian Yang Layak dan Berkualitas Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) **	persen	2,4-3,0	4,27	5,03	4,97	2,4-3,0	4,42	52,67	2,25-2,65	3,56	
Rata-rata Capaian Kinerja :								52,67		3,56	

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis terkendalinya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 sebesar 52,67 (sedang). Sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 3,56 (rendah), rendahnya tingkat pengangguran tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dimana terjadi penutupan tempat usaha yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja masih dirasakan pada tahun 2023.

Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja. Di sisi lain, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial dan pendidikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT adalah persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

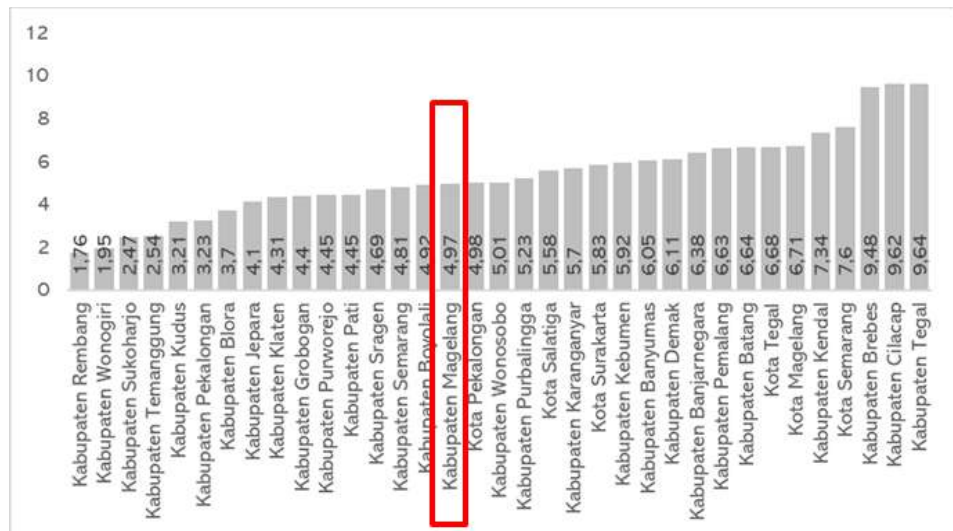


Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2022

Gambar 2.16.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022



Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, secara umum capaian TPT di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu yang sama, capaian TPT Kabupaten ini secara umum lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, capaian TPT Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama. Capaian TPT Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan sebesar 11,45 persen dengan capaian tahun 2022 sebesar 4,97, hal tersebut menunjukkan peningkatan yang tertinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sementara itu, capaian TPT Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 4,5 persen per tahun, dengan capaian tahun 2022 sebesar 5,57 persen, sementara capaian nasional pada tahun yang sama menunjukkan besaran 2,03 persen dengan penurunan rata-rata sebesar 2,90 persen per tahun.



Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2022

Gambar 2.17.

Posisi Relatif Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



Apabila dibandingkan dengan capaian TPT dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, maka capaian TPT Kabupaten Magelang menempati posisi ke 16, menurun dari tahun sebelumnya dimana posisi Kabupaten ini berada di posisi ke 14. Kabupaten Rembang dan Wonogiri merupakan dua wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki capaian TPT terbaik, yakni sebesar 1,76 persen dan 1,95 persen di tahun 2022. Sementara itu, Kabupaten Brebes, Cilacap, dan Tegal merupakan dua wilayah dengan capaian yang paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di provinsi ini dengan besaran TPT sebesar sembilan persen. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan empat Kabupaten/Kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Temanggung.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis terkendalinya tingkat pengangguran terbuka sebesar Rp3.936.605.190,00 dengan realisasi sebesar Rp3.444.433.378,00 (87,50%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Terkendalinya Tingkat Pengangguran Terbuka terdiri dari:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial

vi) Sasaran strategis: Meningkatkan Keberdayaan Gender

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Keberdayaan Gender, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Keberdayaan Gender Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun Sebelumnya		Tahun 2022			Akhir RPMJD (2024)	
		2020	2021	Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka (0-100)	69,65	69,64	69,93	69,64*	99,59	70,53	98,74
2 Kategori Kabupaten Layak Anak	-	nindya	Nindya	Nindya	Nindya	100,00	Nindya	100,00
Rata-rata :						99,79		99,37

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

Keterangan : Capaian mengacu tahun sebelumnya (2022) karena data belum keluar



Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya keberdayaan gender pada tahun 2023 sebesar 115.65% (Sangat Tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 115,37% (Sangat Tinggi), capaian pada sasaran strategis tersebut mendekati target pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD.

IPG Kabupaten Magelang pada tahun 2018-2022 mengalami *trend* yang fluktuatif, sempat berada pada angka 92,23 tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 91,78 pada tahun 2019, naik kembali menjadi 91,81 pada tahun 2020 dan capaian terakhir sebesar 92,21 pada tahun 2022. Capaian IPG di Kabupaten Magelang tahun 2018-2022 masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi masih lebih baik dibandingkan capaian nasional.

Tabel 2.28.
Indeks Pembangunan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang
Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Kabupaten Magelang	91,95	91,78	91,81	91,89	92,21
Provinsi Jawa Tengah	91,94	91,89	92,18	92,48	92,83
Nasional	90,96	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2022

Kabupaten Magelang di depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain; masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Sejalan dengan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan kebijakan di bawahnya dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Magelang Serta Surat Edaran Bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah se Kabupaten Magelang, maka diharapkan semua OPD untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender.



Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender mutlak diperlukan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

Di Kabupaten Magelang, beberapa data, khususnya data kependudukan sudah disajikan pilah gender. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain-lain.

Melalui Penganggaran Responsif Gender, diharapkan akan bisa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Adapun implementasi dari Anggaran Responsif Gender diharapkan setiap PD melampirkan dokumen pendukung yang mengakomodir pengarusutamaan gender dalam perencanaan program dan kegiatan, dengan alat analisis *GAP (Gender Analysis Pathway)*/ *PROBA* dan *GBS (Gender Budget Statement)* dalam Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra RKA)

Kabupaten/Kota layak anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.



Sampai dengan tahun 2022, tingkat desa layak anak di Kabupaten Magelang selalu meningkat tetapi untuk Kecamatan Layak Anak pada tahun 2022 tidak ada peningkatan. Hal ini terjadi karena masih ada pandemic Covid 19, sehingga terjadi *refocusing* terhadap anggaran dimaksud. Dukungan pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah melalui pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang dengan penguatan gugus tugas Kabupaten, kecamatan dan desa, serta meningkatkan pencapaian hasil kegiatan dari klaster-klaster KLA sesuai dengan Perda nomor 20 tahun 2016 tentang KLA, meningkatkan peran dan dukungan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Magelang, serta meningkatkan peran dan dukungan media.

Jumlah desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29.
Desa, Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak
di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat Pratama	Desa	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Desa	92	94	0	0	0
3.	Tingkat Nindya	Desa	0	0	98	100	110
4.	Tingkat Utama	Desa	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kecamatan	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Kecamatan	13	17	17	17	17
3.	Tingkat Nindya	Kecamatan	0	0	0	0	0
4.	Tingkat Utama	Kecamatan	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kabupaten	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Kabupaten	1	1	0	0	0
3.	Tingkat Nindya	Kabupaten	0	0	1	1	1
4.	Tingkat Utama	Kabupaten	0	0	0	0	0

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2023

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya keberdayaan gender Rp19.030.709.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.953.390.542,00 (94,34%).



Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan keberdayaan gender terdiri dari:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Pengendalian Penduduk
4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak

vii) Sasaran strategis: Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik

Capaian kinerja sasaran strategis Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik, dapat dilihat pada tabel berikut:

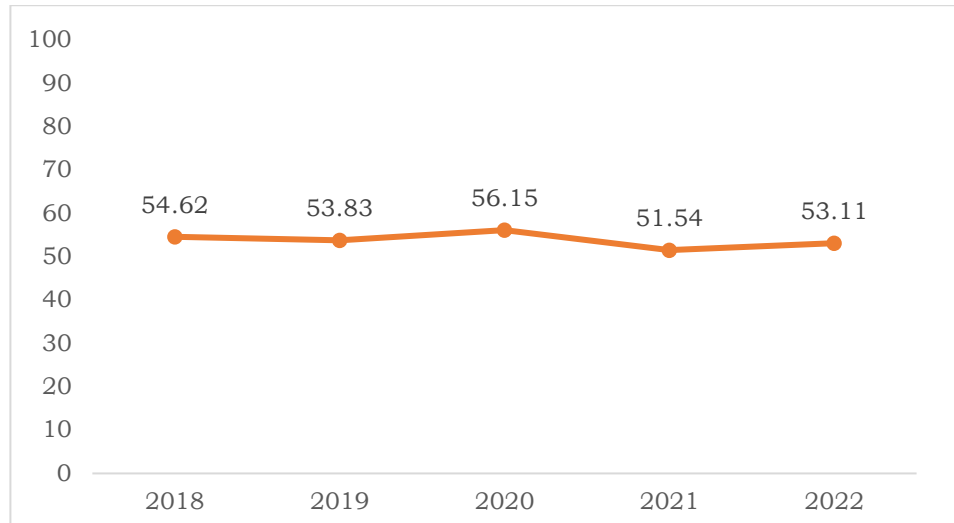
Tabel 2.30.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka (1-100)	72,10	71,30	71,41	70,48	71,36	65,80	92,21	71,38	92,18	
Rata-rata Capaian Kinerja :								92,21		92,18	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik pada tahun 2023 sebesar 92,21% (Sangat Tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 92,18% (Sangat Tinggi), capaian pada sasaran strategis tersebut dapat terlampaui pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator nasional untuk menilai kondisi lingkungan hidup pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Air menjadi salah satu komponen untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air menunjukkan kondisi mutu air di suatu wilayah selama periode waktu tertentu.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 2.18.

Grafik Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

Berdasarkan data yang ada, hasil pengukuran indeks kualitas air menunjukkan nilai yang relatif stabil pada kurun waktu 2018-2022. Pada tahun 2018, hasil pengukuran indeks kualitas air Kabupaten Magelang sebesar 54,62. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan dan peningkatan sehingga pada tahun 2022, hasil pengukuran indeks kualitas air menjadi 53,11.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik Rp18.116.924.910,00 dengan realisasi sebesar Rp17.276.881.349,00 (95,36%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik terdiri dari:

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)



5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
 8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 10. Program Pengelolaan Persampahan
 11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- viii) Sasaran strategis: Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	61,63	61,90	63,72	73,38	81,80	73,38	89,71	93,05	78,86	*)
Rata-rata Capaian Kinerja :								89,71		78,86	

Sumber: DPUPR, DPRKP dan Dishub Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur pada tahun 2023 sebesar 89,71% (tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 78,84% (sedang). Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur wilayah dapat dilihat dari cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Pada tahun 2022 nilai cakupan pembangunan infrastruktur wilayah diperoleh melalui komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan, dan cakupan hunian layak dan berkualitas.



Baik cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan, maupun cakupan hunian layak dan berkualitas memiliki komponen/unsur pembentuk, yaitu:

- 1) Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang

Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi memiliki 8 komponen pembentuk, yaitu cakupan penyelenggaraan jalan, cakupan pengelolaan sda, cakupan penataan bangunan gedung, cakupan layanan air minum, cakupan layanan sanitasi air limbah domestik, cakupan layanan drainase lingkungan, cakupan infrastruktur pengelolaan persampahan, dan cakupan layanan penyelenggaran penataan ruang.

- 2) Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan atau cakupan penyelenggaran layanan perhubungan

Kinerja urusan perhubungan diukur melalui indikator cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan yang dibentuk oleh komponen/unsur persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sendiri merupakan komposit persentase layanan penyelenggaran angkutan dan persentase keamanan dan keselamatan lalu lintas.

- 3) Cakupan hunian layak dan berkelanjutan

Cakupan hunian layak dan berkualitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman. Indikator cakupan hunian layak dan berkualitas memiliki 2 komponen/unsur pembentuk, yaitu: Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Persentase penanganan kawasan Permukiman Kumuh

Di bawah ini, merupakan capaian cakupan pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Magelang tahun 2018-2022.



Tabel 2.32.
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang
Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	57,83	62,8	69,9	73,42*	73,42*
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	55,27	60,05	53,89	54,02	54,02
3.	Cakupan hunian layak dan berkelanjutan	%	-	-	-	-	69,94*
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah		%	56,55	61,43	61,9	63,72*	65,80*

Sumber : Hasil Olahan, 2023

Keterangan : *) data sementara

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur sebesar Rp157.909.089.280,00 dengan realisasi sebesar Rp155.442.548.597,00 (98,44%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengembangan Permukiman
6. Program Penataan Bangunan Gedung
7. Program Penyelenggaraan Jalan
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
11. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya



12. Program Pengembangan Perumahan
13. Program Kawasan Permukiman
14. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
15. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
16. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
17. Program peningkatan Pelayanan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

ix) Sasaran Strategis: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	4.529,30	4.306,14	4.667,15	4.967,87	5.887,55	5.381,88	91,41	6.227,11	86,43	
2 Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	6.997,70	6.914,81	7.086,93	7.486,55	8.449,56	7.913,20	93,65	8.875,03	89,16	
3 Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	7.157,40	7.266,33	7.794,55	8.628,27	9.122,20	9.632,91	105,60	9.613,39	100,20	
4 Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.416,24	1.274,04	1.366,00	1.675,34	1.844,05	1.675,34	90,85	1.951,00	85,87	*)
5 Pertumbuhan Investasi	persen	5,00	13,49	12,56	32,21	10	32,21	322,10	10,00	322,10	*)
6 Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	81,38	104,93	84,46	82,78	86,33	82,78	95,89	87,76	94,33	*)
7 Indeks Desa Membangun	Angka (0-1)	0,67	0,68	0,64	0,71	0,71	0,70	98,59	0,72	97,22	*)
Rata-rata Capaian Kinerja :								128,30		125,04	

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2024

Keterangan : *) Mengacu capaian tahun 2023



Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya daya saing ekonomi daerah pada tahun 2023 sebesar 128,30% (Sangat Tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 125,04% (Sangat Tinggi).

Sektor pariwisata tidak memiliki kategori khusus pada sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Magelang, akan tetapi sektor pariwisata dimasukkan ke dalam sektor lapangan usaha lain yang merepresentasikan kontribusi pariwisata, yaitu sektor penyedia akomodasi dan penyediaan makan minum. Subsektor penyedia akomodasi mencakup usaha penyediaan akomodasi jangka pendek seperti penginapan dan hotel, sedangkan subsektor penyedia makan minum meliputi pelayanan makan minum konsumsi seperti restoran.

Tabel 2.34.
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB
Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB ADHK Kabupaten Magelang	Miliar Rupiah	22.082,80	23.253,15	22.865,15	23.661,71	24.953,20
2	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Miliar Rupiah	940,61	1.017,36	936,02	988,28	1.163,01
3	Kontribusi Terhadap PDRB	Persen	4,3%	4,4%	4%	4,2%	4,7%
4	Pertumbuhan	Persen		8%	-8%	5,6%	17,7%

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka 2019-2023

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menggambarkan kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian wilayah. Sektor pertanian dalam PDRB memiliki subsektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Magelang, selama tahun 2018-2023 sektor pertanian pernah mengalami penurunan pada tahun 2021, hal ini berkontribusi terhadap penurunan terhadap PDRB Kabupaten Magelang.



Tabel 2.35.
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Magelang
Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB Kabupaten Magelang (%)	2,19	2,32	1,49	4,58	4,64

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang 2024

Berdasarkan data, terlihat bahwa setelah adanya pandemi Covid-19, kontribusi sektor akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Khususnya pada tahun 2022 kontribusi sektor akomodasi dan makan minum meningkat hingga 17,7 persen. Sektor pariwisata secara langsung dan tidak langsung memberikan *multiplier effect* lewat berbagai sektor ekonomi lain.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah sebesar Rp14.596.789.575,00 dengan realisasi sebesar Rp112.220.021.240,00 (82,72%).

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja pembangunan aspek daya saing adalah:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh OPD di Kabupaten Magelang;
- b. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dokumen perencanaan pembangunan berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- d. Adanya transparansi dalam tatakelola pemerintahan;
- e. Dukungan kompetensi SDM yang memadai;

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah: belum optimalnya peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif dikarenakan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan belum sepenuhnya tertata dengan baik.



Adaya pandemi *Covid-19* menimbulkan kerugian secara sosial ekonomi. Akibat yang terjadi saat ini di Kabupaten Magelang antara lain:

1. Aktivitas kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara menurun.
2. Industri *meeting, incentive, conference & exhibition* mengalami kelesuan
3. Pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran mengalami penurunan tingkat kunjungan
4. Sektor manufaktur, utamanya yang selama ini mengandalkan bahan baku impor mengalami kekurangan bahan baku
5. Sektor transportasi umum mengalami kelesuan
6. Terjadi inflasi pada barang-barang pabrikan
7. Naiknya harga-harga bahan pokok penting
8. Banyak orang kehilangan pekerjaan

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing ekonomi daerah sebesar Rp193.690.167.669,00 dengan realisasi Rp181.732.845.649,00 (93,83%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing ekonomi daerah terdiri dari:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
8. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
10. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
12. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
13. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14. Program Perizinan Usaha Pertanian
15. Program Penyuluhan Pertanian
16. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
17. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
18. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
19. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
20. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
21. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
22. Program Pemasaran Pariwisata
23. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
24. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
25. Program Pengembangan Kebudayaan
26. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
27. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
28. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
29. Program Promosi Penanaman Modal
30. Program Pelayanan Penanaman Modal
31. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
32. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
33. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
34. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
35. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
36. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya



- 37. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
- 38. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 39. Program Penanggulangan Bencana
- 40. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 41. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 42. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 43. Program Penataan Desa
- 44. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- 45. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 46. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 47. Program Perekonomian dan Pembangunan
- 48. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 49. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 50. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

x) Sasaran Strategis: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan

Tabel 2.36.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPJMD (2024)	
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai AKIP	-	60,33 (B)	61,13 (B)	62,25 (B)	69,00 (Baik)	63,04	91,36	71,00 (BB)	88,79
Rata-rata Capaian Kinerja :								91,36		88,79

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan pada tahun 2023 sebesar 90,23% (tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 88,79% (tinggi).



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sebesar 51,06 sedangkan di tahun 2019 berada di angka 59,05 (CC), tahun 2019 sebesar 60,10 (B), tahun 2020 sebesar 60,33 (B), tahun 2021 sebesar 61,13 dan tahun 2022 sebesar 62,25 (B).

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan sebesar Rp2.008.979.965.685,00 dengan realisasi Rp1.888.014.780.941,00 (93,98%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informasi
4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
10. Program Penyelenggaraan Pengawasan
11. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
12. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat



- xi) Sasaran strategis: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket	
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Angka (0-5)	2,19-2,30	2,94	2,67	3,13	3,21-3,40	3,13	97,51	3,41-3,6	91,79	*)
Rata-rata Capaian Kinerja :									97,51		91,79	

Sumber: Diskominfo Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2022 sebesar 97,51% (Sangat Tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 91,79% (Sangat Tinggi).

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pada tahun 2021, evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan mendasarkan pada PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, semula penghitungan SPBE mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan demikian terjadi perubahan nama indikator dari SPBE menjadi indeks tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan.

Di Kabupaten Magelang sebagai upaya pencapaian SPBE dalam mendukung *smart city* telah dilakukan beberapa upaya diantaranya:

- a) Pembentukan tim pengarah SPBE Kabupaten Magelang, melalui SK Bupati Magelang Nomor 180.182/381/KEP/15/2020 dengan tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Kabupaten Magelang dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.
- b) Harmonisasi kebijakan SPBE dengan provinsi dimana Kabupaten selalu mengikuti *issue* baik provinsi maupun nasional, untuk *issue* nasional hal paling awal yang dilakukan adalah membuat rancangan arsitektur SPBE dengan melibatkan OPD2 terkait, yang mengacu pada arsitektur SPBE nasional dan menggunakan *tool* yang sudah disediakan oleh nasional (*tool* tersebut release di akhir tahun 2022).
- c) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui sosialisasi KIM, pelatihan kepada KIM dan pemasaran hasil pelatihan KIM melalui pemasaran online dan OSS. Beberapa pelatihan yang sudah dilaksanakan diantaranya pelatihan *digital marketing*, budidaya anggrek, pembuatan pakan lele, dan pelatihan budi daya kambing.
- d) Rencana pembentukan tim CISRT (*Computer Security Incident Response Team*) di Kabupaten Magelang melalui Peraturan Bupati Magelang yang melibatkan Diskominfo dan agen siber di masing-masing PD. Upaya yang sudah dilakukan saat ini adalah sudah mengirimkan surat dan berkoordinasi dgn BSSN terkait tim CSIRT utk didaftarkan di BSSN.
- e) Dalam rangka pembangunan basis data dan penguatan pengelolaan statistik, Kabupaten Magelang telah mengembangkan portal satu data Kabupaten Magelang untuk mendukung Satu Data Indonesia dengan alamat <http://pusaka.magelangkab.go.id> sebagai sarana untuk mempublikasikan Data sektoral dari OPD di lingkup Pemkab Magelang sebagai produsen data, dimana didalamnya ada portal <http://opendata.magelangkab.go.id> yang sudah terintegrasi dengan <http://data.go.id> yang bisa dibagipakaikan (prinsip interoperabilitas).



Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp3.423.699.048,00 dengan realisasi Rp3.391.856.935,00 (99,07%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
3. Program Pendaftaran Penduduk
4. Program Pencatatan Sipil
5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Program Pengelolaan Arsip

xii) Sasaran Strategis: Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Opini BPK	.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00	
Rata-rata Capaian Kinerja :								100,00		100,00	

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2023



Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah pada tahun 2023 sebesar 100% (Sangat Tinggi) demikian juga capaian tahun-tahu sebelumnya mencapai 100%, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100% (Sangat Tinggi).

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.39.
Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024

Keterangan : *) data tahun sebelumnya

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang sejak tahun 2019 hingga 2023 selalu memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berarti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Diharapkan ke depannya hal ini bisa dipertahankan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik dan wajar sehingga terus memperoleh hasil WTP.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sebesar Rp696.078.381.395,00 dengan realisasi Rp673.691.839.302,00 (96,78%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



xiii) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPJMD (2024)		Ket
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	82,74	83,69	84,22	84,36 (Baik)	85,25 (Baik)	84,78	99,45	86,00	98,58	
Rata-rata Capaian Kinerja :								99,45		98,58	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2024 sebesar 99,45% (Sangat Tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 98,58% (Sangat Tinggi).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar Rp651.945.573,00 dengan realisasi Rp625.807.100,00 (95,99%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



xiv) Sasaran strategis: Meningkatkan Kinerja Sistem Manajemen Kepegawaian

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kinerja Sistem Manajemen Kepegawaian Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2023			Akhir RPMJD (2024)		Ket	
			2020	2021	2022	Target	Capaian	%	Target	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Indeks Sistem Merit	-	0,49	0,60	0,64	0,64	0,70	0,71	101,43	0,76	93,42	
Rata-rata Capaian Kinerja :									101,43		93,42	

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian pada tahun 2023 sebesar 10143% (Sangat Tinggi), dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 (105,45%) maka mengalami peningkatan sebesar 0,22%, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 93,42%.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, sistem merit merupakan sebuah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sudah berusaha menerapkan merit sistem secara proporsional.

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem manajemen kepegawaian, menghasilkan SDM ASN yang netral, sistematis, berintegritas, dan kompeten. Pelaksanaannya dengan mengoptimalkan pada delapan aspek manajemen ASN yang meliputi 1) perencanaan kebutuhan, 2) pengadaan, 3) pengembangan karir, 4) promosi dan sistem, 5) manajemen kinerja, 6) penggajian, penghargaan dan disiplin, 7) perlindungan dan pelayanan, serta 8) sistem informasi.



Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah dinilai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tahun 2021 hasil penilaiannya masuk dalam kategori III (tiga) atau mendapatkan nilai baik dengan jumlah nilai 262 (dua ratus enam puluh dua) dengan indeks 0,64 (nol koma enam empat). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 16/KEP.KASN/C/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021. Ini merupakan hasil penilaian dan klarifikasi oleh Komisi ASN sejak tahun 2020.

Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 46/KEP.KASN/C/ VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 menetapkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang pada kategori III dengan predikat Baik pada indeks 0,71. Rekomendasi KASN tahun 2023 atas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan kategori penilaian tersebut dapat disetujui untuk dikecualikan dari ketentuan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki dan/atau telah melakukan penyempurnaan terhadap talent pool, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karir instansi yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui talent pool dan rencana suksesi serta berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Rekomendasi masih sama dengan rekomendasi tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nilai Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29, pada tahun 2018 sebesar 63, dan pada tahun 2019 sebesar 63. Angka IP ASN tahun 2018 dan 2019 lebih kecil daripada tahun 2017. Angka ini tidak bisa dibandingkan karena terjadi perubahan rumus dan cara perhitungan nilai IP pada tahun 2017 dan tahun 2018/2019.



Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nilai Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29, pada tahun 2018 sebesar 63, dan pada tahun 2019 sebesar 63. Angka IP ASN tahun 2018 dan 2019 lebih kecil daripada tahun 2017. Angka ini tidak bisa dibandingkan karena terjadi perubahan rumus dan cara perhitungan nilai IP pada tahun 2017 dan tahun 2018/2019.

Sementara nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2020 mencapai 63, tahun 2021 mencapai 53, tahun 2022 mencapai 46,26 dan tahun 2023 mencapai nilai 76,23. Angka tersebut menunjukkan bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena:

1. Beberapa peserta diklat/bintek mendapat biaya sharing dari penyelenggara sehingga efisiensi atas biaya tersebut dapat digunakan untuk menambah peserta yang dikirim bintek/diklat. Hal ini mendongkrak capaian jumlah peserta yang dapat dikirim melebihi target yang direncanakan.
2. Data pengembangan kompetensi ASN dengan biaya non APBD (biaya mandiri) sudah terupdate dalam database kepegawaian, terutama data diklat dan bintek yang dilaksanakan ASN secara mandiri sudah ASN dilaporkan diklat/bintek diikutinya melalui Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (Sipgan). Hal ini menyebabkan peningkatan nilai pada komponen kompetensi ASN yang mendongkrak peningkatan nilai IP ASN. Bobot komponen kompetensi dalam penghitungan IP ASN adalah 40%.
3. Pemerintah Kabupaten Magelang berhasil mengintegrasikan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (Sipgan) dengan Sistem Informasi ASN BKN (SI ASN) sehingga data yang terupdate di Sipgan sudah otomatis *update* di SI ASN.



Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian sebesar Rp.5.404.805.283,00 dengan realisasi Rp5.404.805.283,00 (97,24%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian adalah Program Kepegawaian Daerah

c. Analisis Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumber daya maka perlu dilakukan analisis efesensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam analisis efesensi dilakukan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran untuk yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut.

Penghitungan analisis efesensi dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja dengan capaian mencapai 100% atau lebih. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja yang tidak mencapai 100% tidak dilakukan analisis efesensi.

Tingkat efesensi pencapaian kinerja dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar 5,84% dibandingkan dengan efesensi pada tahun 2022 (8,23%) makan mengalami penurunan sebesar 2,39%, efesensi ini belum menunjukkan efesensi penggunaan anggaran secara riil. Hal ini dikarenakan sisa anggaran belum tentu adanya efesensi dalam penggunaan anggaran tetapi dimungkinkan kegiatan yang direncana tidak terlaksana dan rendahnya serapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Analisis efesensi dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.42.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efiseiensi							
				Program	Anggaran	Realisasi	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
A	MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia														
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,75											
					1	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	96,42	Program Pengelolaan Pendidikan	219.594.224.102	214.264.907.477	97,57	TE	
							2	Harapan Lama Sekolah	99,84	1	Program Pembinaan Perpustakaan	642.487.045	632.785.606	98,49	TE
										2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.940.906.050	2.711.842.974	92,21	TE
										3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	37.483.090.266	36.995.327.320	98,7	TE
	4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	220.000.000	219.965.060	99,98	TE									
	3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	96,75	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.312.775.840	24.031.853.196	91,33	TE							
	2	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	100,46	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	129.201.997.634	116.685.100.432	90,31	9,69				
						2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.074.482.710	2.818.001.838	91,66	8,34				
						3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	344.016.000	312.944.967	90,97	9,03				
4						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.925.873.503	1.752.476.040	91	9					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efisiensi	
					Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
2	Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat	2	Inflasi	37,75						
		3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	107,79						
		4	Angka Kemiskinan	97,38						
	3	Menurunnya jumlah PMKS	5	Persentase penurunan PMKS	98,28	Program Pemberdayaan Sosial	313.901.500	309.780.820	98,69	1,31
						Program Rehabilitasi Sosial	3.581.212.280	2.777.515.580	77,56	22,44
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.295.141.157	9.150.035.862	98,44	1,56
						Program Penanganan Bencana	380.000.000	361.856.909	95,23	4,77
	4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6	Indeks Ketahanan Pangan	97,39	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	907.849.910	863.658.802	95,13	TE
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	72.600.000	51.261.464	70,61	TE
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	119.975.460	112.424.150	93,71	TE
6	Terkendalinya Tingkat Pengangguran Terbuka	7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	52,67	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.543.790.190	2.254.152.198	88,61	TE	
					Program Penempatan Tenaga Kerja	844.815.000	816.303.051	96,63	TE	
					Program Hubungan Industrial	548.000.000	373.978.129	68,24	TE	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efisiensi			
				Program	Anggaran	Realisasi	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender	5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,36							
		7	Meningkatnya keberdayaan gender	8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	131,30	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	280.000.000	273.188.500	97,57	TE
						Program Perlindungan Perempuan	250.000.000	216.827.398	86,73	TE	
						Program Pengendalian Penduduk	640.050.000	639.894.728	99,98	TE	
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.015.959.000	9.989.721.126	90,68	TE	
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.844.700.000	6.833.758.790	99,84	TE	
		9	Kategori Kabupaten Layak Anak	100,00	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	252.508.960	248.584.802	98,45	1,55		
Program Perlindungan Khusus Anak	253.750.000			210.812.305	83,08	16,92					
B	MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup										
1	Meningkatnya Daya Saing Daerah	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	144,00							
		7	PDRB Per Kapita	89,02							
		8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	93,93							
	8	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	10	Indeks Kesehatan Lingkungan Hidup (IKLH)	92,21	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	148.215.835	61.238.803	41,32	TE	
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	504.000.000	497.579.220	98,73	TE		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efisiensi
				Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.047.724.000	1.033.006.400	98,6	TE
				Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	2.545.000.000	2.468.052.876	96,98	TE
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	380.000.000	371.467.523	97,75	TE
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	80.000.000	79.640.610	99,55	TE
				Program Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	557.891.075	554.433.421	99,38	TE
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	519.322.500	517.086.664	99,57	TE
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	40.000.000	39.801.370	99,5	TE
				Program Pengelolaan Persampahan	12.206.094.000	11.566.115.332	94,76	TE
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	88.677.500	88.459.130	99,75	TE



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		% capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2		3		4	5	6	7	8	9
9	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	11	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	93,88	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.613.033.233	6.510.382.625	98,45	TE	
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.396.892.250	12.348.567.151	99,61	TE	
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.305.760.500	3.299.351.884	99,81	TE	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.195.758.000	7.190.659.394	99,93	TE	
					Program Pengembangan Permukiman	83.675.000	67.480.415	80,65	TE	
					Program Penataan Bangunan Gedung	17.537.941.618	17.464.904.140	99,58	TE	
					Program Penyelenggaraan Jalan	73.757.342.900	72.716.925.842	98,59	TE	
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	186.589.595	186.114.250	99,75	TE	
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	537.389.680	394.261.038	73,37	TE	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	995.437.908	953.795.226	95,82	TE	
					Program Penataan dan Bangunan Lingkungannya	3.120.817.091	2.442.669.212	78,27	TE	
					Program Pengembangan Perumahan	406.391.434	316.987.914	78	TE	
					Program Kawasan Permukiman	506.567.500	496.846.425	98,08	TE	
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	327.900.000	319.425.063	97,42	TE	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		% capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2		3		4	5	6	7	8	9
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100.000.000	63.254.382	63,25	TE
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	30.823.992.571	30.662.298.136	99,48	TE
						Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.600.000	8.625.500	63,42	TE
10	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah		12	Nilai PDRB sektor perdagangan	91,41	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	5.000.000	4.833.720	96,67	TE
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7.541.641.925	7.049.402.363	93,47	TE
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.158.000.000	1.155.604.902	99,79	TE
						Program Pengembangan Ekspor	1.329.430.000	1.318.733.677	99,2	TE
						Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	636.300.000	631.966.315	99,32	TE
						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	520.000.000	516.377.260	99,3	TE
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	199.200.000	195.547.100	98,17	TE
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	130.700.000	127.892.000	97,85	TE
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.258.570.000	1.238.715.965	98,42	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efisiensi	
				Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		13	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	93,65	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.471.498.224	5.216.470.694	95,34	TE
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	18.815.452.000	17.838.775.134	94,81	TE
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	727.942.125	681.112.662	93,57	TE
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	133.000.000	121.937.880	91,68	TE
					Program Perizinan Usaha Pertanian	41.000.000	40.718.252	99,31	TE
					Program Penyuluhan Pertanian	856.806.345	850.246.088	99,23	TE
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.082.915.617	998.811.405	92,23	TE
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	277.981.500	275.747.369	99,2	TE
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	34.650.000	31.899.319	92,06	TE
		14	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	105,60	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.134.089.950	3.212.282.949	77,7	TE
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	35.000.000	26.246.109	74,99	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efisiensi
				Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15 Nilai PDRB sektor pariwisata	90,85	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	17.681.672.629	16.048.957.875	90,77	TE
				Program Pemasaran Pariwisata	1.613.000.000	1.612.022.051	99,94	TE
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	87.565.000	87.517.950	99,95	TE
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.212.625.287	1.211.968.243	99,95	TE
				Program Pengembangan Kebudayaan	395.000.000	360.215.000	91,19	TE
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	3.066.962.500	2.913.523.729	95	TE
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	250.000.000	249.521.206	99,81	TE
		16 Pertumbuhan Investasi	322,10	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	60.000.000	57.351.230	95,59	4,41
				Program Promosi Penanaman Modal	110.000.000	109.537.520	99,58	0,42
				Program Pelayanan Penanaman Modal	263.702.000	260.958.247	98,96	1,04
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	611.914.000	589.848.045	96,39	3,61
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	35.000.000	34.967.014	99,91	0,09



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efisiensi
				Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		17 Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	95,89	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.642.310.250	1.621.173.129	98,71	TE
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.426.731.000	1.299.533.575	91,08	TE
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	33.884.677.130	33.620.807.195	99,22	TE
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	85.900.000	80.588.786	93,82	TE
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.586.900.000	1.195.279.345	75,32	TE
				Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum	5.175.356.000	4.794.822.138	92,65	TE
				Program Penanggulangan Bencana	2.410.224.250	2.367.960.333	98,25	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efisiensi
				Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18 Indeks Desa Membangun	98,59	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	11.422.470.500	11.168.758.095	97,78	TE
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.658.303.764	6.368.293.192	95,64	TE
				Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5.708.351.150	5.552.439.392	97,27	TE
				Program Penataan Desa	190.222.850	184.261.885	96,87	TE
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	99.994.830	80.747.915	80,75	TE
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	24.738.335.204	24.520.432.525	99,12	TE
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	20.360.166.750	15.449.446.172	75,88	TE
				Program Perekonomian dan Pembangunan	1.162.566.945	1.123.004.259	96,6	TE
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.373.676.904	6.316.473.904	99,1	TE
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	827.361.040	810.282.223	97,94	TE
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	160.000.000	108.832.313	68,02	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efiseiensi		
				Program	Anggaran	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
C	MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah									
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	95,39						
	11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	19	Nilai AKIP	91,36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.296.174.178.423	1.198.582.622.998	92,47	TE
						Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.896.648.140	1.826.769.451	96,32	TE
						Program Pengelolaan Aplikasi Informasi	6.765.175.660	6.750.739.110	99,79	TE
						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.744.643.415	1.512.443.534	86,69	TE
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	681.794.194.118	660.282.627.629	96,84	TE
						Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	913.437.286	888.432.275	97,26	TE
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.592.388.320	3.446.236.842	95,93	TE
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.690.254.266	1.619.392.958	95,81	TE
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.691.798.957	9.962.974.831	93,18	TE
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	680.985.000	454.976.222	66,81	TE
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.636.262.100	2.310.828.156	87,66	TE
						Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	400.000.000	376.736.935	94,18	TE



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2023				Tingkat Efiseinsi
				Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	20 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	97,51	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.043.000	170.849.279	97,6	TE
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	966.592.770	951.723.153	98,46	TE
				Program Pendaftaran Penduduk	729.993.320	724.390.116	99,23	TE
				Program Pencatatan Sipil	596.000.000	589.918.492	98,98	TE
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	764.514.543	763.813.230	99,91	TE
				Program Pengelolaan Arsip	191.555.415	191.162.665	99,79	TE
13	Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	21 Opini BPK	100,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	681.794.194.118	660.282.627.629	96,84	3,16
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.592.388.320	3.446.236.842	95,93	4,07
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.691.798.957	9.962.974.831	93,18	6,82
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	22 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,45	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	651.945.573	625.807.100	95,99	TE
15	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	23 Indeks Sistem Merit	101,43	Program Kepegawaian Daerah	5.404.805.283	5.255.895.230	97,24	2,76
Jumlah :					2.848.060.704.055	2.687.174.168.480	94,35	5,84

Sumber : Sekretariat Daerah dan BPPKAD, Data diolah, 2024

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN



LPPD KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.



3.1.1. Target Kinerja

Pada Tahun 2023 Kabupaten Magelang tidak melaksanakan Tugas Pembantuan Mandiri. Kabupaten Magelang hanya melaksanakan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggaran sebesar Rp5.811.306.000,00. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang menjalankan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah melalui Program Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Adapun kegiatan dalam program tersebut meliputi: Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dalam bentuk Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Dataran Tinggi (UPLAND) yang dilaksanakan pada 3 Kawasan di 5 Kecamatan, yaitu Bandongan, Grabag, Sawangan, Kaliangkrik, dan Tempuran; kegiatan Pengawasan Alat Mesin Pertanian berupa Bintek Monev dan Evaluasi Lingkup Alat Mesin Pertanian di 21 kecamatan; kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida berupa Bimtek, monitoring, dan evaluasi lingkup pupuk dan pestisida di 21 kecamatan; serta kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian berupa asuransi pertanian untuk 19 kecamatan.
- b. Program Dukungan Manajemen
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan diwujudkan dalam bentuk Layanan Manajemen Kerja Internal.

3.1.2. Realisasi Kinerja

Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan Kabupaten Magelang mempunyai anggaran sebesar Rp5.811.306.000,00. dengan realisasi keuangan sebesar Rp5.561.369.750,00 atau sebesar 95,70% dan realisasi fisik sebesar 100%. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Magelang sebagaimana pada tabel 3.1.



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Kementerian/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kementerian Pertanian	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA: 018.08.4.039158/2023 tanggal 30 November 2022	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kabupaten Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan					
			1) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	3 Kawasan 5 Kecamatan (Bandongan, Grabag, Sawangan, Kaliangkrik, Tempuran)		5.656.330.000	5.407.645.000	96	97 kelompok tani	100
			Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Dataran Tinggi (UPLAND)							
			2) Pengawasan Alat Mesin Pertanian	21 kecamatan		15.000.000	14.960.000	99,73	1 paket	100
			Bimtek Monev dan Evaluasi Lingkup Alat Mesin Pertanian							
			3) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	21 kecamatan		67.753.000	67.433.000	99,53	1 paket	100
			Bimtek, monitoring, dan evaluasi lingkup pupuk dan pestisida							
			4) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	19 kecamatan		16.048.000	15.978.000	99,56	1 paket	100
			Asuransi Pertanian							



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

No	Kementerian/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Program Dukungan Managemen	Kabupaten Magelang							
			1) Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			56.175.000	55.353.750	98,54	1 paket	100	
			Layanan Managemen Kerja Internal								
			Jumlah Total				5.811.306.000	5.561.369.750	95,70		100

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024



3.2. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

3.2.1. Target Kinerja

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kabupaten Magelang sebesar Rp 84.499.100.000,00 terdiri dari:

- a. Operasional KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebesar Rp1.835.000.000,00 yang diberikan kepada 367 desa masing-masing Rp 5.000.000. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.660.000.000,00 dan realisasi fisik sebanyak 332 desa.
- b. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa untuk Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp150.000.000 yang diberikan kepada 15 desa @Rp10.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp150.000.000,- dan realisasi fisik sebanyak 15 desa.
- c. Peningkatan sarana prasarana pedesaan sebanyak 798 titik lokasi dengan anggaran sebesar Rp70.434.100.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp70.214.100.000,00 dan realisasi fisik sebanyak 794 titik.
- d. Pengembangan Desa Wisata ditujukan pada 8 desa sebesar Rp1.200.000.000,00. Kegiatan dilaksanakan di 6 desa dengan realisasi anggaran Rp1.000.000.000,00. Pengembangan desa wisata berlokasi di Desa Majaksingi dan Ngargogondo Kecamatan Borobudur, Desa Banyubiru Kecamatan Dukun, Desa Ngawen Kecamatan Muntilan, Desa Jamus Kauman Kecamatan Ngluwar, dan Desa Temanggal Kecamatan Tempuran.
- e. RTLH sejumlah 544 unit berlokasi di 89 desa dengan anggaran sebesar Rp 10.880.000.000,00.

3.2.2. Realisasi Kinerja

Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya yang dilaksanakan Kabupaten Magelang mempunyai anggaran sebesar Rp84.499.100.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp83.904.100.000,00 atau sebesar 99,30% dan realisasi fisik sebesar 95,16%. Matriks Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya di Kabupaten Magelang sebagaimana pada tabel 3.2.



Tabel 3.2

Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa se-Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perubahan DPA-Bankeu Kab/Kota Nomor : 01810/DPPA/2023	1) Operasional KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	367 desa	Dispermades	1.835.000.000	1.660.000.000	90,46	332 desa	90,46
			2) Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa untuk Penyertaan Modal BUMDesa	15 desa		150.000.000	150.000.000	100	15 desa	100
			3) peningkatan sapsras perdesaan	798 lokasi		70.434.100.000	70.214.100.000	99,69	794 lokasi	99,50
2	Pariwisata	Perubahan DPA-Bankeu Kab/Kota Nomor : 01810/DPPA/2023	Pengembangan desa wisata	8 desa di 6 Kecamatan 1) Kec. Borobudur a) Majaksingi b) Ngargogondo 2) Kec. Dukun Desa Banyubiru 3) Kec. Muntilan Desa Ngawen 4) Kec. Ngluwar Desa Jamus Kauman 5) Kec. Tempuran a) Temanggal b) Prajeksari 6) Kec. Kaliangkrik Desa Ngargosoko	Disparpora	1.200.000.000	1.000.000.000	83,33	6 desa	85,83
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perubahan DPA-Bankeu Kab/Kota Nomor : 01810/DPPA/2023	Peningkatan Kualitas RTLH di Perdesaan	89 desa	DPRKP	10.880.000.000	10.880.000.000	100	544 unit	100
Jumlah						84.499.100.000	83.904.100.000	99,30		95,16

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024



Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2023 memberikan bantuan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebesar Rp47.699.140.000,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Jenis bantuan keuangan terdiri atas pembangunan atau rehabilitasi jalan desa, jalan usaha tani, jembatan desa, jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier, sarana dan prasarana air bersih pedesaan, pengadaan mobil ambulan desa, bantuan operasional PAUD, operasional posyandu balita dan posyandu lansia dan penyertaan modal BUMDes untuk pengembangan Kawasan Perdesaan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari kepada Pemerintah Kabupaten Magelang kepada pemerintah desa sebesar Rp47.699.140.000,00 dengan realisasi keuangan Rp46.155.140.000,00 atau sebesar 96,76%.

3.3. Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pada Kegiatan Pengembangan Hortikultura dijumpai kendala dan permasalahan, antara lain:

1. Proses penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) terlambat karena adanya perubahan-perubahan kebijakan.
2. Pengadaan barang mendekati waktu tanam dan mendekati akhir tahun anggaran.
3. Keterbatasan SDM petani dalam budidaya yang sesuai dengan norma budidaya tanaman yang baik.
4. Kurang dinamisnya Kelompok Tani dalam penyusunan RDK (Rencana Definitif Kelompok) dan RDKK (Rencana Definitifnya Kebutuhan Kelompok).
5. Cakupan lokasi dan jumlah kelompok tani/kelompok peserta kegiatan UPLAND yang cukup besar.
6. Rentang waktu dan anggaran yang cukup banyak.
7. Multi komoditas yang ditangani membutuhkan kerjasama lintas sektor baik ditingkat internal Dinas Pertanian dan Pangan maupun dengan Dinas lain yang terkait.
8. Tahapan kegiatan yang difasilitasi meliputi semua aspek kegiatan dari hulu sampai hilir termasuk di dalamnya adalah penguatan kelembagaan, budidaya, panen dan pasca panen, pasar dan pembiayaan. Semua aspek terkait usaha tani untuk komoditas padi organik yang difasilitasi akan ditangani sehingga hal ini sangat membutuhkan upaya, komitmen dan konsistensi pengelolaan yang baik agar semua aspek tersebut dapat terlaksana dengan baik menjadi satu kesatuan kegiatan yang saling mendukung dan terintegrasi.



3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Upaya penyelesaian permasalahan di atas, antara lain:

1. Penetapan CPCL dilaksanakan pada akhir bulan Desember dan kelompok tani penerima bantuan diprioritaskan kelompok tani yang belum pernah memperoleh bantuan;
2. Untuk mengatasi keterbatasan SDM petani dalam budidaya akan dilaksanakan Sekolah Lapang *Good Agriculture Practices* dan Bimtek *Good Handling Practices* dengan anggaran dari APBD Kabupaten (Anggaran DBHCHT);
3. Pendampingan yang lebih intensif ke kelompok tani dalam hal penyusunan RDK dan RDKK dan tugas fungsi kelompok tani lainnya.
4. Koordinasi yang lebih efektif dan lebih optimal dengan seluruh stakeholder kegiatan UPLAND antara lain dengan petani, kelompok tani, aparat desa, tokoh masyarakat, aparat kecamatan, fasilitator desa, penyuluh pertanian, petugas teknis dan bidang terkait. Selain itu lebih mengintensifkan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Dinas lain baik di Kabupaten, Provinsi maupun dengan PMU. Koordinasi ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan membangun komitmen bersama dalam pengawalan kegiatan dan program. Selain itu, koordinasi yang lebih intensif dan mengoptimalkan konsultan supervisi, serta konsultan lainnya, baik keuangan maupun konsultan manajemen untuk pengawalan pelaksanaan program.
5. Memberikan sosialisasi dan pembekalan terkait kegiatan dan tata cara pengelolaan yang diatur dalam petunjuk teknis kegiatan kepada petani, penyuluh dan pendamping lapangan fasilitator desa dan petugas *on granting officer*.
6. Optimalisasi Tim UPLAND yang sudah ditetapkan
Peran dan fungsi secara optimal setiap tim yang ada sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan dan pengawalan kegiatan UPLAND. Hal ini mengingat cakupan baik lokasi, peserta dan anggaran kegiatan UPLAND yang cukup banyak/luas.
7. Peningkatan kemampuan teknis bagi petani, *refresher* bagi penyuluh pertanian dan pembekalan pengetahuan teknis bagi fasilitator desa. Tindak lanjut ini sangat penting untuk memperkuat pelaksanaan dan keberhasilan penanganan komoditas agar dapat memberikan *output* atau keluaran serta manfaat seperti yang sudah ditetapkan.



8. Sistem pelaporan yang baik dan terintegrasi

Semua aspek pengelolaan kegiatan dipertanggungjawabkan oleh masing masing pengampu dalam bentuk pelaporan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh kelompok tani, pelaporan kegiatan fasilitator desa, petugas *on granting officer*, *manager* dan penyuluh pertanian maupun pelaporan kegiatan tingkat kabupaten oleh pengelola kegiatan oleh PIU. Di waktu yang akan datang diharapkan terbangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar pelaporan lebih cepat, mudah dan akuntabel.

9. Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan.

Monitoring dan evaluasi atas kinerja, pelaksanaan dan pemantauan/pendampingan yang dilakukan menjadi kunci untuk perbaikan dan keberhasilan kegiatan. Monitoring dilakukan secara berkala baik oleh pengelola kegiatan di kabupaten, provinsi maupun dari pusat.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



LPPD KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa, dan SDM sesuai dengan standar teknis yang diberikan bobot sebesar 20%. Sementara capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja yang diberikan bobot 80%.

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- a. Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia)
- b. Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

$$IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times BM) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times BP)$$

Keterangan:

IP_{SPM}	=	Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	=	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis
Persentase pencapaian penerima layanan dasar	=	Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan di dalam lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
BM	=	Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
BP	=	Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80



Dengan adanya indeks pencapaian ini, memberikan kategori terhadap pencapaian SPM, yaitu: Tuntas Paripurna, Tuntas Utama, Tuntas Madya, Tuntas Pratama, Tuntas Muda dan Belum Tuntas sesuai ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah yang dijabarkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM})

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	2	3	4
1.	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2.	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3.	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4.	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5.	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6.	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM

Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal terdiri dari Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Urusan Sosial.

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pelayanan dasar di Bidang Urusan Pendidikan merupakan penjabaran target yang telah ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yaitu:



- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Target pencapaian indikator SPM Bidang urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	37.965 Orang	Setiap tahun	Angka partisipasi sekolah	100%	Setiap tahun	27.554.481.508
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	78,25%	Setiap tahun	
					Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	74,19%	Setiap tahun	
					Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	4%	Setiap tahun	
					Indeks distribusi guru	0,41%	Setiap tahun	
					Proporsi PTK bersertifikat	48,2%	Setiap tahun	
					Proporsi PTK penggerak	0,04%	Setiap tahun	
					Pengalaman pelatihan guru	0,24%	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	182.890 Orang	Setiap tahun	SD			185.678.539.304
					Angka partisipasi kasar	100%	Setiap tahun	
					Angka partisipasi sekolah	100%	Setiap tahun	
					Angka partisipasi murni	100%	Setiap tahun	
					Kemampuan literasi	64,37%	Setiap tahun	
					Kemampuan numerasi	46,75%	Setiap tahun	
					Perbedaan Skor Literasi	3,84%	Setiap tahun	
					Perbedaan Skor numerasi	2,14%	Setiap tahun	
					Indeks iklim keamanan	74,69%	Setiap tahun	
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	67,09%	Setiap tahun	
					Kecukupan formasi guru ASN	50%	Setiap tahun	
					Indeks distribusi guru	0,36%	Setiap tahun	
					Proporsi PTK bersertifikat	94%	Setiap tahun	
					Proporsi PTK penggerak	0,14%	Setiap tahun	
					Pengalaman pelatihan guru	84,5%	Setiap tahun	
					SMP			
					Angka partisipasi kasar	100%	Setiap tahun	
					Angka partisipasi sekolah	100%	Setiap tahun	
					Angka partisipasi murni	100%	Setiap tahun	
					Kemampuan literasi	76,22%	Setiap tahun	
					Kemampuan numerasi	75,49%	Setiap tahun	
					Perbedaan skor literasi	3,53%	Setiap tahun	
					Perbedaan skor numerasi	1,39%	Setiap tahun	
					Indeks iklim keamanan	72,50%	Setiap tahun	
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	65,12%	Setiap tahun	
					Kecukupan formasi guru ASN	50%	Setiap tahun	
					Indeks distribusi guru	0,34%	Setiap tahun	
					Proporsi PTK bersertifikat	91,3%	Setiap tahun	
					Proporsi PTK penggerak	0,09%	Setiap tahun	
					Pengalaman pelatihan guru	45,2%	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.915 orang	Setiap tahun	Angka Partisipasi Sekolah	12,3%	Setiap tahun	6.361.203.290
					Kemampuan literasi	71,26%	Setiap tahun	
					Kemampuan numerasi	55,47%	Setiap tahun	
					Perbedaan skor literasi	5,16%	Setiap tahun	
					Perbedaan skor numerasi	3,22%	Setiap tahun	
					Indeks iklim keamanan	65,38%	Setiap tahun	
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	65,28%	Setiap tahun	
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya								26.312.775.840
Jumlah								245.906.999.942

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024

Pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia menjadi salah satu upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan menjadi empat negara besar ekonomi dunia pada 2045. Namun, secara holistik, pemerintah daerah masih memiliki tantangan dalam mengidentifikasi dan merefleksikan capaian kualitas pendidikan di daerah dan belum ada solusi pembenahan yang nyata. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merilis Rapor Pendidikan Daerah versi 2.0 untuk membantu pemerintah daerah mengevaluasi kualitas pendidikan di daerahnya secara detail, sehingga dapat membantu melakukan perencanaan berbasis data dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Rapor Pendidikan Daerah versi 2.0 ini menunjukkan indikator utama yang digunakan untuk mengukur Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau skor capaian pendidikan.



SPM Pendidikan ini dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah. Rapor Pendidikan adalah platform yang mengintegrasikan berbagai data pendidikan, terutama data Asesmen Nasional (AN), sehingga menjadi alat ukur komprehensif yang menyajikan kondisi pendidikan Indonesia guna mendorong refleksi dan perbaikan mutu pendidikan. AN dapat memotret kualitas hasil belajar, proses, serta lingkungan belajar sebagai refleksi kondisi mutu layanan pendidikan. AN mengukur instrumen kunci seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), dan Survei Karakter untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketiga instrumen tersebut menjadi kompetensi dasar untuk mendorong pembelajar sepanjang hayat, berkontribusi pada masyarakat, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Di samping itu, Sulingjar dapat menjadi dasar dalam mendiagnosis tantangan di satuan pendidikan dan merencanakan pembenahan.

4.1.3. Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM bidang urusan Pendidikan berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2023, terdiri dari:

Tabel 4.3.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4		5
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	9.393.929.508	0	18.160.552.000	0
2.	Pendidikan Dasar	10.508.998.771	0	175.169.550.533	0
3.	Pendidikan Kesetaraan	614.103.290	0	5.747.1000	0
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.174.596.040	0	0	0
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.138.179.800			
	Jumlah	46.829.797.409	0	199.077.202.533	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024



Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp245.906.999.942,00. Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Pendidikan pada tahun 2023 berasal dari APBD dan DAK, baik DAK Fisik maupun Non Fisik.

4.1.4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan meliputi:

Tabel 4.4.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Strata 2 (S2)	305
2.	Strata 1/D4 (S1)	9.995
3.	Diploma 3 (D3)	201
5.	Diploma 2 (D2)	170
6.	Diploma 1 (D1)	64
7.	SMA	2.133
8.	SMP	215
9.	SD	150
10.	Lainnya	145
Jumlah		13.378

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan sebanyak 13.378 orang terdiri dari personil pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dan satuan pendidikan serta dukungan Pemerintah dan juga tak bisa lepas dari dukungan masyarakat.

4.1.5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 4.5.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	37.965	33.733	90,70	27.554.481.508	26.721.318.952	96,98
2.	Pendidikan Dasar	182.890	168.937	93,42	185.678.539.304	181.670.304.378	97,84
3.	Pendidikan Kesetaraan	4.915	4.915	100	6.361.203.290	5.805.497.411	91,26
					25.174.596.040	22.978.618.246	91,28
					1.138.179.800	1.053.234.950	92,54
Jumlah				94,71	245.906.999.942	238.228.973.937	96,88

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Pendidikan mencapai 96,88%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023 berdasarkan penghitungan per jenis pelayanan dasar berikut ini.

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 4.6.
Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	37.965	33.733	88,85	71,08
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Angka partisipasi sekolah	100%	86,28%	86,28	17,25
2.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	78,25%	78,22%	99,26	19,99
3.	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	74,19%	73,19%	98,65	19,73
4.	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	4%	4%	100	20,00
5.	Indeks distribusi guru	0,41%	0,41%	100	20,00
6.	Proporsi bersertifikat PTK	48,2%	48,2%	100	20,00
7.	Proporsi PTK penggerak	0,04%	0,04%	100	20,00
8.	Pengalaman pelatihan guru	0,24%	0,24%	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,62

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan Tabel di atas IPSPM Penerima Layanan Dasar Anak Usia Dini dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk usia 5-6 berjumlah 37.965 jiwa sedangkan yang terlayani 33.733 jiwa (88,85%), dapat diartikan sejumlah 4.232 jiwa (10,15%) penduduk Kabupaten Magelang usia 5-6 belum terlayani dikarenakan minat masyarakat/kesadaran masyarakat untuk memasukan putra putrinya ke Lembaga PAUD masih kurang, selain itu juga disebabkan karena faktor ekonomi, Terkait Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Anak Usia Dini proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B terealisasi 78,22% dari target 78,25% atau mencapai 99,96 dari target di Tahun 2023. Sedangkan untuk kualitas tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV terealisasi 73,19% dari target 74,19 atau mencapai 98,65% dari target di tahun 2023, hal itu dikarenakan masih banyak yang sedang menyelesaikan pendidikan S1 nya.

2) Pendidikan Dasar

Tabel 4.7.
Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)		
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)				
1	2	3	4	5	6		
1.	Pendidikan Dasar	182.890	168.937	92,37	73,90		
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)		
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia			3	4
	SD						
1.	Angka Partisipasi Kasar	100%	90,8%	90,80	18,04		
2.	Angka Partisipasi Sekolah	100%	99,79%	99,79	19,96		
3.	Angka Partisipasi Murni	100%	85,04%	85,04	17,00		
4.	Kemampuan literasi	64,37%	82,72%	100	20,00		
5.	Kemampuan numerasi	46,75%	66,43%	100	20,00		
6.	Perbedaan Skor Literasi	3,84%	3,84%	100	20,00		
7.	Perbedaan Skor numerasi	2,14%	2,14%	100	20,00		
8.	Indeks iklim keamanan	74,69%	71,15%	96,26	19,05		
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	67,09%	71,62%	100	20,00		
10.	Kecukupan formasi guru ASN	50%	50%	100	20,00		
11.	Indeks distribusi guru	0,36%	0,36%	100	20,00		
12.	Proporsi PTK bersertifikat	94%	94%	100	20,00		
13.	Proporsi PTK penggerak	0,14%	0,14%	100	20,00		
14.	Pengalaman pelatihan guru	84,5%	84,5%	100	20,00		



	SMP				
1.	Angka Partisipasi Kasar	100%	103,06%	100	20,00
2.	Angka Partisipasi Sekolah	100%	97,69%	97,69	19,54
3.	Angka Partisipasi Murni	100%	82,61%	82,61	16,52
4.	Kemampuan literasi	76,22%	86,15%	100	20,00
5.	Kemampuan numerasi	75,49%	65,26%	86,45	17,29
6.	Perbedaan skor literasi	3,53%	3,53%	100	20,00
7.	Perbedaan skor numerasi	1,39%	1,39%	100	20,00
8.	Indeks iklim keamanan	72,50%	69,19%	95,43	19,08
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	65,12%	69,07%	100	20,00
10.	Kecukupan formasi guru ASN	50%	50%	100	20,00
11.	Indeks distribusi guru	0,34%	0,34%	100	20,00
12.	Proporsi PTK bersertifikat	91,3%	91,3%	100	20,00
13.	Proporsi PTK penggerak	0,09%	0,09%	100	20,00
14.	Pengalaman pelatihan guru	45,2%	45,2%	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,52

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan Tabel di atas IPSPM Pendidikan Dasar dapat kita lihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (SD) mencapai 99,79% dimana dapat diartikan anak usia 7-12 tahun yang tidak terlayani sebesar 0,21% dan Angka Partisipasi Sekolah (SMP) mencapai 97,69% dimana dapat diartikan bahwa anak usia 13-15 tahun yang tidak mengenyam pendidikan/tidak terlayani sebesar 2,31%. Penduduk Kabupaten Magelang usia sekolah baik 7-12 maupun 13-15 tahun belum terlayani dikarenakan berbagai hal seperti sosial budaya, pekerja anak, faktor ekonomi, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan atau masuk ke pondok pesantren yang belum menyelenggarakan pendidikan formal/nonformal.

Untuk Indeks Pencapaian Mutu kemampuan Literasi SD untuk tahun 2023 ini sudah mencapai kriteria baik, artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Dari target Nilai 64,37 telah mencapai nilai 82,72 atau capaian sudah melampaui 100%. Demikian juga untuk Kemampuan Numerasi SD walaupun capaiannya masih masuk kriteria sedang, yang artinya 40%-70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum, Akan tetapi capaian Kemampuan Numerasi SD juga sudah melampaui target, dari nilai target 46,75 telah tercapai nilai 66,43,

Untuk Indeks Pencapaian Mutu kemampuan Literasi SMP untuk tahun 2023 ini sudah mencapai kriteria baik, artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Dari target Nilai 76,22 telah telah mencapai nilai 82,61 atau capaian sudah melampaui 100%. Sedangkan Kemampuan Numerasi SMP capaiannya masih masuk kriteria sedang, yang artinya 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum, Capaian Kemampuan Numerasi SMP juga belum mencapai target 2023, dimana dari target nilai 75,49 baru tercapai 65,26 atau capaian baru mencapai 86,45% dari target 2023.

3) Pendidikan Kesetaraan

Tabel 4.8.
Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Kesetaraan	4.915	4.915	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Partisipasi Sekolah	12,3%	12,3%	100	20,00
2.	Kemampuan literasi	71,26%	71,26%	100	20,00
3.	Kemampuan numerasi	55,47%	55,47%	100	20,00
4.	Perbedaan skor literasi	5,16%	5,16%	100	20,00
5.	Perbedaan skor numerasi	3,22%	3,22%	100	20,00
6.	Indeks iklim keamanan	65,38%	65,38%	100	20,00
7.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	65,28%	65,28%	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Kesetaraan					20,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan Tabel di atas IP_{SPM} Pendidikan Kesetaraan tercapai 100%, dapat diartikan bahwa jumlah penduduk usia 7 sampai 18 tahun yang membutuhkan layanan pendidikan kesetaraan sudah terlayani semua yaitu sebesar 4.915 sehingga bisa dikatakan tercapai 100%. Terkait dengan Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Pendidikan kesetaraan Kemampuan literasi mencapai nilai 71,26 dan Kemampuan Numerasi mencapai nilai 55,47.



Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}), Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	71,08	19,62	90,70	Tuntas Utama
2.	Pendidikan Dasar	73,90	19,52	93,42	Tuntas Utama
3.	Pendidikan Kesetaraan	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN				94,71	TUNTAS UTAMA

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebesar 94,71 dengan kategori TUNTAS UTAMA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar telah berada di atas nilai 90.

Meskipun capaian kinerja Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023 belum mencapai target SPM 100%, namun capaian kinerja Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding capaian tahun 2022 sebesar 93,59%. Capaian kinerja bidang urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023 belum mencapai target SPM 100%, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masih terdapat anak tidak sekolah umur 5 sampai dengan 18 tahun baik yang masuk kategori belum pernah sekolah, *drop out* maupun lulus tidak melanjutkan.
- b. Masih terdapat Pendidik baik di jenjang PAUD, SD maupun SMP yang belum berkualifikasi D4/S1.
- c. Masih minimnya guru penggerak di Kabupaten Magelang, untuk Jenjang TK baru 22, SD 189 dan SMP 36.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data.

4.1.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi dan numerasi belum tersedia di <i>platform</i> Rapor Pendidikan Kemendikbudristek, misalnya Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi, Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Laki Laki Berdasarkan Asesmen Nasional dsb	Pengisian Form. A.1.9 menunggu tersedia data di rapor pendidikan
		Beberapa Sub Kegiatan yang baru terkait pemenuhan SPM (sebelumnya belum ada di SIPD) sehingga belum terakomodir	Untuk beberapa Sub kegiatan yang baru, diakomodir pada anggaran tahun 2025
		Sub Kegiatan di aplikasi SPM berbeda dengan sub kegiatan di SIPD	Untuk input di Aplikasi SPM dimasukkan ke kegiatan yang sejenis
2.	Eksternal	Pendidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP yang sederajat di Kabupaten Magelang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kantor Kemenag (di bawah Kementerian Agama)	Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama
		SPM Bidang Urusan Pendidikan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Kemenag, sementara data untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaporkan baru data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama
		Pemahaman/Persepsi tentang pengisian aplikasi SPM masih bervariasi antar Kab/Kota	Dinas Pendidikan Provinsi/BBPMP untuk memfasilitasi pelatihan pengisian aplikasi SPM agar tiap Kab/Kota mempunyai pemahaman/persepsi yang sama dalam pengisian Aplikasi SPM

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024



4.2. Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan target sebagai berikut:



Tabel 4.11.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	16.064	Setiap tahun	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	20.000	Setiap tahun	3.582.002.642
					Tablet tambah darah	16.064	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	16.064	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	16.064	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	16.064	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	16.064	Setiap tahun	
					Kartu ibu/rekam medis ibu	16.064	Setiap tahun	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	16.064	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	113	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	590	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	698	Setiap tahun	
Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	16.064	Setiap tahun						



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	14.876	Setiap tahun	Formulir Partograf	14.876	Setiap tahun	114.480.000
					Kartu ibu (rekam medis)	14.876	Setiap tahun	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.876	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	113	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	590	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	698	Setiap tahun	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	14.881	Setiap tahun	Vaksin Hepatitis B0	17.907	Setiap tahun	434.496.000
					Vitamin K1 injeksi	14.881	Setiap tahun	
					Salap/tetes mata antibiotik	14.881	Setiap tahun	
					Formulir bayi baru lahir	14.881	Setiap tahun	
					Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	14.881	Setiap tahun	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.881	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	112	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	590	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	698	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	79.528	Setiap tahun	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	79.528	Setiap tahun	619.581.417
					Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	79.528	Setiap tahun	
					Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	79.528	Setiap tahun	
					Vitamin A Biru	13.937	Setiap tahun	
					Vitamin A Merah	64.729	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: HBO	18.012	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: BCG	17.862	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: Polio	17.862	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: IPV	17.862	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	17.862	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: Campak	17.862	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: Rubella	17.862	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	17.862	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	18.025	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	18.025	Setiap tahun	
					Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	179.096	Setiap tahun	
					Peralatan Anafilaktik	116	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter	107	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	590	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	698	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	58	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	14.875	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan Non kesehatan : Guru PAUD	789	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	168.920	Setiap tahun	Buku raport kesehatanku	168.920	Setiap tahun	160.400.779
					Buku pemantauan kesehatan	168.920	Setiap tahun	
					Kuesioner skrining kesehatan	168.920	Setiap tahun	
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	1.127	Setiap tahun	
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	285	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	150	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	590	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	698	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	58	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan : Masyarakat	36	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	14.875	Setiap tahun	
Tenaga Non kesehatan : Guru	7.562	Setiap tahun						



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	844.262	Setiap tahun	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	58	Setiap tahun	303.354.060
					Alat ukur berat badan	303	Setiap tahun	
					Alat : Alat ukur tinggi badan	303	Setiap tahun	
					Alat : Alat ukur lingkar perut	303	Setiap tahun	
					Alat : Tensimeter	303	Setiap tahun	
					Alat : Glukometer	303	Setiap tahun	
					Alat : Tes strip gula darah	844.262	Setiap tahun	
					Alat : Lancet	844.262	Setiap tahun	
					Alat : Kapas alkohol	844.262	Setiap tahun	
					Alat : KIT IVA Tes	29	Setiap tahun	
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter	29	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	29	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	29	Setiap tahun	
Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	29	Setiap tahun						
Tenaga Kesehatan Masyarakat	29	Setiap tahun						
Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	2.457	Setiap tahun						



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	184.861	Setiap tahun	Strip pemeriksaan gula darah, kolesterol	184.861	Setiap tahun	697.644.632
					Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test dan Instrumen Activity Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	184.861	Setiap tahun	
					Buku kesehatan lansia	184.861	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter	107	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	590	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	698	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	58	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	Setiap tahun	
Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	2.352	Setiap tahun						
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	394.838	Setiap tahun	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	58	Setiap tahun	66.000.000
					Tensimeter	303	Setiap tahun	
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter	29	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	29	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	29	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	29	Setiap tahun	
					Obat Hipertensi	394.838	Setiap tahun	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	19.634	Setiap tahun	Alat Glukometer :	303	Setiap tahun	1.363.172.000
					Alat : Strip Tes Gula Darah	19.634	Setiap tahun	
					Alat : Kapas Alkohol	19.634	Setiap tahun	
					Alat : Lancet	19.634	Setiap tahun	
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2	Setiap tahun	
					Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	58	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter	29	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	29	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	29	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	29	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	29	Setiap tahun	
					Obat Diabetes Melitus	19.634	Setiap tahun	
					10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	
Kit berisi 2 Alat Fiksasi	6	Setiap tahun						
Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	3.278	Setiap tahun						
Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	58	Setiap tahun						
Tenaga kesehatan : Dokter	31	Setiap tahun						
Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	29	Setiap tahun						
Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	32	Setiap tahun						



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Pelayanan kesehatan orang orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	11.595	Setiap tahun	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	31	Setiap tahun	438.616.316
					Reagen Zn TB	200	Setiap tahun	
					Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	50.200	Setiap tahun	
					Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	23.190	Setiap tahun	
					Catridge tes cepat molekuler	18.552	Setiap tahun	
					Formulir pencatatan dan pelaporan	31	Setiap tahun	
					Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	31	Setiap tahun	
					Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	35	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	31	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	31	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	2	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan masyarakat	31	Setiap tahun	
					Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	1.118	Setiap tahun	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah orang-orang terduga berisiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	18.409	Setiap tahun	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	31	Setiap tahun	488.572.116
					Tes cepat HIV (RDT) pertama	18.409	Setiap tahun	
					Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	18.409	Setiap tahun	
					Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	31	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	35	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	31	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	31	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	31	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan masyarakat	31	Setiap tahun	
					Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	29	Setiap tahun	
Jumlah							8,440.294.595	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024



4.2.3. Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Kesehatan berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2023, terdiri dari:

Tabel 4.12.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD DAU	APBN	APBD DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4		5
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	124.480.000	0	3.457.522.642	0
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	114.480.000	0	0	0
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	109.320.000	0	325.176.000	0
4	Pelayanan kesehatan balita	84.480.000	0	535.101.417	0
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	88.880.000	0	71.520.779	0
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	193.131.545	0	110.222.515	0
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	74.440.000	0	623.204.632	0
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	66.000.000	0	0	0
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	76.400.000	0	1.286.772.000	0
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	68.000.000	0	103.974.633	0
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	200.000.000	0	238.616.316	0
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	120.038.676	0	368.533.440	0
Jumlah		1.319.650.221	0	7.120.644.374	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Magelang Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.440.294.595,00. Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Kesehatan pada tahun 2023 berasal dari APBD DAU dan APBD DAK.



4.2.4. Dukungan personil

Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Magelang didukung oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Adapun tenaga kesehatan yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut:

Tabel 4.13.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	52
2.	Dokter Umum	77
3.	Dokter Gigi	43
4.	Bidan	594
5.	Perawat	708
6.	Kesehatan Masyarakat	36
7.	Gizi	58
8.	Apoteker	28
Jumlah		1.596

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan sebanyak 1.596 orang meliputi tenaga kesehatan di 29 Puskesmas dan 2 RSUD.

4.2.5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 4.14.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.064	16.064	99,69	3.582.002.642	3.279.145.856	91,55
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.876	14.874	99,92	114.480.000	112.579.970	98,34
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.881	14.873	99,69	434.496.000	424.637.270	97,73
4	Pelayanan Kesehatan Balita	79.528	77.479	97,17	619.581.417	488.144.795	78,79
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	168.920	160.763	91,95	160.400.779	149.920.325	93,47
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	844.262	574.207	73,28	303.354.060	203.429.092	67,06
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	184.861	169.939	88,35	697.644.632	614.217.183	88,04
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	394.838	135.309	45,77	66.000.000	50.708.251	76,38
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.634	19.634	100	1.363.172.000	1.255.856.268	92,13
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	3.278	2.428	78,51	171.974.633	129.477.944	75,29
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.595	11.595	100	438.616.316	376.399.497	85,82
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	18.409	18.409	100	488.572.116	479.752.300	98,19
	Jumlah			89,55	8.440.294.595	7.564.268.751	89,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan pada SPM Bidang Urusan Kesehatan mencapai 89,62%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023 berdasarkan jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut:



1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tabel 4.15.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.064	16.064	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	20,000	17.538	87,69	17,54
2.	Tablet tambah darah	16.064	16.059	99,97	19,99
3.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	16.064	15,954	99,32	19,86
4.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	16.064	16.064	100	20,00
5.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	16.064	16.064	100	19,48
6.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	16.064	16.006	99,64	19,93
7.	Kartu ibu/rekam medis ibu	16.064	16.064	100	20,00
8.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	16.064	16.064	100	20,00
9.	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	113	113	100	20,00
10.	Tenaga kesehatan : Bidan	590	590	100	20,00
11.	Tenaga kesehatan : Perawat	698	698	100	20,00
12.	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	16.064	15.182	94,51	18,90
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebanyak 16.064 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 16.064 orang.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tabel 4.16.

Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.876	14.874	99,99	79,99
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Formulir Partograf	14.876	14.571	97,95	19,59
2.	Kartu ibu (rekam medis)	14.876	14.571	100	20,00
3.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.876	14.571	100	20,00
4.	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	113	113	100	20,00
5.	Tenaga Bidan kesehatan :	590	590	100	20,00
6.	Tenaga Perawat kesehatan :	698	698	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebanyak 14.874 orang (99.99%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 14.876 orang. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin belum mencapai 100% karena terdapat dua (2) orang ibu hamil melahirkan saat menuju fasilitas kesehatan.

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tabel 4.17.

Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.881	14.873	99,95	79,96
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Vaksin Hepatitis B0	17.907	17.907	100	20,00
2.	Vitamin K1 injeksi	14.881	14.881	100	20,00
3.	Salep/fetes mata antibiotik	14.881	14.881	100	20,00
4.	Formulir bayi baru lahir	14.881	14.881	100	20,00
5.	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	14.881	14.880	99,99	19,99
6.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.881	14.881	100	20,00
7.	Dokter/dokter spesialis Anak	112	112	100	20,00
8.	Tenaga Bidan kesehatan :	590	590	100	20,00
9.	Tenaga Perawat kesehatan :	698	698	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebanyak 14.873 orang (99.95%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 14.881 orang. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir belum mencapai 100% karena terdapat 8 (delapan) bayi meninggal kurang dari 6 (enam) jam setelah kelahiran.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel 4.18.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Balita

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Balita	79.528	77.479	97,42	77,94
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	79.528	77.479	97.42	19,48
2.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	79.528	77.479	97.42	19,48
3.	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	79.528	77.479	97.42	19,48
4.	Vitamin A Biru	13.937	13.937	100	20,00
5.	Vitamin A Merah	64.279	64.279	100	20,00
6.	Vaksin imunisasi dasar: HBO	18.012	18.012	100	20,00
7.	Vaksin imunisasi dasar: BCG	17.862	16.872	94.46	18,89
8.	Vaksin imunisasi dasar: Polio	17.862	16.872	94.46	18,89
9.	Vaksin imunisasi dasar: IPV	17.862	15.237	85.30	17,06
10.	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	17.862	15.560	87.11	17,42
11.	Vaksin imunisasi dasar: Campak	17.862	15.670	87.73	17,55
12.	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	17.862	15.670	87.73	17,55
13.	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	17.862	15.560	87.11	17,42
14.	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	18.025	18.025	100	20,00
15.	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	18.025	18.025	100	20,00
16.	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	179.096	165.503	92.41	18,48
17.	Peralatan Anafilaktik	116	116	100	20,00
18.	Tenaga kesehatan : Dokter	107	107	100	20,00
19.	Tenaga kesehatan : Bidan	590	590	100	20,00
20.	Tenaga kesehatan : Perawat	698	698	100	20,00
21.	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	58	58	100	20,00
22.	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	14.875	14.875	100	20,00
23.	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	789	789	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Balita sebanyak 79.528 orang (94.42%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 77.479 orang. Pelayanan Kesehatan Balita belum mencapai 100% karena balita usia tiga tahun ke atas beberapa sudah dimasukkan ke PAUD di luar wilayah puskesmas sehingga tidak dapat dilakukan skrining kesehatan sesuai standar.

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Tabel 4.19.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	168.920	160.763	95,17%	76,13
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku raport kesehatanku	168.920	12.402	7,34	1,47
2.	Buku pemantauan kesehatan	168.920	12.402	7,34	1,47
3.	Kuesioner skrining kesehatan	168.920	57.423	33,99	6,80
4.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	1.127	1.127	100	20,00
5.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	285	285	100	20,00
6.	Tenaga Kesehatan ; Dokter/Dokter gigi	150	150	100	20,00
7.	Tenaga Kesehatan ; Bidan	590	590	100	20,00
8.	Tenaga Kesehatan ; Perawat	698	698	100	20,00
9.	Tenaga Kesehatan ; Ahli Gizi	58	58	100	20,00
10.	Tenaga Kesehatan ; Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	36	100	20,00
11.	Tenaga Kesehatan ; Kader Kesehatan	14.875	14.875	100	20,00
12.	Tenaga Non Kesehatan ; Guru	7.562	7.562	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					15,81

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebanyak 168.920 orang (95.17%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 160.763 orang. Pelayanan Pada Usia Pendidikan Dasar tidak mencapai 100% diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia kesehatan di beberapa puskesmas sehingga dalam setahun tidak semua siswa dalam sebuah sekolah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Hal ini sehubungan dengan persebaran jumlah sekolah di masing-masing wilayah puskesmas yang tidak merata. Persebaran yang tidak merata mengakibatkan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar pada wilayah dengan jumlah sekolah yang banyak menjadi tidak maksimal.

6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Tabel 4.20.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	844.262	574.207	68,00	54,41
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1.	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	58	58	100	20,00
2.	Alat ukur berat badan	303	303	100	20,00
3.	Alat : Alat ukur tinggi badan	303	303	100	20,00
4.	Alat : Alat ukur lingkar perut	303	303	100	20,00
5.	Alat : Tensimeter	303	303	100	20,00
6.	Alat : Glukometer	303	303	100	20,00
7.	Alat : Tes strip gula darah	844.262	574.207	68,01	13,60
8.	Alat : Lancet	844.262	574.207	68,01	13,60
9.	Alat : Kapas alkohol	844.262	574.207	68,01	13,60
10.	Alat : KIT IVA Tes	29	29	100	20,00
11.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2	2	100	20,00
12.	Tenaga kesehatan : Dokter	29	29	100	20,00
13.	Tenaga kesehatan : Bidan	29	29	100	20,00
14.	Tenaga kesehatan : Perawat	29	29	100	20,00
15.	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	29	29	100	20,00
16.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	29	29	100	20,00
17.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	2.457	2.457	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					18,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebanyak 574.207 orang (68%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 844.262 orang. Pelayanan Pada Usia Produktif tidak mencapai 100% diakibatkan sasaran lebih banyak tidak berada di lokasi domisili saat jam kerja Puskesmas atau saat dilakukannya skrining Penyakit Tidak Menular (PTM). Hal ini mengakibatkan penjarangan sasaran usia produktif menjadi tidak maksimal. Selain itu kurangnya anggaran, SDM, BMHP, dan alat pemeriksaan mengakibatkan hasil layanan jauh dari target.

7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Tabel 4.21.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	184.861	169.939	92,00	73,54
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
1.	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	184.861	102.250	55,31	11,06
2.	Instrumen <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS), Instrumen <i>Abbreviated Mental Test</i> (AMT) dan Instrumen <i>Activity Daily Living</i> (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	184.861	56.847	30,75	6,15
3.	Buku kesehatan lansia	184.861	3.215	1,74	0,34
4.	Tenaga Kesehatan ; Dokter	107	107	100	20,00
5.	Tenaga Kesehatan ; Bidan	590	590	100	20,00
6.	Tenaga Kesehatan ; Perawat	698	698	100	20,00
7.	Tenaga Kesehatan ; Ahli Gizi	58	58	100	20,00
8.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	36	100	20,00
9.	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/mempunyai kualifikasi Tertentu	2.352	2.352	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					14,80

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebanyak 169.939 orang (92%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 184.861 orang. Pelayanan Pada Usia Pendidikan Lanjut tidak mencapai 100% diakibatkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) Kesehatan sehingga lansia yang tidak mandiri (kategori ketergantungan dan perlu bantuan) tidak bisa dilakukan kunjungan rumah untuk dilakukan skrining kesehatan sesuai standar, sedangkan untuk ke posyandu secara mandiri tidak memungkinkan.

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tabel 4.22.
Indeks Pencapaian Target SPM
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	394.838	135.309	34,00	27,42
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	58	58	100	10,00
2.	Tensimeter	303	303	100	20,00
3.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2	2	100	20,00
4.	Tenaga Kesehatan ; Dokter	29	29	100	20,00
5.	Tenaga Kesehatan ; Bidan	29	29	100	20,00
6.	Tenaga Kesehatan ; Perawat	29	29	100	20,00
7.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	29	29	100	20,00
8.	Obat hipertensi	394.838	135.309	34,27	6,85
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					18,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebanyak 135.309 orang (34,27%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 394.838 orang. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tidak mencapai 100% diakibatkan kurangnya kesadaran penderita hipertensi untuk kontrol rutin sebagai bagian dari pencegahan terjadinya komplikasi dan menganggap gejala hipertensi sebagai kondisi normal yang muncul akibat kelelahan ataupun stres. Selain itu pencatatan dan pelaporan yang belum terintegrasi antara puskesmas dan klinik swasta mengakibatkan jumlah kasus penderita hipertensi yang diperiksa di klinik swasta tidak dilaporkan.

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tabel 4.23.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.634	19.634	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1.	Alat : Glukometer	303	303	100	20,00
2.	Alat : Strip Tes Gula Darah	19.634	19.634	100	20,00
3.	Alat : Kapas Alkohol	19.634	19.634	100	20,00
4.	Alat : Lancet	19.634	19.634	100	20,00
5.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2	2	100	20,00
6.	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	58	58	100	20,00
7.	Tenaga kesehatan : Dokter	29	29	100	20,00
8.	Tenaga kesehatan : Bidan	29	29	100	20,00
9.	Tenaga kesehatan : Perawat	29	29	100	20,00
10.	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	29	29	100	20,00
11.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	29	29	100	20,00
12.	Obat Diabetes Melitus	19.634	19.634	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebanyak 19.634 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 19.634 orang.



10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Tabel 4.24.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	3.278	2.428	74,00	59,26
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	29	29	100	20,00
2.	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	6	6	100	20,00
3.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	3.278	2.428	74,07	14,81
4.	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	58	58	100	20,00
5.	Tenaga kesehatan : Dokter	31	31	100	20,00
6.	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	29	29	100	20,00
7.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	32	32	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebanyak 2.428 orang (74,00%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 3.278 orang. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat tidak mencapai 100% diakibatkan belum terpenuhinya kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas dalam memberikan tata laksana pada pasien ODGJ.



11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tabel 4.25.
Indeks Pencapaian Target SPM
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.595	11.595	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	31	31	100	20,00
2.	Reagen Zn TB	200	200	100	20,00
3.	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	50.200	50.200	100	20,00
4.	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	23.190	23.190	100	20,00
5.	Catridge tes cepat molekuler	18.552	18.552	100	20,00
6.	Formulir pencatatan dan pelaporan	31	31	100	20,00
7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	31	31	100	20,00
8.	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	35	35	100	20,00
9.	Tenaga kesehatan : Perawat	31	31	100	20,00
10.	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	31	31	100	20,00
11.	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	2	2	100	20,00
12.	Tenaga kesehatan masyarakat	31	31	100	20,00
13.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	1.188	1.188	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebanyak 11.595 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 11.595 orang. Hal ini dapat tercapai salah satunya karena adanya peran aktif kader TBC yang sangat membantu Puskesmas dalam penemuan orang terduga TBC secara aktif di masyarakat.

12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Tabel 4.26.

Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	18.409	18.409	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
1.	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	31	31	100	20,00
2.	Tes cepat HIV (RDT) pertama	18.409	18.409	100	20,00
3.	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	18.409	18.409	100	20,00
4.	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	31	31	100	20,00
5.	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	35	35	100	20,00
6.	Tenaga kesehatan : Perawat	31	31	100	20,00
7.	Tenaga kesehatan : Bidan	31	31	100	20,00
8.	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	31	31	100	20,00
9.	Tenaga kesehatan masyarakat	31	31	100	20,00
10.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	29	29	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sebanyak 18.409 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 18.409 orang. Hal ini dapat tercapai karena tes HIV pada populasi berisiko khususnya populasi kunci Lelaki Seks Lelaki (LSL) dan waria atau transgender bermitra dengan LSM Kalandara.



Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM), Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.27.
Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80,00	19,69	99,69	Tuntas Utama
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	79,99	19,93	99,92	Tuntas Utama
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	79,96	20,00	99,96	Tuntas Utama
4	Pelayanan Kesehatan Balita	77,94	19,21	97,14	Tuntas Utama
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	76,14	15,81	91,95	Tuntas Utama
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	54,41	18,87	73,28	Tuntas Pratama
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	73,54	14,80	88,35	Tuntas Madya
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	27,42	18,36	45,77	Belum Tuntas
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	59,26	19,26	78,51	Tuntas Pratama
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN KESEHATAN				89,55	TUNTAS MADYA

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebesar 89,55 dengan KATEGORI TUNTAS MADYA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar telah berada di atas nilai 80.

Capaian penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 82,99%. Namun demikian, capaian penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang tahun 2023 masih belum optimal dikarenakan terdapat 1 (satu) jenis layanan dasar yang Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) masuk kategori BELUM TUNTAS yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, dengan capaian 34,70; disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran penderita hipertensi untuk kontrol rutin sebagai bagian dari pencegahan terjadinya komplikasi dan menganggap gejala hipertensi sebagai kondisi normal yang muncul akibat kelelahan ataupun stres.
- b. Pencatatan dan pelaporan yang belum terintegrasi antara puskesmas dan fasilitas pelayanan Kesehatan milik swasta mengakibatkan jumlah kasus penderita hipertensi yang diperiksa di fasilitas pelayanan Kesehatan milik swasta tidak dilaporkan dan belum menjadi bagian dari capaian pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi.

4.2.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	1. Data dari puskesmas tidak sampai ke dinas kesehatan tepat waktu 2. Integrasi data penderita hipertensi dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta belum berjalan maksimal	Membuat jadwal cut off laporan pada tanggal 10 di setiap bulannya 1. Menyusun <i>database</i> dari setiap puskesmas tentang jumlah penderita hipertensi yang dilayani di wilayahnya. Data didapat dari layanan induk, jejaring dan jaringan, serta penderita yang mendapatkan pelayanan di FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut), sehingga tidak menggunakan data riskesdas 2018 2. Penyusunan MOU mekanisme pelaporan antara puskesmas dan jejaring



No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		<p>3. Anggaran untuk pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) belum muncukupi semua sasaran</p> <p>4. Anggaran untuk pengadaan bahan cetak belum muncukupi semua sasaran</p>	<p>1. Usulan anggaran dari DAK dan DBHCHT</p> <p>2. Rencana kegiatan dibuat secara terintegrasi agar pelaksanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien</p> <p>3. Kebutuhan anggaran dapat dipenuhi secara bersama dengan lintas sektor karena memiliki kegiatan dengan tujuan yang sama</p>
		5. Keterbatasan jumlah SDM Kesehatan yang kompeten dalam melaksanakan skrining	<p>1. Pelaksanaan Kegiatan secara terintegrasi antar program sesuai sasaran usia (tidak berdiri sendiri)</p> <p>2. Sosialisasi/<i>refreshing</i> SPM kepada Kepala Puskesmas dan Pemegang Program dan Pelaksana</p> <p>3. Memberdayakan dan memberikan reward kepada kader kesehatan terlatih.</p> <p>4. Usulan formasi Bidan Desa untuk desa yang belum ada bidan desa</p>
		6. Belum terpenuhinya kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas dalam memberikan tata laksana pada pasien odgj	1. Usulan pelatihan SDM Kesehatan dalam tata laksana Kesehatan jiwa terpadu di puskesmas
2.	Eksternal	<p>1. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam pelaksanaan skrining kesehatan</p> <p>2. Dukungan lintas sektor masih kurang dalam penggerakan masyarakat untuk skrining kesehatan</p>	1. Kerjasama lintas program (promosi kesehatan) dan lintas sektor dalam mensosialisasikan program deteksi dini penyakit tidak menular di masyarakat.
		3. Penolakan dari keluarga pasien untuk mengirinkan pasien odgj berat untuk dirawat di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut	1. Melakukan pendekatan kepada keluarga pasien agar pasien odgj berat diperbolehkan dirawat di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut
		4. Sasaran usia produktif lebih banyak tidak berada di lokasi domisili saat jam kerja Puskesmas atau saat dilakukannya skrining Penyakit Tidak Menular (PTM)	<p>1. Ada <i>mapping</i> lokasi domisili dan lokasi bekerja bagi usia produktif, sehingga mudah dalam <i>mapping</i> perencanaan kegiatan capaian SPM</p> <p>2. Pelaksanaan skrining dilakukan di tempat kerja baik instansi pemerintah maupun swasta dan di sekolah-sekolah</p>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.



4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Target pencapaian indikator SPM Bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.29.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.324.756	Setiap tahun	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	413.716	Setiap tahun	17.580.536.290
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	413.716	Setiap tahun	
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	220.059	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)				
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	220.059	Setiap tahun		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.324.756	Setiap tahun	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-5 terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	803	Setiap tahun	10.681758.000	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-5 terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat	1	Setiap tahun		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)			
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	803	Setiap tahun	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	358	Setiap tahun	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas	358	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			
Jumlah								28.262.294.290

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2024

4.3.3. Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.30.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4	5	5
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1.177.805.191	2.400.000.000	10.962.402.000	2.992.004.000
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	95.077.994	3.850.000.000	6.731.581.400	0
Jumlah		1.272.883.185	6.250.000.000	17.693.983.400	2.992.004.000

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2024

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp28.208.870.585,00. Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2023 berasal dari anggaran APBD, APBN, DAK dan sumber dana lain yang sah.



4.3.4. Dukungan Personil

Dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka didukung oleh personil-personil yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun personil yang terlibat yakni:

Tabel 4.31.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	
	PNS	8
	Tenaga Kontrak	22
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	
	PNS	8
	Tenaga Kontrak	12
	Jumlah	50

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2024

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum sebanyak 50 orang.

4.3.5. Hasil Capaian

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.32.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1.324.756	1.225.269	93,99	1.226.130.290	1.177.805.191	96,06
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	1.324.756	1.212.416	93,22	100.176.600	95.077.994	94,91
	JUMLAH			93,61	1.326.306.890	1.272.883.185	95,48

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum mencapai 95,48%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023 berdasarkan penghitungan per jenis pelayanan dasar berikut ini.

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tabel 4.33.
Indeks Pencapaian Target SPM
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1,324,756	1,225,269	92,49	73,99
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	413.716	413.716	100	20,00
2.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	413.716	413.716	100	20,00
3.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	220.059	220.059	100	20,00
4.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	220.059	220.059	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2024

Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari tidak tercapai 100% karena penetapan target capaian berdasarkan Proyeksi Jumlah penduduk selama 5 Tahun sesuai RPJMD, sedangkan realisasi sebagai pembagi adalah jumlah penduduk riil pada tahun berjalan.



2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tabel 4.34.
Indeks Pencapaian Target SPM
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.324.756	1.212.416	91,52	73,22
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	803	803	100	20,00
2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	803	803	100	20,00
3.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	358	358	100	20,00
4.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	358	358	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2024

Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik tidak tercapai 100% karena penetapan target capaian berdasarkan Proyeksi Jumlah penduduk selama 5 Tahun sesuai RPJMD, sedangkan realisasi sebagai pembagi adalah jumlah penduduk riil pada tahun berjalan.

Berdasarkan tabel-tabel tersebut, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM), Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.35.
Indeks Pencapaian SPM (IP^{SPM}) Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	73,99	20,00	93,99	Tuntas Utama
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	73,22	20,00	93,22	Tuntas Utama
BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM				93,61	TUNTAS UTAMA

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IP^{SPM}) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebesar 93,61 dengan kategori TUNTAS UTAMA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM di atas 90. Meskipun capaian kinerja bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023 belum mencapai target SPM 100%, namun capaian kinerja bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Capaian kinerja bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023 belum mencapai target SPM 100% disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Belum terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Magelang sehingga Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) belum dapat terpenuhi.
- Masih banyak masyarakat yang menggunakan jamban secara *sharing*/menumpang.
- Ketersediaan lahan yang terbatas untuk membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik komunal maupun Individual.

4.3.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala, Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.36.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Terkait mutu barang jasa yang dibutuhkan untuk Pengolahan Lumpur Tinja, Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik, karena Kabupaten Magelang belum memiliki IPLT sehingga untuk data pengangkutan dan Pengolahan Lumpur tinja IPLT belum tersedia	Mengusulkan kembali pembangunan IPLT
2.	Eksternal	Kurangnya petunjuk teknis tentang kebutuhan barang/jasa terkait kebutuhan kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	Mengusulkan untuk cara penghitungan kebutuhan barang/Jasa terkait kuantitas dan kualitas akses pengolahan air limbah Domestik.

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2024

Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenis layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, salah satu indikator pencapaiannya adalah Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT). Pada saat ini Kabupaten Magelang belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Dalam pelayanan sanitasi, keberadaan IPLT sebenarnya adalah wajib untuk mewujudkan sanitasi yang layak dan aman. Sesuai dengan standar teknis sanitasi layak dan aman adalah bahwa sarana sanitasi harus dilengkapi dengan septic tank yang kedap, dan harus dilakukan penyedotan secara terjadwal yang kemudian dibuang ke IPLT untuk diolah. Sehingga IPLT menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi Kabupaten Magelang.

Upaya untuk mewujudkan IPLT di Kabupaten Magelang sudah cukup lama namun banyak kendala yang menyebabkan belum terealisasi sampai saat ini. Readiness Criteria sudah disusun baik berupa masterplan air limbah maupun FS untuk lokasi IPLT. Bahkan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah IPLT. Namun dinamika proses perencanaan yang panjang kemudian menyebabkan pengadaan tanah IPLT tersebut belum berhasil dilaksanakan. Diharapkan para pemangku kepentingan dari semua Perangkat Daerah terkait mengerti kendala-kendala yang dihadapi dan selanjutnya dapat ikut mengawal agar pembangunan air minum dan sanitasi Kabupaten Magelang akan terwujud sesuai kondisi ideal yang diharapkan.



4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten

Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan dasar di Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 4.37.

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	35	Setiap tahun	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	33	Setiap tahun	275.310.000
					Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	2		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	22	Setiap tahun	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	22	Setiap tahun	48.801.434
Jumlah								324.111.434

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2024



Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 324.111.434,00.

4.4.3. Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2023, terdiri dari:

Tabel 4.38.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4		5
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	275.310.000*)	0	0	0
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.801.434	0	0	0
Jumlah		324.111.434	0	0	0

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2024

*) Sejumlah Rp 275.310.000,00 berupa BTT yang tersalurkan (anggaran ada pada BPPKAD)

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023 sejumlah total Rp 324.111.434,00 dengan rincian:

1. Anggaran pada DPRKP sejumlah Rp 48.801.434,00;
2. Anggaran BTT pada BPPKAD tersalurkan sejumlah Rp 275.310.000,00.

Selain berkoordinasi dengan BPBD terkait penanganan pasca bencana tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga melakukan koordinasi dan ikut membantu penanganan bencana lainnya. Adapun pendanaan jenis layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Magelang Tahun 2023 melalui dana BTT BPPKAD.



4.4.4. Dukungan Personil

Proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat diampu oleh Seksi Pengembangan Perumahan pada Bidang Perumahan dan didukung oleh personil-personil Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Tabel 4.39.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Strata 2 (S2)	3
2.	Strata 1 (S1)	2
3.	SM Non. AK	0
4.	SM AK	0
5.	Diploma 4 (D4)	0
6.	Diploma 3 (D3)	0
7.	Diploma 2 (D2)	0
8.	Diploma 1 (D1)	0
9.	SMA	2
10.	SMP	0
11.	SD	0
Jumlah		7

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2024

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebanyak 7 orang.

4.4.5. Hasil Capaian

Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.40.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35	35	100	275.310.000	275.310.000	100
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22	22	100	48.801.434	28.753.886	58,92
					324.111.434	304.063.886	93,81

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Perumahan rakyat mencapai 93,81%. Untuk mengukur tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023 berdasarkan penghitungan berikut ini.

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 4.41.
Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35	35	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	33	33	100	20,00
2.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	2	2	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2024

Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dilakukan menggunakan dana Bantuan Tidak Terencana yang dianggarkan pada BPPKAD, sedangkan untuk Pembangunan Kembali seharusnya dianggarkan secara tersendiri menggunakan anggaran pada DPRKP, namun karena mempertimbangkan kebutuhan yang mendesak dan kesediaan dari korban bencana untuk menerima bantuan senilai maksimal untuk kerusakan berat, maka diberikan bantuan dari anggaran yang sama yaitu BTT dan dianggap sebagai rehab berat dengan mendapatkan bantuan maksimal sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.42.
Indeks Pencapaian Target SPM Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22	22	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	22	22	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2024

Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni diberikan kepada 22 Kepala Keluarga yang mengalami musibah tanah longsor di Dusun Ringinputih Desa Tugurejo Kecamatan Tempuran pada Tahun 1982, kemudian oleh Pemerintah desa setempat di buatkan huntara dengan menempati tanah desa di Dusun Kanggotan sampai saat ini. Hasil fasilitas berupa:

- Terdapat 22 (dua puluh dua) Rumah dan Kepala Keluarga yang menempati Huntara di Dusun Kanggotan Desa Tugurejo Banyuwangi yang masuk sebagai warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) difasilitasi untuk dilakukan relokasi *progres verivali* oleh Disperakim Provinsi Jateng), sedang diusahakan untuk dapat dilakukan relokasi menggunakan anggaran yang memungkinkan.
- Dilakukan pendampingan fasilitas untuk pengadaan tanah relokasi di tempat yang layak dan aman di sekitar wilayah setempat.
- Dilakukan upaya pendampingan dan fasilitas dengan BKK Jawa Tengah untuk mendapatkan kredit dalam usaha pengadaan tanah relokasi yang nantinya akan di bangun Rumah Layak Huni baik melalui bantuan Pemerintah maupun secara Swadaya.



Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung capaian Indeks capaian SPM. Indeks Pencapaian SPM (IPSPM), sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.43.
Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80	20	100	Tuntas Paripurna
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80	20	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				100	TUNTAS PARIPURNA

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori TUNTAS PARIPURNA, hal ini menggambarkan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, sama dengan 100.

4.4.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.44.
Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Pengumpulan data perumahan di lokasi rawan bencana membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan luasnya wilayah. Data awal dari BPBD yang merupakan data daerah rawan bencana secara umum harus disesuaikan dengan wilayah permukiman saat ini	Pengumpulan data perumahan di lokasi rawan bencana dilakukan secara bertahap, dan dilakukan <i>update</i> data secara berkala terhadap data yang sudah didapatkan



No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		1. Penanganan rehab rumah (ringan sedang) tidak bisa menunggu tahun anggaran berikutnya, sehingga harus dianggarkan saat itu juga.	1. Ada mekanisme BTT yang diatur dalam Perbup No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
		<p>2. Pada beberapa daerah rawan bencana terdapat warga yang menginginkan untuk direlokasi ke tempat lain namun ada beberapa hal yang perlu pemenuhan, yaitu:</p> <p>a. Belum tersedia studi atau Analisa tentang kondisi di lokasi apakah membutuhkan relokasi atau bisa dilakukan mitigasi struktural untuk mengurangi dampak bencana</p> <p>b. Warga belum memiliki tanah yang akan digunakan untuk lokasi relokasi</p> <p>3. Tidak ada pernyataan bencana dari Kepala Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi</p>	<p>2. Berkoordinasi dengan :</p> <p>a. BPBD berkaitan dengan langkah penanganan yang akan dilakukan apakah relokasi atau mitigasi structural</p> <p>b. desa untuk penyediaan tanah</p> <p>3. Berkoordinasi dengan BPBD</p>
2.	Eksternal	Terdapat permohonan untuk pembangunan kembali di lokasi lain namun yang bersangkutan ingin segera membangun dan bersedia menerima BTT (dianggap sebagai rehab rumah dengan nilai bantuan maksimum yaitu 25 juta rupiah)	Tetap diberikan bantuan agar dapat dilaksanakan pembangunan dan memastikan bahwa pembangunan akan selesai dan menjadi rumah layak huni.
		Tidak mudahnya mencari lahan calon relokasi yang memenuhi unsur keselamatan baik administrasi maupun teknis	Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan status dan keamanan lahan

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2024

Pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 dilakukan dengan mekanisme Bantuan Sosial Tidak Terencana menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga, mekanisme ini hanya terbatas pada rehab rumah saja, untuk pembangunan kembali dan relokasi harus menggunakan anggaran yang terencana atau APBD reguler. Namun apabila masyarakat yang menjadi korban bencana dan harus membangun rumah di lokasi baru dapat ikut menggunakan Bansos Tidak Terencana namun dengan batasan maksimal pemberian bantuan yang diterima sejumlah Rp25.000.000,00.

Bantuan Sosial Tidak Terencana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk permohonan pembangunan kembali dan relokasi dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan anggaran terencana.



4.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 4.45.

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	1.319.476	Setiap tahun	Standar sarana prasarana Satpol PP dan PK (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	694	Setiap tahun	5.175.356.000



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan PK (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	3	Setiap tahun	
					Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan PK dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	55	Setiap tahun	
					Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	3	Setiap tahun	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	463.772	Setiap tahun	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	Setiap 5 tahun	505.091.500



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.319.476	Setiap 5 tahun	
					Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	463.772	Setiap tahun	
					Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	57	Setiap tahun	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.922	Setiap tahun	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	8	Setiap tahun	208.438.500
					Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	2.922	Setiap tahun	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	21	Setiap tahun	Aktivasi sistem komando penangan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan	1	Setiap tahun	1.424.817.822



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		matan dan evakuasi korban bencana			bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)			
					Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	21	Setiap tahun	
					Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	429	Setiap tahun	
					Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	27	Setiap tahun	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Setiap tahun	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	294	Setiap tahun	8.139.257.000
					Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	3	Setiap tahun	
					Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar,	354	Setiap tahun	11.422.470.000



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)			
					Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	243	Setiap tahun	
					Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	294	Setiap tahun	
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	294	Setiap tahun	
Jumlah								19.008.050.250

Sumber: Satpol PP dan PK dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2024

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp19.008.050.250.



4.5.3. Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Trantibumlinmas berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2023, terdiri dari:

Tabel 4.46.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4		5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.175.356.000	0	0	0
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	505.091.500	0	0	0
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	208.438.500	0	0	0
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.424.817.822	0	0	0
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	11.422.470.000	0	0	0
	Dana Desa				42.739.942.720
Jumlah		19.008.050.250	0	0	42.739.942.720

Sumber: Satpol PP dan PK dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2024

4.5.4. Dukungan personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Trantibumlinmas terdiri dari:

Tabel 4.47
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil (Satpol PP dan PK dan PK)	Jumlah Personil (BPBD)
1	2	3	3
1.	Strata 2 (S2)	5	5
2.	Strata 1 (S1)	10	22
3.	SM Non. AK	0	0
4.	SM AK	0	0
5.	Diploma 4 (D4)	0	0
6.	Diploma 3 (D3)	4	5
7.	Diploma 2 (D2)	0	0
8.	Diploma 1 (D1)	0	0
9.	SMA	16	30
10.	SMP	8	0
11.	SD	2	1
Jumlah		55	63

Sumber: Satpol PP dan PK dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2024



Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas sebanyak 401 orang terdiri dari BPBD 63 orang dan Satpol PP dan PK sebanyak 338 terdiri dari orang 55 orang PNS dan 283 orang non PNS.

4.5.5. Hasil Capaian

Hasil capaian merupakan realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.48.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,319,476	1,319,476	100	5.175.356.000	4.794.852.133	92,65
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	463.772	463.772	100	505.091.500	487.195.088	96,46
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.922	2.922	100	208.438.500	206.888.485	99,26
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	21	21	95	1.424.817.822	1.403.104.889	98,48
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	8.593	8.593	100	11.422.470.500	11.169.108.620	97,78
					19.008.050.250	18.331.921.086	96,44

Sumber: Satpol PP dan PK dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas telah mencapai 96,44.%. Untuk mengukur tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks capaian SPM. Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023 berdasarkan penghitungan berikut ini.



1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)

Tabel 4.49.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	1,319,476	1,319,476	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP dan PK (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	694	694	100	20,00
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan PK (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	3	3	100	20,00
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan PK dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	55	55	100	20,00
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	3	3	100	20,00
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	1	1	100	20,00
6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	1	1	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan Tabel di atas IPSPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) tercapai 100%, dikarenakan tidak adanya korban terdampak akibat Penegakan Peraturan Daerah. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) merupakan indikator negatif dimana semakin kecil korban terdampak semakin baik), sehingga ke depan akan dipertahankan untuk seminimal mungkin tidak timbul kerugian baik materiil maupun korban luka.

2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)

Tabel 4.50.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	463.772	463.772	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100	20,00
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.319.476	1.319.476	100	20,00
3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	463.772	463.772	100	20,00
4.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	57	57	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2024



Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebagai salah satu indikator capaian SPM sub Urusan Bencana tercapai 100 % berdasarkan jumlah warga Negara di daerah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan berupa sosialisasi, komunikasi edukasi daerah rawan bencana secara tatap muka maupun melalui media sosial. Sosialisasi, komunikasi edukasi daerah rawan bencana dilakukan tidak hanya oleh BPBD namun juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa. Jumlah warga yang mendapatkan pelayanan adalah 463.772 orang dan semua terlayani sehingga tercapai 100 %.

3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)

Tabel 4.51.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	2.922	2.922	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil <i>rescue</i> , dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	8	8	100	20,00
2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	2.922	2.922	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2024



Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana sebagai salah satu indikator capaian SPM sub Urusan Bencana tercapai 100 % berdasarkan jumlah warga Negara di daerah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan berupa Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kapasitas dilakukan tidak hanya oleh BPBD namun juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa. Jumlah warga yang mendapatkan pelayanan adalah 2.922 orang dan semua terlayani sehingga tercapai 100 %.

4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)

Tabel 4.52.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	21	21	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1	0	0,00	0,00
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	21	21	100	20,00
3.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	429	429	100	20,00
4.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	27	27	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					15,00

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2024



Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebagai salah satu indikator capaian SPM sub Urusan Bencana tercapai 95 % berdasarkan jumlah warga Negara yang mendapatkan pelayanan berupa Pelayanan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini berdasarkan jumlah kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2023 sejumlah 429 kejadian dimana terdapat 21 korban bencana. Dan semua warga Negara terlayani sehingga tercapai 100 %.

5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

Tabel 4.53.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100	100	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	294	294	100	20,00
2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	3	3	100	20,00
3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	354	354	100	20,00
4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	243	243	100	20,00
5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	294	294	100	20,00
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	294	294	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Satpol PP dan PK dan PK Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan Tabel di atas IP_{SPM} Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) tercapai 100%, hal ini karena Damkar berusaha untuk selalu meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Tingkat waktu Tanggap (*respon time*) di bawah 15 menit, dengan adanya 7 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) maka kejadian penyelamatan akan segera direpon oleh Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terdekat. Untuk Tahun 2023 terdapat 115 kejadian kebakaran dengan waktu tanggap 9,59 menit

Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.54.
Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
KATEGORI PENCAPAIAN TRANTIBUM				100	Tuntas Paripurna
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
KATEGORI PENCAPAIAN KEBENCANAAN				98,33	Tuntas Utama
1	Pelayanan informasi rawan bencana	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80,00	15,00	95,00	Tuntas Utama
KATEGORI PENCAPAIAN DAMKAR				100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS				99,44	TUNTAS UTAMA

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebesar 99.44% dengan kategori TUNTAS UTAMA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, sama dengan 99.44%. Meskipun capaian kinerja bidang Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2023 belum mencapai target SPM 100%, karena terdapat beberapa hal yang belum tercukupi pemenuhan kebutuhan SPM nya yaitu:

- Belum semua warga Negara di daerah rawan bencana mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana.
- Belum semua warga Negara di daerah rawan bencana mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terutama di dalam peningkatan kapasitas masyarakat.
- Keterbatasan anggaran sehingga beberapa sub kegiatan pendukung SPM sub urusan bencana tidak dapat terdani.

4.5.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.55.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Damkar
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Tidak ada korban terdampak	Usahakan sesuai SOP agar tidak ada korban terdampak
		Tidak ada standar pasti kebutuhan ganti rugi per korban	Usulkan SHS
		Tidak ada rekening di SIPD untuk input ganti rugi materil/ pengobatan	Usul penambahan rekening ganti rugi

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, 2024

Tabel 4.56.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Kesulitan dalam mengakses data penduduk <i>by name by address</i> , by NIK by KK pada tahapan SPM dikarenakan data tersebut tidak tersedia di Disdukcapil.	Koordinasi dengan Disdukcapil dan menunggu integrasi data kependudukan di dalam e-SPM Bangda
		Pada capaian SPM sub urusan bencana, target setiap triwulan dapat berubah dikarenakan disesuaikan dengan kondisi kejadian bencana yang ada dan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan KIE dan pelatihan yang tidak hanya dibiayai dari APBD murni saja namun juga dibiayai dari dana desa	Penulisan Target disesuaikan dengan realisasi setiap triwulan dikarenakan sulit untuk mnntukan target tahunan karena bencana sewaktu-waktu dapat terjadi.
		Perencanaan kegiatan pendukung SPM tidak semua mendapatkan anggaran atau anggarannya sangat terbatas sehingga capain hanya sebatas yang mendapatkan penganggaran	Koordinasi dengan Bappeda dan Litbangda serta BPPKAD
		Pelaksanaan penerapan SPM sub urusan bencana tidak semua dapat terpenuhi seperti yang tertuang dalam Permendagri 101 tahun 2018 dikarenakan keterbatasan anggaran	Diperlukan koordinasi untuk penambahan anggaran terkait dengan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM
		Pada Tahapan Penerapan SPM Sub urusan bencana dari form 5 a sampai 5 e kesulitan pengisian data penduduknya	Mengintegrasikan data penduduk kedalam aplikasi e-SPM Bangda

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2024



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 telah memberikan arahan dan dukungan konkrit kepada pemerintah daerah untuk melindungi warga negara yang berada di kawasan rawan bencana maupun warga negara yang menjadi korban bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana berorientasi pelayanan dasar dengan tiga layanan, yaitu:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KIE sebagai salah satu sub-layanan);
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Gladi Kesiapsiagaan sebagai salah satu sub-layanan); serta
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (pencarian, pertolongan dan evakuasi sebagai salah satu sub-layanan).

Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sub Urusan Bencana juga telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang secara khusus menyebutkan bahwa penerapan SPM wajib memenuhi 4 (empat) tahapan inti, yaitu

- a. Pendataan kebutuhan;
- b. Perhitungan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. Rencana pemenuhan pelayanan dasar;
- d. Pelaksanaan pelayanan dasar.

Tahapan tersebut dilaksanakan agar penerapan SPM dapat dilakukan lebih terarah dan fokus pada target layanan yaitu pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dengan berbagai tantangan seperti jangkauan wilayah yang luas, banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani, belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi maupun substansi SPM, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta tingkat kerentanan maupun intensitas bencana yang semakin meningkat, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dan kolaborasi sesuai dengan karakteristik dan kapasitas wilayah dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana di tengah tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana di daerah dapat membuat setiap pemerintah daerah lebih siap dan sigap dalam menghadapi bencana sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah korban jiwa ketika terjadi bencana.



4.6. Bidang Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA. Pelayanan Dasar di bidang sosial yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
- Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Minimal Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 4.57.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	748	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	748	Setiap tahun	1.431.621.807
					Penyediaan layanan kedaruratan layanan reaksi cepat	194	Setiap tahun	
					Penyediaan permakanan	748	Setiap tahun	
					Penyediaan sandang	28	Setiap tahun	
					Penyediaan alat bantu	195	Setiap tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	194	Setiap tahun	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	32	Setiap tahun	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2	Setiap tahun	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	8	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	29	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	26	Setiap tahun	
					Layanan rujukan	55	Setiap tahun	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	20	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	20	Setiap tahun	683.509.500
					Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	6	Setiap tahun	
					Penyediaan permakanan	20	Setiap tahun	
					Penyediaan sandang	12	Setiap tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	3	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	18	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	10	Setiap tahun	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	5	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	21	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	12	Setiap tahun	
					Layanan rujukan	5	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	538	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	538	Setiap tahun	1.384.690.973
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	453	Setiap tahun	
					Penyediaan permakanan	538	Setiap tahun	
					Penyediaan sandang	15	Setiap tahun	
					Penyediaan alat bantu	1	Setiap tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	132	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	9	Setiap tahun	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitas layanan kesehatan	2	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	9	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	Setiap tahun	
					Layanan rujukan	12	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis Tuna Sosial Khususnya yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	75	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	18	Setiap tahun	79.790.000
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	10	Setiap tahun	
					Penyediaan permakanan	38	Setiap tahun	
					Penyediaan sandang	32	Setiap tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	75	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	16	Setiap tahun	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	1	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan			
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	70	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	57	Setiap tahun	
					Layanan rujukan	13	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	456	Setiap tahun	Penyediaan permakanan	456	Setiap tahun	330.000.000
					Penyediaan sandang	72	Setiap tahun	
					Penyediaan tempat penampungan pengungsi	20	Setiap tahun	
					Penanganan khusus bagi kelompok rentan	75	Setiap tahun	
					Pelayanan dukungan Psikososial	142	Setiap tahun	
Jumlah								3.909.612.280

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.909.612.280,00.

4.6.3. Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Sosial berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2023, terdiri dari:

Tabel 4.58.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4	5	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1.431.621.807	0	0	0
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	683.509.500	0	0	0
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	1.384.690.973	0	0	0
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti	79.790.000	0	0	0
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	330.000.000	0	0	0
Jumlah		3.909.612.280	0	0	0

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Sosial pada tahun 2023 berasal dari APBD, sedangkan sumber anggaran dari APBN, DAK dan sumber dana lain yang sah tidak tersedia anggaran.

4.6.4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial terdiri dari:

Tabel 4.59.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	2	3
1.	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti d. Rehabilitasi Sosial Dasat Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	
	PNS	6
	Tenaga Kontrak	2
	Pendamping Rehabilitasi Sosial	3
	Relawan/ TKSK	21



No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	2	3
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	PNS	3
	Tenaga Kontrak	3
	Relawan/ tagana	70
Jumlah		108

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial sebanyak 108 orang.

4.6.5. Hasil Capaian

Hasil capaian merupakan realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.60.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	748	748	100	1.431.621.807	1.141.711.169	77,51
2.	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti	20	20	100	683.509.500	659.268.702	70,79
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	538	538	98,46	1.384.690.973	873.427.493	58,90
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti	75	75	100	79.790.000	75.758.511	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	456	456	100	330.000.000	312.129.697	90,24
Jumlah				99,69	3.909.612.280	3.089.645.277	79,03

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024



Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Sosial telah mencapai 79,03%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023 berdasarkan penghitungan berikut ini.

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Tabel 4.61.

Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	748	748	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	748	748	100	20,00
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	194	194	100	20,00
3.	Penyediaan permakanan	748	748	100	20,00
4.	Penyediaan sandang	28	28	100	20,00
5.	Penyediaan alat bantu	195	195	100	20,00
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100	20,00
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	194	194	100	20,00
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	32	32	100	20,00
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak /Bukti dokumen kependudukan	2	2	100	20,00
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	8	8	100	20,00
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	29	29	100	20,00
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	26	26	100	20,00
13.	Layanan rujukan	55	55	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024



Capaian kinerja Jenis Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Kabupaten Magelang Tahun 2023 mencapai target SPM 100%, namun terdapat beberapa hal yang belum tercukupi pemenuhan kebutuhan SPM nya yaitu Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat, pembentukan Tim Reaksi Cepat masih dalam proses Keputusan Bupati.

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Tabel 4.62.
Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	20	20	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	20	20	100	20,00
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	6	6	100	20,00
3.	Penyediaan permakanan	20	20	100	20,00
4.	Penyediaan sandang	12	12	100	20,00
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	3	3	100	20,00
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	18	18	100	20,00
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	10	10	100	20,00
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak /Bukti dokumen kependudukan	2	2	100	20,00
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	5	5	100	20,00
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	21	21	100	20,00
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	12	12	100	20,00
12.	Layanan rujukan	5	5	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024



Capaian kinerja Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Kabupaten Magelang Tahun 2023 mencapai target SPM 100%, namun terdapat beberapa hal yang belum tercukupi pemenuhan kebutuhan SPM nya yaitu Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat, pembentukan Tim Reaksi Cepat masih dalam proses Keputusan Bupati.

3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Tabel 4.63.

Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	538	538	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	538	538	100	20,00
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	453	453	100	20,00
3.	Penyediaan permakanan	538	538	100	20,00
4.	Penyediaan sandang	15	15	100	20,00
5.	Penyediaan alat bantu	1	1	100	20,00
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100	20,00
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	132	132	100	20,00
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	9	9	100	20,00
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	0	0	0	0,00
10.	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	2	2	100	20,00
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	9	9	100	20,00
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	100	20,00
13.	Layanan rujukan	12	12	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					18,46

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024



Capaian kinerja Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Kabupaten Magelang Tahun 2023 mencapai target SPM 100%, namun terdapat beberapa hal yang belum tercukupi pemenuhan kebutuhan SPM nya yaitu Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat, pembentukan Tim Reaksi Cepat masih dalam proses Keputusan Bupati.

- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Tabel 4.64.
Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	75	75	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	18	18	100	20,00
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	10	10	100	20,00
3.	Penyediaan permakanan	38	38	100	20,00
4.	Penyediaan sandang	32	32	100	20,00
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100	20,00
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	75	75	100	20,00
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	16	16	100	20,00
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	100	20,00
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2	2	100	20,00
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	70	70	100	20,00
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	57	57	100	20,00
12.	Layanan rujukan	13	13	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

Capaian kinerja Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Kabupaten Magelang Tahun 2023 mencapai target SPM 100%, namun terdapat beberapa hal yang belum tercukupi pemenuhan kebutuhan SPM nya yaitu Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat, pembentukan tim reaksi cepat masih dalam proses Keputusan Bupati.

5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 4.65.

Indeks Pencapaian Target SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	456	456	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan permakanan	260	260	100	20,00
2.	Penyediaan sandang	120	120	100	20,00
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	30	30	100	20,00
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	20	20	100	20,00
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	4	4	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota tercapai karena dukungan dari berbagai pihak, pilar-pilar sosial selalu siaga dan sigap 24 jam melakukan pelayanan kepada korban bencana, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.

Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung capaian Indeks capaian SPM. Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}), sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.66.
Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	80,00	18,46	98,46	Tuntas Utama
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN SOSIAL				99,69	TUNTAS UTAMA

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebesar 99,69 % dengan kategori TUNTAS UTAMA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, sama dengan 99,69%.

Meskipun capaian kinerja bidang Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023 belum mencapai target SPM 100%, karena terdapat beberapa hal yang belum tercukupi pemenuhan kebutuhan SPM nya yaitu:

- Penyediaan layanan kendaraan darurat hanya ada 1 unit di tingkat kabupaten, tetapi di kecamatan belum tersedia.
- Belum memiliki perbekalan kesehatan.
- Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat, pembentukan tim reaksi cepat masih dalam proses Keputusan Bupati.

4.6.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.67.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Data yang ada tidak dapat terupdate dengan rutin.	Koordinasi dengan pihak desa untuk melakukan pemutakhiran data secara tepat.
		Dalam melakukan pengumpulan data membutuhkan waktu yang lama, data bisa menjadi kurang akurat karena sasaran SPM terutama gelandangan serta pengemis yang mobilitasnya sangat tinggi antar wilayah, bahkan antar kabupaten, banyak yang belum memiliki identitas diri, terutama lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis.	Bekerja sama dengan pihak desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, relawan (TKSK) dan tenaga sosial yang ada di desa untuk mendapatkan data identitas sasaran.
		Pengumpulan data yang membutuhkan waktu lama, sehingga mempengaruhi dalam penghitungan kebutuhan sasaran.	Melakukan pencermatan terhadap data dasar,
		Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar yang didata tahun berjalan untuk diusulkan mendapatkan bantuan kebutuhan dasar pada tahun N+1, sehingga terkadang sasaran sudah tidak tepat dengan berbagai alasan.	Melakukan advokasi untuk pelaksanaan tahun berikutnya pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.
2.	Eksternal	Pemenuhan kebutuhan dasar dihitung berdasarkan jumlah sasaran, tetapi terkendala dengan anggaran yang tersedia	Bekerjasama dengan lintas sektor dan pihak swasta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar sasaran, terutama untuk pemenuhan alat bantu kepada disabilitas

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

4.7. Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan

Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD. Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Kabupaten Magelang Tahun 2023 pada 6 (enam) bidang urusan sebagaimana diuraikan di bawah ini.



4.7.1. Bidang Urusan Pendidikan

Perencanaan Pembangunan Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan serta Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Bidang Urusan Pendidikan, selain itu pelaksanaan SPM Berdasarkan Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan serta Mekanisme Penganggaran Standar Pelayanan Minimal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 4.68.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2023

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.721.238.994,250
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	829.093.970,978
3.	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker Perangkat Daerah	245.902.999,942
	APBD	245.902.999,942
	a. APBD Murni	0
	b. APBD DAU	46.825.797,409
	c. APBD DAK Fisik	57.159.401,000
	d. APBD DAK Non Fisik	141.917.801,533
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	a. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	0
	APBN	0
	a. APBN-Dekonsentrasi	0
	b. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024

Pelaksanaan SPM bidang urusan Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.69.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
		245.906.999.942	238.228.973.937	96,88
1.	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	27.554.481.508	26.721.318.952	96,98
	1 Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	18.366.076.655	18.241.398.783	99,32
	1 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	18.366.076.655	18.241.398.783	99,32
	2 Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	9.188.404.853	8.479.920.169	92,29
	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	7.172.767.000	6.506.707.626	90,71
	2 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	2.015.637.853	1.973.212.543	97,90
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR	185.678.539.304	181.670.304.378	97,84
	1 Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	122.405.804.363	121.925.666.203	99,61
	1 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	977.125.000	513.474.380	52,25
	2 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	121.428.679.363	121.412.191.823	99,99
	2 Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	63.272.734.941	59.744.638.175	94,42
	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	2.498.149.500	2.408.199.405	96,40
	2 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	60.106.585.441	56.679.730.165	94,30
	3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	668.000.000	656.708.605	98,31
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	6.361.203.290	5.805.497.411	91,26
	1 Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	5.797.100.000	5.285.506.915	91,18
	1 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	5.797.100.000	5.285.506.915	91,18
	2 Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	238.385.215	201.515.065	84,53
	1 Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	238.385.215	201.515.065	84,53
	3 Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	325.718.075	318.475.431	97,78
	1 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	325.718.075	318.475.431	97,78
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA			
	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.174.596.040	22.978.618.246	91,28
	2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.138.179.800	1.053.234.950	92,54

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024



4.7.2. Bidang Urusan Kesehatan

SPM berfungsi sebagai *instrument* untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting* bidang kesehatan dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Ke depannya nanti pengalokasian dan penyaluran DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Tabel 4.70.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2023

No.	PENDANAAN	PAGU
1	2	3
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.721.238.994.250
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	244.540.199.444
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	8.440.294.595
	APBD	8.440.294.595
	a. APBD Murni	0
	b. APBD DAU	1.319.650.221
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	7.120.644.374
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	a. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	0
	APBN	0
	a. APBN-Dekonsentrasi	0
	b. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Pelaksanaan SPM bidang urusan Kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.72.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2023

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.721.238.994.250
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	116.203.872.976
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	25.152.664.000
	APBD	19.880.660.000
	a. APBD Murni	
	b. APBD DAU	1.532.551.500
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	18.348.108.500
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	a. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	a. APBN-Dekonsentrasi	0
	b. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	5.272.004.000

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2024

Pelaksanaan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.73.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.834.654.250	28.781.230.545	99,81
		12.396.892.250	12.348.567.151	99,61
	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.396.892.250	12.348.567,151	99,61
	1 Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	2.413.983.820	2.378.346,158	99,52
	2 Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	6.381.786.000	6.375.985,735	99,91
	3 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	3.601.122.430	3.594.235,258	99,81
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.195.758.000	7.190.659.394	99,93
	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.195.758.000	7.190.659,394	99,93
	1 Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	3.503.237,800	3.501.636,321	99,95
	2 Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	3.692.520,200	3.689.023,073	99,91
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA			
	1 IBM Pamsimas	2.400.000,000	2.400.000,000	100,00
	2 IBM Sanimas SPALD-S	3.850.000,000	3.850.000,000	100,00
	3 Bantuan Keuangan Khusus BKK Air Minum	1.365.000,000	1.365.000,000	100,00
	4 Sharing DAK Air Minum (APBDes)	1.627.004,000	1.627.004,000	100,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2024



4.7.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pemerintah daerah semakin berkomitmen untuk memprioritaskan perencanaan dan penganggarannya di bidang urusan perumahan rakyat, sebagaimana data tahun 2021 dan 2022 di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), diketahui terjadi peningkatan alokasi anggaran. Hal ini utamanya dalam rangka penerapan SPM.

Tabel 4.74.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang
Tahun 2023

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.721.238.994.250
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	5.438.516.907
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	296.496.434
	APBD	296.496.434
	a. APBD Murni	0
	b. APBD DAU	296.496.434
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	a. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	a. APBN-Dekonsentrasi	0
	b. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2024

Pelaksanaan SPM bidang urusan Perumahan Rakyat diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.75.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
		296.496.434	244.624.737	82.51
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	296.496.434	244.624.737	82.51
	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	73.211.434	48.690.090	65.61
	1 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	48.801.434	28.753.886	58,92
	2 Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	24.410.000	19.936.204	81,67
	2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	223.285.00 0	195.934.647	87.75
	1 Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	223.285.00 0	195.934.647	87,75

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2024

4.7.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan trantibumlinmas dilaksanakan dalam beberapa program. Adapun pendanaan bidang urusan trantibumlinmas dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.76.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Satpol PP dan PK Serta BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2023

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.721.238.994.250
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	28.891.691.335
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	19.008.050.250
	APBD	19.008.050.250
	a. APBD Murni	0
	b. APBD DAU	19.008.050.250
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	a. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	a. APBN-Dekonsentrasi	0
	b. APBN-Tugas Pembantuan	0
4.	Dana Lainnya (Dana Desa)	42.739.942.720

Sumber: Satpol PP & PK, BPBD Kabupaten Magelang, 2024



Pelaksanaan SPM bidang urusan Trantibumlinmas diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.77.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten magelang Tahun 2023

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS	19.008.050.250	18.331.921.086	96,44
	TRANTIBUMLINMAS	5.175.356.000	4.794.852.133	92,65
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	5.175.356.000	4.794.852.133	92,65
	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.130.456.000	4.016.752.163	97,25
	1 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini. pembinaan dan penyuluhan. pelaksanaan patroli. pengamanan. dan pengawalan	2.798.072.000	2.733.776.736	97,70
	2 Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	180.000.000	175.740.199	97,63
	3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	351.624.000	349.094.675	99,28
	4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	250.000.000	246.429.833	98,67
	5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	316.760.000	292.816.509	92,44
	6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	132.000.000	130.193.486	98,63
	7 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	80.000.000	79.439.800	99,30
	8 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	10.000.000	8.908.750	89,09
	9 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	12.000.000	352.175	2,93
	2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.014.900.000	767.436.370	75,62
	1 Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	190.000.000	178.337.500	93,86
	2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan	208.000.000	152.632.435	73,38



No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
		Peraturan Bupati/Wali Kota			
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	616.900.000	436.466.435	70,75
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	30.000.000	10.663.600	35,55
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	30.000.000	10.663.600	35,55
KEBENCANAAN					
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)		2.410.224.250	2.367.960.333	98.25
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	505.091.500	487.195.088	96,46
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	109.091.500	107.721.600	98,74
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	396.000.000	379.473.488	95,83
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	208.438.500	206.888.485	99,26
	1	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	141.180.000	140.001.985	99,17
	2	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	32.100.000	32.100.000	100
	3	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	35.158.500	34.786.500	98,94
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.424.817.822	1.403.104.889	98,48
	1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	254.142.000	242.356.310	95,36
	2	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	576.181.580	573.906.300	99,61
	3	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	594.494.242	586.842.279	98,71
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	271.876.428	174.821.780	99,93
	1	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	174.951.720	66.525.200	99,29
	2	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	96.924.708	95.950.091	98,99
KATEGORI PENCAPAIAN DAMKAR			11.422.470.000	11.169.108.620	97.78
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)		11.422.470.000	11.169.108.620	97.78
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.422.470.000	11.169.108.620	97.78
	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	328.000.000	285.967.370	87,19
	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	7.202.720.000	7.108.533.833	98,69
	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	384.000.000	358.322.017	93,31
	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.467.750.000	3.381.435.400	97,51
	5	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	40.000.000	34.850.000	87,13

Sumber: Satpol PP & PK, BPBD Kabupaten Magelang, 2024



4.7.6. Bidang Urusan Sosial

Penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan trantibumlinmas dilaksanakan dalam beberapa program. Adapun pendanaan bidang urusan trantibumlinmas dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.78.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2023

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.721.238.994.250
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan)	37.350.470.580
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	3.909.612.280
	APBD	3.909.612.280
	h. APBD Murni	
	i. APBD DAU	3.909.612.280
	j. APBD DAK Fisik	0
	k. APBD DAK Non Fisik	0
	l. Dana Bagi Hasil	
	m. Kerjasama	
	n. Otonomi Khusus	
	Non APBD	
	c. Corporate Social Responsibility (CSR)	
	APBN	
	b. APBN-Dekonsentrasi	
	d. APBN-Tugas Pembantuan	
	Dana Lainnya	

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

Pelaksanaan SPM bidang urusan Sosial diampu oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.79.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	BIDANG URUSAN SOSIAL	3.909.612.280	3.089.645.277	79,03
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.719.612.280	2.911.008.244	78,26
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.389.612.280	2.598.878.547	76,67
	1 Penyediaan alat bantu	578.500.000	469.874.800	81,12
	2 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	7.000.000	6.237.554	89,11
	3 Pemberian bimbingan fisik. mental. spiritual. dan sosial	2.457.309.500	1.811.909.500	73,74
	4 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar. serta gelandangan pengemis dan masyarakat	86.400.000	80.446.173	93,11
	5 Pemberian layanan kedaruratan	245.402.780	218.586.965	89,07
	6 Pemberian layanan rujukan	15.000.000	11.823.555	78,22
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	330.000.000	312.129.697	94,58
	1 Penyediaan makanan	97.876.150	97.745.665	99,87
	2 Penyediaan sandang	50.000.000	45.359.245	90,72
	3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi	90.000.000	89.542.860	99,49
	4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	42.123.850	34.396.023	81,65
	5 Pelayanan dukungan Psikososial	50.000.000	45.085.904	90,17

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

Hal yang menjadi isu dalam implementasi SPM saat ini salah satunya adalah kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan pemenuhan SPM, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam membangun koordinasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan SPM. Berkaitan dengan itu pemerintah daerah perlu perlu memilah program dan kegiatan (sesuai Kepmendagri nomor 900-1317 Tahun 2023) yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh dinas terkait.

Terkait isu dan permasalahan tersebut diatas, diperlukan strategi pengimplementasian SPM oleh Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah yang diwujudkan melalui dukungan kebijakan, program kegiatan serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung terselenggaranya SPM sub urusan Bencana dan memastikan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah.
3. Daerah wajib menyusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah



4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM.
5. Penerapan SPM perlu didukung oleh data yang valid dan terukur dengan pemenuhan yang dilakukan secara bertahap.
6. Pelibatan dan kolaborasi multi pihak (*pentahelix*) dalam implementasi SPM sub urusan Bencana.
7. Penguatan sosialisasi dan pelatihan terkait penerapan SPM sub urusan Bencana baik secara teknis, substansi maupun administrasi.

Berdasarkan hasil Laporan Penerapan SPM Kabupaten Mgaelang Tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan SPM di Kabupaten Magelang Tahun 2023 belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa capaian bidang urusan belum mencapai target SPM yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu dengan target sebesar 100% (seratus persen). Adapun capaian penerapan SPM Kabupaten Magelang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.80.
Capaian Penerapan SPM Kabupaten Magelang Tahun 2023

No.	Bidang Urusan	Target Pencapaian SPM (%)	Capaian SPM 2022 (%)	Capaian SPM 2023 (%)	Kategori Indeks SPM
1.	Pendidikan	100	93,59	94,71	Tuntas Utama
2.	Kesehatan	100	82,99	89,55	Tuntas Madya
3.	Pekerjaan Umum	100	92,83	93,61	Tuntas Utama
4.	Perumahan Rakyat	100	100	100	Tuntas Paripurna
5.	Trantibumlinmas	100	100	99,44	Tuntas Utama
6.	Sosial	100	100	99,69	Tuntas Utama
	Rata-rata/jumlah	100	94,90	96,17	TUNTAS UTAMA

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Berdasarkan bidang urusan dan jenis SPM, maka Bidang Urusan Perumahan Rakyat dengan predikat TUNTAS PARIPURNA, dari sekumpulan indikator yang tertera dalam SPM. Bidang urusan lainnya seperti Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan dan Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Trantibumlinmas dan Bidang Urusan Sosial tingkat capaiannya belum mencapai predikat TUNTAS PARIPURNA. Capaian penerapan SPM Kabupaten Magelang Tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan SPM di Kabupaten Magelang, diperlukan penghitungan awal target sasaran penerima layanan dasar SPM, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran penerima layanan dasar SPM, pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah dan evaluasi pelaksanaan SPM. Evaluasi penerapan SPM diperlukan sebagai kajian bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang di tahun berikutnya. Oleh karena itu kami menerima masukan, kritik dan saran terkait penerapan SPM di Kabupaten Magelang agar dapat tercapai hasil yang optimal.

BAB V

PENUTUP



LPPD KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023



BAB V PENUTUP

LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019–2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Magelang Tahun 2023, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Keberhasilan serta prestasi yang telah diraih selama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun dari pihak lain yang turut mengapresiasi patut disyukuri mengingat keberhasilan dimaksud diperoleh dengan cara yang tidak mudah dan penuh perjuangan. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya untuk dapat berkarya, bekerja keras dan berusaha seoptimal mungkin serta dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada dalam mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat. Namun demikian, masih perlu upaya-upaya yang lebih maksimal untuk dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi ke depan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-haknya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semoga apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan ke Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 arah yang lebih baik lagi dan apa yang menjadi catatan dan koreksi akan dilakukan perbaikan untuk tahap pelaksanaan selanjutnya.



Melalui kesempatan ini, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jalinan komunikasi yang telah berlangsung. Semoga hasil pembangunan yang telah diraih Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 dapat dirasakan ke seluruh pelosok wilayah serta menyentuh semua lapisan masyarakat.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023 ini disusun untuk digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Evaluasi LPPD dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan.



LAMPIRAN

01 Lampiran IKK OUTPUT

33 Lampiran IKK OUTCOME

43 Lampiran IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

LAMPIRAN 2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Pendidikan	PENDIDIKAN PAUD						DISDIKBUD
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Unit	677.00	677.00		
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	12,005.00	12,005.00		
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	26,765.00	26,765.00		
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Orang	2,151.00	2,151.00		
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Orang	2,378.00	2,378.00		
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	151.00	151.00		
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	1,261.00	1,261.00		
		PENDIDIKAN DASAR						DISDIKBUD
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Unit	733.00	733.00		
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	76,415.00	76,415.00		
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	38,440.00	38,440.00		
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	76,415.00	76,415.00		
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	38,440.00	38,440.00		
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	5,505.00	5,505.00				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah
					Elemen data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	4,690.00	4,690.00	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Orang	5,765.00	5,765.00	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	2,467.00	2,467.00	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	1,788.00	1,788.00	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	1,206.00	1,206.00	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	736.00	736.00	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	515.00	515.00	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	5,531.00	5,531.00	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	2,347.00	2,347.00	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	596.00	596.00	
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	121.00	121.00	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	664.00	664.00	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	443.00	443.00	
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA							
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Unit	733.00	733.00	DISDIKBUD

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah
					Elemen data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	76,415.00	76,415.00	
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	38,440.00	38,440.00	
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	76,415.00	76,415.00	
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	38,440.00	38,440.00	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	5,505.00	5,505.00	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	4,690.00	4,690.00	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Orang	5,765.00	5,765.00	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	2,467.00	2,467.00	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	1,788.00	1,788.00	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	1,206.00	1,206.00	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	736.00	736.00	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	515.00	515.00	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	5,531.00	5,531.00	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	2,347.00	2,347.00	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	596.00	596.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah		
					Elemen data	Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7	8		
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	121.00	121.00	DISDIKBUD		
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	664.00	664.00			
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	443.00	443.00			
		PENDIDIKAN KESETARAAN							
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Orang	19.00	19.00			
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	3,480.00	3,480.00			
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	3,480.00	3,480.00			
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang	193.00	193.00			
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang	193.00	193.00			
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	193.00	193.00			
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	596.00	596.00			
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	21.00	21.00					
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan							
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar (negeri dan Swasta)	Unit	6.00	6.00	DINKES		
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit	6.00	6.00			
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil							
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	paket	129,813.00	129,813.00	DINKES				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	1,401.00	1,401.00		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	paket	44,323.00	44,323.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	1,401.00	1,401.00		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	paket	92,311.00	92,311.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	1,400.00	1,400.00		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	paket	641,775.00	641,775.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		15,722.00	15,722.00		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	paket	83,379.00	83,379.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	23,969.00	23,969.00		
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	set	574,207.00	574,207.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2,602.00	2,602.00		
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	paket	30,316.00	30,316.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3,841.00	3,841.00		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	set	363.00	363.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	145.00	145.00		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	set	59,265.00	59,265.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	145.00	145.00		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	paket	2,521.00	2,521.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	92.00	92.00		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	paket	92,235.00	92,235.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1,318.00	1,318.00		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	paket	36,880.00	36,880.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	188.00	188.00		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir						
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	Ha	0.00	0.00	DPRKP	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	M	0.00	0.00		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	Ha	0.00	0.00		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	M	0.00	0.00		
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Ada/Tidak	Tidak	Tidak		
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	Ada/Tidak	Tidak	Tidak		
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Jumlah	0.00	0.00		
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman						
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	Ha	0.00	0.00	DPRKP	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	M	0.00	0.00		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	Ha	0.00	0.00		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	M	0.00	0.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Ada/Tidak	Tidak	Tidak		
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	Ada/Tidak	Tidak	Tidak		
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Jumlah	0.00	0.00		
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi						
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	%	14,635.97 23,608.00	62.00	DPUPR	
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	599,933.44 887,117.00	67.63		
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	%	273,830.64 453,985.80	60.32		
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan						
		1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	DPUPR	
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota	Ada/Tidak	Tidak	Tidak		
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggaraan SPAM	BUMD/UPTD	0.00	0.00		
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Izin	0.00	0.00		
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Kerjasama	0.00	0.00		
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik						
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Rumah	401,987.00	401,987.00	DPUPR	
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Rumah	7,392.00	7,392.00		
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Rumah	409,379.00	409,379.00		
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah	0.00	0.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah
					Elemen data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Rumah	0.00	0.00	
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Rumah	409,379.00	409,379.00	
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	%	401,987.27 447,308.00	89.87	
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	%	401,987.27 447,308.00	89.87	
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	%	7,392.00 447,308.00	1.65	
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	%	409,379.27 447,308.00	91.52	
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%	0.00 0.00	0.00	
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	%	0.00 0.00	0.00	
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	%	409,379.27 447,308.00	91.52	
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	%	0.00 0.00	0.00	
6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota							
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	32.00 32.00	100.00	DPMPTSP
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting	Izin	169.00	169.00	DPMPTSP
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Ada	Ada	DPUPR
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Ada	Ada	
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Bangunan	127.00	127.00	
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kota	Bangunan	6.00	6.00	
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kota	Bangunan	10,193.00	10,193.00	
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat	Bangunan	10,193.00	10,193.00	
7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten							

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		1	Panjang jalan dan jembatan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kota	KM	1,020.66	1,020.66	DPUPR	
		2	Panjang jalan yang dibangun	KM	0.40	0.40		
		3	Panjang jembatan yang dibangun	M	0.00	0.00		
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan	KM	30.95	30.95		
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	M	35.50	35.50		
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	KM	2.75	2.75		
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	M	0.00	0.00		
		8	Panjang jalan yang dipelihara	KM	179.17	179.17		
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	M	235.00	235.00		
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi						
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten	Orang	0.00	0.00	DPUPR	
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten	Orang	125.00	125.00		
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten	Orang	30.00	30.00		
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBD kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBN	Ada/Tidak	Tidak	Tidak		
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/Tidak	Tidak	Tidak		
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada/Tidak	Ada	Ada		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah
					Elemen data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada/Tidak	Ada	Ada	
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	Ada/Tidak	Ada	37.00	
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Tidak	0.00	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten	Badan Usaha	0.00	0.00	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten	Badan Usaha	0.00	0.00	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten	Badan Usaha	0.00	0.00	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	Badan Usaha	37.00	37.00	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	izin	0.00	0.00	
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Pengawasan	0.00	0.00	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Kecelakaan Konstruksi	0.00	0.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Pengawasan	0.00	0.00		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten						
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Unit	35,491.00	35,491.00	BPBD	
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Unit	442.00	442.00		
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa Korban yang rumahnya terkena bencana alam/bencana yang terfasilitasi		463.00	463.00		
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	0.00	0.00		
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Unit	0.00	0.00		
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	0.00	0.00		
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Unit	0.00	0.00		
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Orang	35.00	35.00		
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Ha	0.00	0.00		
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota						
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	0.00	0.00	DPRKP	
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	0.00	0.00		
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	0.00	0.00		
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	43.00	43.00		
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	0.00	0.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Ha	0.06	0.06		
			3. Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani					
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha	Ha	111.34	111.34		
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	1,364.00	1,364.00		
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Ha	7.82	7.82		
			4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
		1	Jumlah rumah di kab/kota	Rumah	363,326.00	363,326.00	DPRKP	
		2	Jumlah unit PK RTLH	Rumah	1,364.00	1,364.00		
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	Rumah	17,631.00	17,631.00		
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Rumah	0.00	0.00		
		5	Rasio rumah dan KK	%	441,593.00	1.22		
					363,326.00	363,326.00		
		6	Jumlah rumah pembangunan baru		228.00	228.00		
			5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Perumahan	153.00	153.00	DPRKP	
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Rumah	14,385.00	14,385.00		
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Rumah	14,385.00	14,385.00		
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (<i>on site / off site</i>)	Rumah	14,385.00	14,385.00		
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Perumahan	14,385.00	14,385.00		
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Rumah	14,385.00	14,385.00		
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Pengembang	0.00	0.00		
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Pengembang	23.00	23.00		
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Pengembang	0.00	0.00		
			1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					
5	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani	Jumlah	310.00	310.00	SATPOL PP	
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	20.00	142.00		
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah	12.00	12.00		
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Perda&Perkada	3.00	3.00		
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP	3.00	3.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana						
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	1.00	1.00	BPBD	
					1.00			
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	%	463,772.00	34.82		
					1,331,921.00			
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	1.00	1.00	BPBD	
					1.00			
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	3.00	1.00		
					3.00			
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	2,922.00	1.00		
					2,922.00			
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	2,922.00	0.00		
					1,331,921.00			
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan	%	462,477.00	34.72		
					1,331,921.00			
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	84.00	0.00		
					1,331,921.00			
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	%	0.00	0.00	BPBD	
					0.00			
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	4.00	1.00		
					4.00			
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	80.00	100.00		
					80.00			
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	21.00	100.00		
					21.00			
		5. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota	Layanan	2,097.00	2,097.00	SATPOL PP	
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Pos	8.00	8.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Orang	56.00	56.00		
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Pos	0.00	0.00		
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sarpras	763.00	763.00		
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	246.00	246.00		
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Orang	3,480.00	3,480.00		
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Kegiatan	3.00	3.00		
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi						
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah	1,324.00	1,324.00	DINSOS PPKB PPPA	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Orang	1,058.00	1,058.00		
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Orang	0.00	0.00		
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Orang	1,058.00	1,058.00		
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	1.00	1.00		
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang	1,344.00	1,344.00		
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	jumlah	1.00	1.00		
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang	87.00	87.00		
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Orang	196.00	196.00		
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	buah	6.00	6.00		
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Paket	0.00	0.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Orang	0.00	0.00		
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Orang	2.00	2.00		
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Orang	28.00	28.00		
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Orang	419.00	419.00		
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	bimbingan sosial	67.00	67.00		
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Orang	5.00	5.00		
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Orang	17.00	17.00		
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	129.00	129.00		
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Orang	105.00	105.00		
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Orang	85.00	85.00		
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana						
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Orang	456.00	456.00	DINSOS PPKB PPPA	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Orang	72.00	72.00		
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Penampungan	20.00	20.00		
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Paket	75.00	75.00		
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang	142.00	142.00		
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	173.00	173.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah		
					Elemen data	Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7	8		
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja						DISPERINNAKER	
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada			
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	%	0.00	0.00			
					0.00	0.00			
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten	Perusahaan	0.00	0.00			
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi							DISPERINNAKER
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%	20.00	100.00			
					20.00				
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	12.00	92.31			
					13.00				
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	13.00	4.06			
					320.00				
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	%	6.00	9.52			
					63.00				
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	63.00	100.00			
					63.00				
		6	Jumah penganggur yang dilatih	Orang	200.00	0.00			
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	317.00	0.99			
					320.00				
		8	Persentase penyerapan lulusan	%	129.00	0.40			
					320.00				
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	%	240.00	100.00			
					240.00				
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang	%	561.00	100.00			
					561.00				
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		100.00	100.00			
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja							DISPERINNAKER
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	0.00	0.00			
					0.00				
		2	Data tingkat produktivitas total		0.00	0.00			
					0.00	0.00			
					0.00	0.00			
		4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar							

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah
					Elemen data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	122.00 296.00	41.22	DISPERINNAKER
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	%	22.00 48.00	45.83	
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	SP/SB	48.00	48.00	
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	%	58.00 122.00	47.54	
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	718.00 718.00	100.00	
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	6.00 402.00	1.49	
		7	Jumlah mogok kerja	Mogok	1.00	1.00	
		8	Jumlah penutupan perusahaan	Perusahaan	0.00	0.00	
		9	Jumlah perselisihan kepentingan	Perselisihan	0.00	0.00	
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Perselisihan	0.00	0.00	
		11	Jumlah perselisihan PHK	Perselisihan	6.00	6.00	
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Orang	223.00	223.00	
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	Perselisihan	6.00	6.00	
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	LKS	45.00	45.00	
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	6.00 223.00	2.69	
5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah							
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten	Lowongan Kerja	1,471.00	1,471.00	DISPERINNAKER
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Orang	2,121.00	2,121.00	
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	BKK	39.00	39.00	
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kota	Orang	0.00	0.00	
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang	3.00	3.00	
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Lembaga	0.00	0.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota	Perjanjian	0.00	0.00		
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	orang	0.00	0.00		
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Orang	40.00	40.00		
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang	561.00	561.00		
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	%	4.00	#DIV/0!		
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan	%	200.00	0.00		
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	%	40.00	25.81		
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	%	0.00	0.00		
					0.00			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD						
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kota yang telah dilatih PUG	Lembaga	7.00	7.00	DINSOS PPKB PPPA	
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten	Prog/Keg	10.00	10.00		
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota						
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media Massa	1.00	1.00	DINSOS PPKB PPPA	
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	4.00	4.00		
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	71.00	100.00		
					71.00			
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	4.00	4.00		
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah kabupaten (APBD)	Lembaga	0.00	0.00		
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak						
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan	Organisasi	29.00	29.00	DINSOS PPKB PPPA	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih	Orang	30.00	30.00		
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	29.00	29.00		
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	Lembaga	0.00	0.00		
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kebijakan/Program	1.00	1.00		
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Lembaga	4.00	4.00		
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	62.00	100.00		
					62.00			
9	Pangan	1. Persentase Cadangan Pangan						
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada	DISTAN PANGAN	
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/Tidak	Tidak	Tidak		
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	Ada	Ada		
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi						
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	%	0.00	0.00	DPMPTSP	
					0.00			
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/	%	0.00	0.00	DPUPR	
					0.00			
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	%	0.00	0.00		
					0.00			
		4	Dokumen Izin membuka tanah	%	0.00	0.00		
					0.00			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kota	%	0.00	0.00		
					0.00			
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kota						
		1	Hasil Perhitungan kota terhadap :				DLH	
			a) Indeks Kualitas Air,(IKA)		54.07	54.07		
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)		89.55	89.55		
			c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		42.01	42.01		
		2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kota						
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kota	%	123,798.87	123,798.87	DLH	
				hari				
				%				
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh						
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	%	78.00	100.00	DLH	
					78.00			
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang	%	0.00	0.00		
					0.00			
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten dalam 1 kabupsten	%	0.00	0.00		
					0.00			
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	%	0.00	0.00		
					0.00			
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	15.00	15.00		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Perekaman KTP Elektronik						
		1	Penerbitan akta perkawinan	%	100.00	1.00	DISDUKCAPIL	
					100.00			
		2	Penerbitan akta perceraian	%	100.00	1.00		
					100.00			
		3	Penerbitan akta kematian	%	100.00	1.00		
					100.00			
		4	Penyajian data kependudukan	%	3.00	3.00		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	0.00	0.00	DISPERMADES	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	0.00	0.00		
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	6.00	6.00		
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	24.00	24.00		
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	0.00	0.00	DISPERMADES	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	0.00	0.00		
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	6.00	6.00		
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	24.00	24.00		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)						
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/Tidak	Ada	Ada	DINSOS PPKB PPPA	
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Nilai Tengah	29.16	29.16		
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		24.40	24.40	DINKES	
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		319,423.00 395,870.00	80.69	DINSOS PPKB PPPA	
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stakeholder	175,899.00	175,899.00		
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)						
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	58.00 61.00	95.08	DINSOS PPKB PPPA	
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	53,127.00 144,786.00	36.69		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		3	Pemerintah Daerah kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		372.00	372.00		
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	240.00	25.08		
					957.00			
			3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
		1	Persentase kesertaan KB di kabupaten dengan kesertaan rendah	%	5.00	23.81		
					21.00			
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	2,783.00	1.20		
					232,124.00			
15	Perhubungan		1. Rasio konektivitas kabupaten					
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	%	8.86	26.68	DISHUB	
					17.00			
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	12,916.00	51.54		
					25,062.00			
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	0.00	0.00		
					0.00			
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	%	116.51	123.91		
					94.03			
			2. V/C Ratio di Jalan kota					
		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	%	116.51	1.24		
					94.03			
16	Komunikasi dan Informatika		1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan	%	43.00	91.49	DISKOMINFO	
					47.00			
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	47.00	100.00		
					47.00			
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada/Tidak	Ada	Ada		
			2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi					
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara	%	19.00	100.00	DISKOMINFO	
					19.00			
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	47.00	100.00		
					47.00		Bag Organisasi	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah
					Elemen data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan	%	16.00	34.04	DISKOMINFO
					47.00		Bag Organisasi
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen	%	7.00	100.00	DISKOMINFO
					7.00		Bag Organisasi
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat	%	5.00	11.36	DISKOMINFO
					44.00		Bag Organisasi
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	3.00	18.75	DISKOMINFO
					16.00		
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	13.00	100.00	DISKOMINFO
					13.00		Bag Organisasi
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	43.00	91.49	DISKOMINFO
					47.00		Bag Organisasi
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	43.00	91.49	DISKOMINFO
					47.00		Bag Organisasi
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	47.00	100.00	DISKOMINFO		
			47.00		Bag Organisasi		
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	2,293.00	100.00	DISKOMINFO		
			2,293.00				
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	33.00	70.21	DISKOMINFO		
			47.00		Bag Organisasi		
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	7.00	1.00	DISKOMINFO		
			7.00				
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/tidak	Ada	Ada			
3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas							
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan	%	52.00	0.98	DISKOMINFO
					53.00		
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi	%	7.00	100.00	
					7.00		
3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan	%	7.00	100.00			
			7.00				
17	Koperasi dan UKM	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas					
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah	%	9.00	100.00	DPMPTSP
					9.00		
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh	%	6.00	0.00	
					6.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah		
					Elemen data	Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7	8		
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	90.00 476.00	0.19	DISDAGKOP UKM		
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	%	92.00 181.00	50.83			
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	91.00 476.00	19.12			
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah	%	381.00 240,758.00	0.16			
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah	%	3.00 476.00	0.63			
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			Tidak Perlu Diisi			
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	%	160.00 476.00	33.61			
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	%	6.00 476.00	1.26			
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten	%	19.00 476.00	0.04			
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan	%	219.00 476.00	46.01			
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota	%	22.00 476.00	0.05			
		2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha							
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	0.00 89,048.00	0.00		DISDAGKOP UKM	
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	21,043.00 89,048.00	23.63	DPMPTSP		
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	22.00 89,048.00	0.02	DISDAGKOP UKM		
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	178.00 0.00	0.00			
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	81.00 88,967.00	0.09			
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	452.00 89,048.00	0.51			
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	%	701.00 89,048.00	0.79			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di kota						
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah koabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	DPMPTSP	
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada/Tidak	Tidak	Tidak		
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah Laporan	0.00	0.00		
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah Kegiatan	15.00	15.00		
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah Kegiatan	0.00	0.00		
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan	0.00	0.00		
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Konsultasi	796.00	796.00		
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	44,496.00	44,496.00		
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah Realisasi (Rupiah)	4,891,094,889,693.00	4,891,094,889,693.00		
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota serta kota	Jumlah Aparatur	1,294.00	1,294.00		
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah Perusahaan	90.00	90.00		
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kota	%	21.00	100.00		
					21.00		1.00	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri						
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	35.00	35.00	DISPARPORA	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Orang	0.00	0.00		
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan						

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Orang	60.00	60.00		
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	86.00	86.00		
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga						
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Orang	17.00	17.00		
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Event	5.00	5.00		
20	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan						DISKOMINFO
		1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Ada	Ada		
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survey	5.00	5.00		
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Kompilasi	12.00	12.00		
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survey	5.00	5.00		
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah Kompilasi	12.00	12.00		
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	%	17.00	1.00		
		7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	%	628.00	1.00		
					628.00			
21	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah						DISKOMINFO
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah	%	2.00	100.00		
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen	%	1.00	6.25		
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	9.00	56.25		
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang	%	40.00	100.00		
					40.00			
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya						

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah
					Elemen data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Obyek	1,030.00	1,030.00	DISDIKBUD
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Obyek	0.00	0.00	
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Obyek	235.00	235.00	
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Orang	90.00	90.00	
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Cagar Budaya	55.00	55.00	
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Cagar Budaya	1.00	1.00	
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kota ke luar kota dengan dukungan data	Cagar Budaya	0.00	0.00	
		8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	Cagar Budaya	0.00	0.00	
		9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Cagar Budaya	0.00	0.00	
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Koleksi	0.00	0.00	
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Orang	0.00	0.00	
		12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0.00	Tidak Perlu Diisi	
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tim	0.00	0.00	
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Tim	1.00	1.00	
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Orang	0.00	0.00	
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Orang	90.00	90.00	
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Orang	0.00	0.00	
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Unit	0.00	0.00	
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0.00	0.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat						DISPUSPA
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	47,275.00	3.55		
					1,331,921.00			
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	63,889.00	4.80		
					1,331,921.00			
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	392.00	0.03		
					1,331,921.00			
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	64.00	6.84		
					935.00			
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		282.00	282.00		
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat						DISPUSPA
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Naskah Kuno	2.00	2.00		
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Naskah Kuno	2.00	2.00		
3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Budaya Etnis	957.00	957.00				
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40						DISPUSPA
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	3,299.00	58.47		
					5,642.00			
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	16,876.00	101.66		
					16,600.00			
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	1,366.00	170.75		
					800.00			
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	32.00	0.50		
					6,442.00			
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara						DISPUSPA
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Jumlah Arsip	30,165.00	30,165.00		
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Jumlah Arsip	867.00	867.00		
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota	Jumlah Arsip	1,109.00	1,109.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK	Jumlah Arsip	3,505.00	3,505.00		
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Jumlah Arsip	0.00	0.00		
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota yang sesuai NSPK	Jumlah Arsip	1.00	1.00		
Urusan Pilihan								
25	Kelautan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)						
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		170.00	143.00	DISPETERIKAN	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	%	0.00	0.00		
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam (satu) Daerah kota /kota yang diterbitkan	Izin	133.00	133.00		
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Pembudidaya	575.00	575.00		
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Benih	1,842,367,000.00	1,842,367,000.00		
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan						
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		11.00	11.00	DISPARPORA	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		11.00	11.00		
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	TDUP	2,661.00	2,661.00		
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	252,961.00	252,961.00		
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Kegiatan	1.00	1.00		
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	orang	0.00	0.00		
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Industri	10.00	10.00		
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	0.00	0.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	520.00	0.00		
					520.00			
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	7.00	7.00		
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun						
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Unit	122.00	122.00	DISTAN PANGAN	
		2	Prasarana pertanian yang digunakan		100.00	100.00		
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Dokumen	3.00	3.00		
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	%	100.00	100.00		
					100.00			
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	%	3.00	100.00		
					3.00			
		2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular						
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (bencana pertanian dan penyakit menular)	Unit	2,032.00	100.00		
					2,032.00			
28	Kehutanan							
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen	0.00	0.00	DISTAN PANGAN	
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		0.00	0.00		
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura		0.00	0.00		
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		0.00	0.00		
29	ESDM	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota						
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	ada/tidak	0.00	0.00	DPUPR	
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP						
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :	%	0.00	0.00	DPMPTSP	
					0.00			
			a. Pusat perbelanjaan	%	88.00	100.00		
			b. Toko swalayan		88.00			
		2	Persentase penerbitan TDG	%	11.00	100.00		
					11.00			
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	%	0.00	0.00		
					1.00			
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah
					Elemen data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	%	0.00	0.00	
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	%	0.00	0.00	
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	%	0.00	0.00	
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan	%	0.00	0.00	DISDAGKOP UKM DPMPTSP
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	%	0.00	0.00	DISDAGKOP UKM
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	100.00	1.00	
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	0.02	0.02	
			2. Persentase kinerja realisasi pupuk				
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		12,243.00	68.92	DISTAN PANGAN
					17,763.00		
			3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	8,519.00	44.41	DISDAGKOP UKM
					19,184.00		
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	502.00	42.36	
					1,185.00		
31	Perindustrian		1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten				
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di	%	0.00	0.00	DISPERINNAKER
					0.00		
			2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang				
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	%	100.00	90.00	
			3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi				
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	%	11.00	64.71	
					17.00		
			4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil yang				
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI bagi industri kecil yang diterbitkan	%	0.00	0.00	
					0.00		
			5. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total	%	0.00	0.00	
					0.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	SATUAN	Data LPPD		Perangkat Daerah
					Elemen data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	0.00	0.00	DISPERINNAKER
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Permukiman	0.00	0.00	
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Permukiman	0.00	0.00	

LAMPIRAN 2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD%	35,015.00	91.97%	DISDIKBUD
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		38,074.00		DISDUKCAPIL
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar%	109,490.00	91.02%	DISDIKBUD
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		120,288.00		DISDUKCAPIL
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama%	53,864.00	85.59%	DISDIKBUD
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		62,933.00		DISDUKCAPIL
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan%	4,970.00	100.00%	DISDIKBUD
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		4,970.00		DISDIKBUD
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten		779.00	0.06%	DINKES
				Jumlah Penduduk kabupaten		1,331,921.00		DISDUKCAPIL
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi minimal Tingkat Utama	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi minimal Tingkat Utama%	6.00	100.00%	DINKES
				Jumlah RS di kabupaten		6.00		DINKES
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan%	16,064.00	100.00%	DINKES
				Jumlah ibu hamil di kabupaten		16,064.00		DINKES
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan%	14,874.00	99.99%	DINKES
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten		14,876.00		DINKES
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%	14,873.00	99.95%	DINKES
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten		14,881.00		DINKES
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%	77,479.00	97.42%	DINKES
Jumlah balita di kabupaten				79,528.00	DINKES			
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%	160,763.00	95.17%	DINKES		
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten		168,920.00		DISDUKCAPIL		

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar%	574,207.00	68.01%	DINKES
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten		844,262.00		DISDUKCAPIL
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar%	169,939.00	91.93%	DINKES
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten		184,861.00		DISDUKCAPIL
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%	135,309.00	34.27%	DINKES
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten		394,838.00		DINKES
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%	19,634.00	100.00%	DINKES
				Jumlah penderita DM di kabupaten		19,634.00		DINKES
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%	2,428.00	74.07%	DINKES
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten		3,278.00		DINKES
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%	11,595.00	100.00%	DINKES
				Jumlah penderita TBC di kabupaten		11,595.00		DINKES
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar%	18,409.00	100.00%	DINKES
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten		18,409.00		DINKES
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)%	1.00	100.00%	DPRKP
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten (ha)		1.00		DPRKP
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)%	1.00	100.00%	DPRKP
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (ha)		1.00		DPRKP
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting%	2,393.50	6.71%	DPUPR
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten		35,662.00		DPUPR

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.%	413,716.00	92.49%	DPUPR
				Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.		447,308.00		DPUPR
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD%	409,379.00	91.52%	DPUPR
				Jumlah rumah di Kabupaten	Unit	447,308.00		BAPPEDA dan LITBANGDA
		24	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya%	169.00	100.00%	DPMPTSP
				Jumlah IMB yang berlaku		169.00		DPMPTSP
		25	Tingkat kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap%	911.76	89.33%	DPUPR
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten		1,020.66		DPUPR
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis%	125.00	100.00%	DPUPR
				Jumlah kebutuhan teknis/analisis di wilayah kabupaten		125.00		DPUPR
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi%	154.00	100.00%	DPUPR
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		154.00		DPUPR
		4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n%	35.00
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n						35.00	BPBD	
29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni%	43.00	148.28%	DPRKP		
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelavanoan		29.00		DPRKP		
30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani%	7.28	2.89%	DPRKP		
		Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha		252.06		DPRKP		
31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah	Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni%	17,631.00	4.85%	DPRKP		

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
			Tidak Layak Huni)	Jumlah total unit rumah Kabupaten	Unit	363,326.00	158.80%	BAPPEDA dan LITBANGDA
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Jumlah unit rumah kab/kota% Unit	228.00 14,358.00		DPRKP BAPPEDA dan LITBANGDA
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk%%	310.00 310.00	100.00%	SATPOL PP SATPOL PP
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi%%	12.00 12.00	100.00%	SATPOL PP SATPOL PP
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Orang	463,772.00	463,772.00	BPBD
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Orang	2,922.00	2,922.00	BPBD
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Orang	21.00	21.00	BPBD
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten%%	1,380.00 294.00	469.39%	BPBD BPBD
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Menit	12.02	12.02	BPBD
6	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis%%	1,058.00 1,058.00	100.00%	DINSOS PPKB PPPA DINSOS PPKB PPPA
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran%	456.00	100.00%	DINSOS PPKB PPPA

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah	
						Elemen data			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
			darurat bencana daerah Kabupaten	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		456.00		DINSOS PPKB PPPA	
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD%	20.00	100.00%	DISPERINNAKER	
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten		20.00		DISPERINNAKER	
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi%	240.00	0.03%	DISPERINNAKER	
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan		833,166.00		DISPERINNAKER	
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	Jumlah tenaga kerja		26,211.56	3.15%	DISPERINNAKER
					Jumlah tenaga kerja		833,166.00		DISPERINNAKER
45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah Perusahaan%	45.00	11.19%	DISPERINNAKER		
			Jumlah Perusahaan		402.00		DISPERINNAKER		
46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	Jumlah pencaker yang terdaftar%	1,471.00	69.35%	DISPERINNAKER		
			Jumlah pencaker yang terdaftar		2,121.00		DISPERINNAKER		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD%	1,285,188,630,505.00	59.26%	DINSOS PPKB PPPA	
				Jumlah seluruh belanja langsung APBD		2,168,886,222,680.00		BPPKAD	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi	Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)%	71.00	100.00%	DINSOS PPKB PPPA
					Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		71.00		DISDUKCAPIL
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Per 100.000		62.00	0.94%	DINSOS PPKB PPPA
					Jumlah penduduk perempuan		661,317.00		DISDUKCAPIL
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung)	Jumlah cadangan pangan kabupaten%	61,250.00	245.00%	DISTAN PANGAN	
				Jumlah kebutuhan pangan kabupaten		25,000.00		DISTAN PANGAN	
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi%	2,089,214.66	100.00%	DPMPTSP	
				Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	m2	2,089,214.66		DPMPTSP	
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum%	66,152.00	100.00%	DPUPR
					Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		66,152.00		DPUPR
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha%	1,963,113.66	100.00%	DPMPTSP
					Jumlah penerima tanah obyek landreform		1,963,113.66		DPMPTSP
54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	Jumlah penerima tanah obyek landreform%	0.00	0.00%	DPUPR		
			Jumlah penerima tanah obyek landreform		1.00		DPUPR		

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
11	Lingkungan Hidup	55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah%	0.00	0.00%	DPUPR
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan		1.00		DPUPR
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani%	2.00	100.00%	BAGIAN PEMERINTAHAN
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		2.00		
		57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		65.80	65.80	DLH
				Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)		20.33		DLH
	Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)				36.27	DLH		
	Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)				9.20	DLH		
	58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani%	123,798.00	51.21%	DLH	
			Total vol timbunan sampah Kabupaten		241,767.00		DLH	
	59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten%	46.00	66.67%	DLH	
Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan				69.00	DLH			
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP%	1,004,104.00	97.80%	DISDUKCAPIL
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		1,026,673.00		DISDUKCAPIL
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA%	245,554.00	76.14%	DISDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0-17 tahun		322,512.00		DISDUKCAPIL
		62	Kepemilikan Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran%	353,831.00	98.00%	DISDUKCAPIL
				Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun		361,066.00		DISDUKCAPIL
63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama%	13.00	27.66%	DISDUKCAPIL		
		Jumlah OPD		47.00		BAGIAN ORGANISASI		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun%	3.00	100.00%	DISPERMADES
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)		3.00		DISPERMADES
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun%	188.00	90.82%	DISPERMADES
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)		207.00		DISPERMADES
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$		2.11	2.11%	DINSOS PPKB PPPA
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive)	Jumlah peserta KB Aktif Modern%	144,786.00	71.85%	DINSOS PPKB PPPA

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
			Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Pasangan Usia Subur		201,515.00		DINSOS PPKB PPPA
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani%	23,601.00	11.71%	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah Pasangan Usia Subur		201,515.00		DINSOS PPKB PPPA
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)		0.63	63.00%	DISHUB
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C ratio di jalan kabupaten		0.24	0.24%	DISHUB
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo%	47.00	100.00%	DISKOMINFO
				Jumlah OPD		47.00		DISKOMINFO
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi%	15.00	100.00%	DISKOMINFO
				Jumlah Layanan Publik		15.00		DISKOMINFO
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten%	927,287.00	69.62%	DISKOMINFO
				Jumlah penduduk (diatas 17 tahun)		1,331,921.00		DISDUKCAPIL
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset%	222.00	46.64%	DISDAGKOP UKM
				Jumlah seluruh koperasi		476.00		DISDAGKOP UKM
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha%	60,389.00	67.82%	DISDAGKOP UKM
				Jumlah usaha mikro keseluruhan		89,048.00		DISDAGKOP UKM
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten%	1,184,218,479,721.00	31.95%	DPMPPTSP
				Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten		3,706,876,409,972.00		DPMPPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten%	35.00	0.01%	DISPARPORA
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		295,755.00		DISDUKCAPIL
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan%	60.00	0.02%	DISPARPORA
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		295,755.00		DISDUKCAPIL
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	52.00	52.00	DISPARPORA
20	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah%	47.00	100.00%	DISKOMINFO
				Jumlah OPD		47.00		BAGIAN ORGANISASI

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah OPD%	47.00 47.00	100.00%	DISKOMINFO BAGIAN ORGANISASI
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi Jumlah area penilaian		504.00 645.00	78.14%	DISKOMINFO DISKOMINFO
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang terdata%	1,030.00 1,030.00	100.00%	DISDIKBUD DISDIKBUD
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		55.86	55.86	DISPUSPA
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \frac{UPLM}{AIM} \times 100$		88.01	88.01	DISPUSPA
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SKN melalui IKK	T %	82.99	82.99	DISPUSPA
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	%	83.33	83.33	DISPUSPA
Urusan Pilihan								
25	Kelautan dan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)%	20,109.71	101.54%	DISPETERIKAN
				Target produksi perikanan		19,804.00		
	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)/Jumlah wisatawan tahun n-1		178,155.00	238.16%	DISPARPORA

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
26				Jumlah wisatawan tahun n-1		74,806.00		DISPARPORA
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1) / \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1$		472,174.00	17.30%	DISPARPORA
				Jumlah wisatawan tahun n-1		2,729,643.00		DISPARPORA
		91	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual%	63,011.00	35.85%	DISPARPORA
				Jumlah kamar yang tersedia		175,740.00		DISPARPORA
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)	Rupiah	1,820.34	4.47%	BAPPEDA dan LITBANGDA
Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)	Rupiah			40,680.39	BAPPEDA dan LITBANGDA			
93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun n%	5,829,430,670.00	1.25%	BPPKAD		
		Realisasi PAD Tahun n		465,452,257,784.00		BPPKAD		
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)	Ton/Ha	410,437.50	771.95%	DISTAN PANGAN
				Luas Panen (ha)		53,168.90		DISTAN PANGAN
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	%	2,019.00	114.98%	DISPETERIKAN
Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun t-1	1,756.00			DISPETERIKAN				
29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin%	0.00	0.00%	DPUPR
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi		0.00		DPUPR
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan		21,125.00	100.00%	DPMPTSP
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten		21,125.00		DPMPTSP
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi%	12,243.00	68.92%	DISTAN PANGAN
RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)	17,763.00			DISTAN PANGAN				
99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan%	8,519.00	44.41%	DISDAGKOP UKM		
		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten		19,184.00		DISDAGKOP UKM		
31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	$(\text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun } n - \text{Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun } n-1) / \text{Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun } n-1$%	0.00	0.00%	DISPERINNAKER
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1		24,131.00		DISPERINNAKER
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1				
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan	Jumlah Target Jenis Industri Prioritas kabupaten yang ditetapkan%	100.00	100.00%	DISPERINNAKER
Jumlah Realisasi Jenis Industri Prioritas kabupaten								
102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan%	16.00	0.13%	DISPERINNAKER		
		Jumlah izin yang dikeluarkan		12,748.00		DISPERINNAKER		

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan%	1.00	100.00%	DISPERINNAKER
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan%	1.00		DISPERINNAKER
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		70.00	70.00	DISPERINNAKER
	Transmigrasi	106		1.Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2.Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3.Jumlah satuan pemukiman yang dibina		100.00	100.00	DISPERINNAKER

LAMPIRAN 2.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah	
						Elemen data			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (realisasi) %	227,920,585,756.00	8.34%	BPPKAD	
				Jumlah APBD (realisasi)		2,731,805,575,325.00		BPPKAD	
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD %	465,452,257,784.00	18.09%	BPPKAD	
				Jumlah PDRB non migas		2,573,447,894,890.00		BPPKAD	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3.00	3.00	INSPEKTORAT	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3.00	3.00	INSPEKTORAT	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi) %	1,533,292,534,584.00	57.05%	BPPKAD	
				Jumlah belanja APBD (realisasi)		2,687,649,575,325.00		BPPKAD	
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP		7.00	7.00	INSPEKTORAT
					WDP		3.00	3.00	INSPEKTORAT
TW					0.00	0.00	INSPEKTORAT		
TMP					0.00	0.00	INSPEKTORAT		
2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n %	0.00	0.00%	BAGIAN PENGADAAN	
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		528.00		BAGIAN PENGADAAN	
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif %	9,339.00	78.82%	BAGIAN PENGADAAN	
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		11,848.00		BAGIAN PENGADAAN	
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan %	947,158,217,982.00	46.67%	BAGIAN PENGADAAN	
				Total belanja langsung		2,029,620,445,484.00		BPPKAD	
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) %	206,705,000,000.00	95.43%	BAGIAN PBJ
					Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)		216,611,000,000.00		BAGIAN PBJ

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) %	1,263.00	57.96%	BKPPD
				Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		2,179.00		BKPPD
		12	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) %	649.00	29.78%	BKPPD
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		2,179.00		BKPPD
		13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi %	373.00	57.47%	BKPPD
				Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		649.00		BKPPD
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	14	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi %	2,687,649,575,325.00	98.77%	BPPKAD
				Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		2,721,238,994,250.00		BPPKAD
		15	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi %	465,452,257,784.00	107.54%	BPPKAD
				Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		432,819,901,874.00		BPPKAD
		16	Assets management	Jumlah Asset Manajemen	Jumlah	4.00	4.00	BPPKAD
				Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	1	BPPKAD
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	1	BPPKAD
				Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya	1	BPPKAD
				Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	1	BPPKAD
		17	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA %	286,776,557,722.00	11.16%	BPPKAD
				Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)		2,570,326,001,677.00		BPPKAD
5	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda %	16,082,775,692.00	96.31%	BPPKAD
				Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda		16,699,462,797.00		BPPKAD
		19	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda %	12.00	100.00%	BPPKAD
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci		12.00		BPPKAD



**Penghargaan
Kabupaten
Magelang
Tahun 2023**

PENGHARGAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

PENGHARGAAN BPBD

Penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang telah menjadi tuan rumah dan mendukung kegiatan BNPB selama tahun 2022 dari BNPB

2 MARET 2023

DIGITAL GOVERNMENT AWARD

Anugerah Digital Government Award Kategori Penguatan Kebijakan SPBE dari KemenPAN RB

20 MARET 2023

OPINI WTP

Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah

19 MEI 2023



PENGHARGAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

PENGHARGAAN JDIH

Penghargaan sebagai
Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH)
Terbaik Ke-2 Kategori
Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Jawa
Tengah
27 JUNI 2023



KLA

Penghargaan
Kabupaten Layak Anak
(KLA) kategori Nindya
Tahun 2023 dari
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
(PPPA) RI

22 JULI 2023



JUARA I KEARSIPAN

Juara I Pemilihan
Arsiparis Teladan
Kategori Keahlian
Tingkat Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023
atas nama Agustina
Dwi Krismayanti, S.AP

19 AGUSTUS 2023



PENGHARGAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

JUARA II KEARSIPAN

Juara kedua dalam kegiatan pameran virtual kearsipan se Jawa Tengah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

29 AGUSTUS 2023



PEER LEARNING MEETING NASIONAL TPBIS 2023 DARI PERPUSNAS

Inovasi, advokasi dan kemitraan Perpustakaan

1. Inovasi Layanan Perpustakaan,
2. PIC Of The Year
3. Inovasi dan kreasi perpustakaan Desa Kadiluwih kecamatan Salam

21 SEPTEMBER 2023



PENGHARGAAN JDIH NASIONAL

Penghargaan Anggota JDIHN tahun 2023, terbaik 5 Kategori Kabupaten dari Kementerian Hukum dan HAM

12 OKTOBER 2023



PENGHARGAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

PENGHARGAAN PROKLIM

Penghargaan Program
Kampung Iklim
(Proklim) keenam
kalinya berturut-turut
dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK)

24 OKTOBER 2023



PENGHARGAAN PENGHARGAAN BHUMANDALA BUNDA PAUD

Penghargaan
Bhumandala tahun
2023, Terbaik 1
Kategori Penamaan
Rupabumi
Kabupaten/Kota dari
Badan Informasi
Geospasial

6 NOVEMBER 2023



Anugerah
Penghargaan Bunda
PAUD Tingkat
Nasional 2023 kategori
Wiyata Dharma Madya
dari Kemendikbud
Ristek

8 NOVEMBER 2023



PENGHARGAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

KPID JATENG AWARDS 2023

1. Juara 1 kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik
2. Juara 3 kategori Features
3. Juara 3 kategori Lembaga Penyiaran Publik Lokal se-Jawa Tengah

17 NOVEMBER 2023



PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK

Penghargaan Pelayanan Publik Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori "Sangat Baik" Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

21 NOVEMBER 2023



PENGHARGAAN TOP DIGITAL AWARD 2023

RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang berhasil meraih IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business pada penghargaan Top Digital Award 2023

4 DESEMBER 2023



PENGHARGAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

PENGHARGAAN APE

Penghargaan Anugerah
Parahita Ekapraya (APE)
Tahun 2023 kategori
Utama dari Kementerian
PPPA

19 DESEMBER 2023



PENGHARGAAN KIP AWARD

Penghargaan
Keterbukaan Informasi
Publik /KIP Award
dalam kategori Badan
Publik "Informatif"
Tahun 2023 dari
Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah

21 DESEMBER 2023



PENGHARGAAN DAYA SAING DAERAH (PDS)

Penghargaan Daya
Saing Daerah
Kategori Tinggi dari
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah

21 DESEMBER 2023



